



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH FENOMENA SUBURBANISASI
TERHADAP PDRB BEKASI**

TESIS

**GOOLDA INGOT P. SIAHAAN
0906654903**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH FENOMENA SUBURBANISASI
TERHADAP PDRB BEKASI**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

**GOOLDA INGOT P. SIAHAAN
0906654903**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 19 Juli 2012



Goolda Ingot P. Siahaan

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Goolda Ingot P. Siahaan

NPM : 0906654903

Tanda Tangan : 

Tanggal : 19 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh,

Nama : Goolda Ingot P. Siahaan
NPM : 0906654903
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Fenomena Suburbanisasi Terhadap PDRB Bekasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Sonny Harry B. Harmadi (.....)

Penguji : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc. (.....)

Penguji : Paksi C.K. Walandouw, SE., MA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 19 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pencipta langit dan bumi beserta isinya, sumber segala ilmu pengetahuan dan inspirasi karena atas berkat dan kasih-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa selesainya penyusunan tesis ini adalah juga berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Sonny Harry B. Harmadi, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi penulisan tesis ini;
- (2) Paksi C.K. Walandouw, S.E., M.A., selaku dewan penguji dan dosen mata kuliah kekhususan EPKD yang di tahap awal dan akhir proses penulisan tesis ini turut berkontribusi melalui pemikiran, koreksi dan saran-saran yang berarti bagi penyusunan dan perbaikan akhir tesis ini;
- (3) Iman Rozani, S.E., M.Soc.Sc., selaku dewan penguji yang telah memberi kritikan dan saran yang membangun bagi penyelesaian akhir tesis ini;
- (4) Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan belajar, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
- (5) Seluruh staff administrasi Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam pelayanan;

- (4) Para staf BPS, Ari, Jimmy Jeremias, Pipit, Wisnu, Andri, Rini, Eko (BPS Pusat), Hasbulah (BPS DKI Jakarta), Teguh (BPS Kab. Bekasi) yang sangat membantu dalam menyediakan data dan informasi untuk penulisan tesis ini;
- (5) Mama tersayang Solida Sianipar untuk doa dengan segala kasih dan kesabaran yang diberikan, Kakakku Rina Siahaan dan kedua adekku Inra Siahaan dan Franky Siahaan yang telah memberikan motivasi dan dukungan doa yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis dan studi program magister sesuai dengan rencana-Nya;
- (6) Yantie Taulu, seseorang yang penuh pengertian, kesabaran, kasih dan pengorbanan yang setia memotivasi dan mendukung dalam doa hingga selesainya tesis dan studi program magister;
- (7) Para sahabat yang turut memberikan dukungan moril dan berkontribusi dalam penyelesaian akhir tesis ini, Aninda Ratih Kusumaningrum, Teguh Murdjijanto, Yuliana Rini Dwi Yuliandari dan semua teman-teman MPKP Angkatan XXII Sore, terimakasih untuk dukungannya.

Saya percaya Tuhan telah memakai semua pihak untuk membimbing dan membantu saya dalam menyelesaikan penulisan tesis dan studi program magister ini. Saya juga percaya bahwa Tuhan jugalah yang berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Sebagai manusia biasa, saya menyadari bahwa tesis ini masih ada kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun dari informasi, data dan hasil penelitian yang diperoleh, saya berharap tesis ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, 19 Juli 2012

Penulis

Goolda Ingot P. Siahaan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Goolda Ingot P. Siahaan
NPM : 0906654903
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

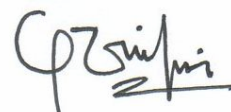
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Pengaruh Fenomena Suburbanisasi Terhadap PDRB Bekasi

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 19 Juli 2012
Yang menyatakan



Goolda Ingot P. Siahaan

ABSTRAK

Nama : Goolda Ingot P. Siahaan
Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Fenomena Suburbanisasi Terhadap PDRB Bekasi

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh fenomena *suburbanisasi* terhadap PDRB Bekasi melalui faktor populasi suburban, tenaga kerja dan investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial, untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena *suburbanisasi* dalam pertumbuhan populasi suburban, tenaga kerja dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan dan fluktuasi PDRB Bekasi selama periode tahun 1990-2010. Secara independen faktor tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi. Faktor suburbanisasi yang paling signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi adalah populasi suburban.

Kata kunci:

Suburbanisasi, wilayah suburban, populasi suburban, tenaga kerja, investasi dan PDRB.

ABSTRACT

Name : Goolda Ingot P. Siahaan
Study Program : Master of Planning and Public Policy
Title : The Effects of Suburbanites in Bekasi on Local GDP: an Econometrics Analysis

This study aim is to analyze the influence of suburbanites' phenomenon against GDP Bekasi through suburban population, labour, and investment variables. The research methodology employs descriptive and inferential analysis whereas to observe the effect of independent variables against dependent variable is used regression analysis. The result shows suburbanites' phenomenon in the growth of suburban population, labour, and investment has significant affect to the growth and fluctuation of GDP Bekasi during 1990 to 2010. Independently, labour shows no significant affect to GDP Bekasi. The most significant suburbanite factor affect to GDP Bekasi is suburban population.

Key words:

Suburbanites, suburban area, suburban population, labour, investment, and regional gross domestic product.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4. Hipotesis	8
1.5. Kerangka Analisis	8
1.6. Batasan Penelitian	9
2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Suburbanisasi	10
2.1.1. Wilayah Suburban	14
2.1.2. Penelitian Tentang Suburbanisasi	16
2.1.3. Studi Terdahulu dan Penelitian Yang Dilakukan	20
2.2. Populasi Suburban	21
2.2.1. Mobilitas Penduduk Suburban	23
2.2.2. Populasi dan PDRB	27
2.3. Tenaga Kerja	32
2.3.1. Mobilitas Tenaga Kerja	34
2.3.2. Tenaga Kerja dan PDRB	36
2.4. Investasi	37
2.4.1. Mobilitas Investasi dan Faktor Produksi	41
2.4.2. Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Investasi	45
2.4.3. Investasi dan PDRB	47
2.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional	53
2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	57
2.6.1. Penghitungan PDRB	59
2.6.2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB	64
2.7. Manajemen Kota dan Wilayah	66

3. METODOLOGI PENELITIAN	70
3.1. Sumber Data	70
3.2. Metode Pengumpulan Data	71
3.3. Metode Pengambilan Sampel	71
3.4. Definisi Konseptual dan Defenisi Operasional	76
3.5. Metode Analisis	80
3.6. Metode Pengolahan Data	81
4. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	84
4.1. Wilayah Kota Bekasi	84
4.1.1. Kependudukan Kota Bekasi	88
4.1.2. Ketenagakerjaan Kota Bekasi.....	91
4.1.3. Investasi Kota Bekasi	93
4.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Bekasi	95
4.2. Wilayah Kabupaten Bekasi	98
4.2.1. Kependudukan Kabupaten Bekasi	102
4.2.2. Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi	105
4.2.3. Investasi Kabupaten Bekasi	107
4.2.4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bekasi	109
5. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN	112
5.1. Analisis Deskriptif.....	112
5.2. Analisis Inferensial.....	131
5.3. Hasil Penelitian	139
6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	148
6.1. Kesimpulan	148
6.2. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN	159

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Prosentase Tempat Tinggal dan Tempat Kerja (1991)	27
Tabel 4.1.	Banyaknya IMB yang Dikeluarkan di Kota Bekasi 2000-2009	87
Tabel 4.2.	Populasi Kota Bekasi Tahun 1990-2010	89
Tabel 4.3.	Kota Bekasi Menurut Kecamatan Tahun 2010	90
Tabel 4.4.	Angkatan Kerja Kota Bekasi Tahun 1996-2010	92
Tabel 4.5.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama Kota Bekasi 2000-2010	93
Tabel 4.6.	Banyaknya Perusahaan Yang Mendapatkan SIUP di Kota Bekasi	95
Tabel 4.7.	PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha 1996-2010	96
Tabel 4.8.	Pembangunan Rumah dan Ruko di Kabupaten Bekasi	102
Tabel 4.9.	Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan Tahun 2010	103
Tabel 4.10.	Populasi Kabupaten Bekasi Tahun 1990-2010	105
Tabel 4.11.	Angkatan Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 1990-2010	106
Tabel 4.12.	Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kabupaten Bekasi...	107
Tabel 4.13.	Banyaknya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang Diterbitkan di Kabupaten Bekasi	109
Tabel 4.14.	PDRB Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Usaha 1990-2010...	110
Tabel 5.1.	Arus Migrasi Provinsi DKI Jakarta 1975-2000	117
Tabel 5.2.	Prosentase Tempat Tinggal dan Tempat Bekerja Penduduk Usia Kerja Tahun 2010	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Analisis	9
Gambar 3.1.	Peta Wilayah Suburbanisasi Kota Bekasi 2010	73
Gambar 3.2.	Peta Wilayah Suburbanisasi Kabupaten Bekasi 2010	74
Gambar 4.1.	Prosentase Luas Wilayah Kota Bekasi Menurut Kecamatan 2010	85
Gambar 4.2.	Luas Tanah Kering dan Tanah Sawah Kota Bekasi Menurut Penggunaannya 2009	86
Gambar 4.3.	Investasi Kota Bekasi 1996-2010	94
Gambar 4.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi 2000-2010	97
Gambar 4.5.	Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan 2010	98
Gambar 4.6.	Luas Tanah Kering dan Tanah Sawah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaannya 2010	100
Gambar 4.7.	Investasi Kabupaten Bekasi 1990-2010	108
Gambar 4.8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi 2000-2010	111
Gambar 5.1.	Populasi Bekasi 1990-2010	113
Gambar 5.2.	Tenaga Kerja Bekasi 1990-2010	118
Gambar 5.3.	Tenaga Kerja Kota Bekasi Menurut Lapangan Kerja Utama 2000-2010	121
Gambar 5.4.	Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Kerja Utama 2000-2010	121
Gambar 5.5.	Investasi Bekasi 1990-2010	123
Gambar 5.6.	PDRB Bekasi 1990-2010	126
Gambar 5.7.	PDRB Kota Bekasi ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha 2009	128
Gambar 5.8.	PDRB Kabupaten Bekasi ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha 2009	129

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data PDRB, Populasi Suburban, Tenaga Kerja dan Investasi Wilayah Bekasi Tahun 1990-2010	159
Lampiran 2.	Hasil Regresi Pengaruh Faktor Suburbanisasi Terhadap PDRB Bekasi	160
Lampiran 3.	Uji White Heteroskedasticity	161
Lampiran 4.	Matrik Koefisien Korelasi Antarvariabel	162
	Uji Normalitas Jarque-Bera	162



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suburbanisasi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan proses pertumbuhan atau perkembangan daerah pinggiran pusat kota. Dalam fenomena suburbanisasi terjadi perpindahan penduduk dari pusat kota ke subpusat kota dimana banyak penduduk kota yang bekerja di pusat kota memilih untuk tinggal dan menetap dipinggiran kota. Perpindahan penduduk ini kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk, terbentuknya pemukiman-pemukiman baru dan kawasan-kawasan industri dipinggiran wilayah perkotaan. Kondisi ini dalam jangka panjang berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah pinggiran kota.

Fenomena suburbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota Jakarta ke wilayah pinggiran kota Jakarta (wilayah suburban) pada dasarnya terkait dengan masalah populasi kota Jakarta sebagai pusat kota yang sudah sangat besar jumlah penduduknya dan terus mengalami penambahan penduduk dari tahun ke tahun. Selama dua dekade (1990-2010) besarnya jumlah penduduk kota Jakarta telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial bagi para penduduknya. Pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk sekitar 9,6 juta orang, kepadatan penduduk Jakarta telah mencapai 14.469 jiwa/Km². Dengan luas wilayah yang hanya 653,63 Km² kapasitas kota Jakarta sudah tidak memungkinkan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan penduduknya yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah populasi Jakarta yang sangat besar ini disebabkan karena adanya proses urbanisasi yang telah terjadi selama tiga dekade terakhir. Tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Jakarta dan pulau Jawa dari pulau lainpun diluar pulau Jawa, orang berdatangan dan tinggal menetap Jakarta. Kondisi ini dalam jangka panjang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan kependudukan, sosial dan ekonomi di kota Jakarta.

Terjadinya suburbanisasi penduduk dari pusat kota Jakarta ke wilayah suburban, antara lain disebabkan karena tingginya persaingan penduduk dalam mendapatkan lahan pemukiman di pusat kota Jakarta, peningkatan pendapatan penduduk, harga rumah di wilayah suburban lebih murah dibandingkan di pusat kota Jakarta, berkembangnya jaringan jalan raya antara wilayah pusat kota Jakarta dan sub pusat kota termasuk peningkatan sarana dan prasarananya (akses jalan dan biaya komuter yang murah), menurunnya kualitas lingkungan hidup wilayah pusat kota (eksternalitas pusat kota). Kondisi-kondisi inilah yang mendorong terjadinya perpindahan penduduk dari pusat kota Jakarta ke wilayah suburban, antara lain ke wilayah Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang.

Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi merupakan wilayah pinggiran Kota Jakarta yang mengalami terjadinya proses suburbanisasi. Selama dua dekade sejak tahun 1990 hingga 2010 suburbanisasi yang terjadi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah penduduk di wilayah suburban Bekasi. Perhitungan data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 1990 populasi suburban Bekasi berjumlah 1.782.036 orang, tahun 2000 berjumlah 2.875.415 orang dan pada tahun 2010 menjadi 4.387.816 orang. Selama dua dekade jumlah penduduk suburban di wilayah Bekasi telah mengalami peningkatan sebanyak 2,5 kali jumlah penduduk suburban tahun 1990.

Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain adanya kelahiran penduduk (pertumbuhan alamiah), terjadinya migrasi atau mobilitas penduduk atau karena adanya pemekaran atau reklasifikasi suatu wilayah perdesaan menjadi perkotaan. Dalam hal mobilitas antar wilayah terjadi perpindahan penduduk dan faktor-faktor produksi (berupa tenaga kerja dan barang modal) dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Sehubungan dengan mobilitas penduduk, salah satu penyebab meningkatnya jumlah penduduk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi adalah karena terjadinya suburbanisasi di wilayah Bekasi. Adanya frekwensi mobilitas orang dan barang antar wilayah yang cukup tinggi selama periode tahun 1990-2010 di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menunjukkan terjadinya proses suburbanisasi tersebut.

Suburbanisasi telah membuat laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menjadi cenderung tinggi dalam dua dekade terakhir. Fungsi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sebagai kawasan pemukiman penduduk dan kawasan pengembangan industri telah menyebabkan wilayah Bekasi menjadi tujuan bagi banyak penduduk dan investor luar untuk tinggal dan menetap di Bekasi. Kondisi ini membuat berkembangnya usaha penyediaan perumahan penduduk (properti), industri manufaktur dan tersedianya lapangan kerja di wilayah Bekasi. Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi telah berkembang menjadi kota industri, jasa dan perdagangan. Wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menjadi semakin strategis karena termasuk salah satu daerah penyangga Ibu Kota Jakarta dalam sistem kota metropolitan Jabodetabek. Kondisi ini sekaligus mengakibatkan terjadinya kecenderungan pemusatan pertumbuhan dan perkembangan tata ruang di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Menurut O'Sullivan (2007), suburbanisasi penduduk dan pekerjaan akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Pekerjaan akan mengikuti tenaga kerja yang bergerak ke wilayah suburban, kondisi lain tenaga kerja yang mengikuti pekerjaan yang bergerak ke wilayah suburban. Peningkatan populasi suburban Bekasi ternyata diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja Bekasi. Pada tahun 1990 jumlah angkatan kerja di Bekasi (Kota dan Kabupaten Bekasi) ada sejumlah 713.024 orang, tahun 2000 sejumlah 1,477,049 kemudian pada tahun 2010 menjadi 2,273,357 orang. Dalam dua dekade telah terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di Bekasi sebesar tiga kali jumlah angkatan kerja tahun 1990. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja di wilayah Bekasi selama periode tahun 1990 hingga 2010 adalah signifikan.

Selama periode tahun 1990-2010 kegiatan investasi di wilayah Bekasi juga mengalami pertumbuhan walaupun terlihat lambat dan terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari berbagai krisis yang melanda Indonesia. Pada periode tahun 2000-2010 total investasi Bekasi mencapai tingkat pertumbuhan 4,08 persen per tahun namun tingkat pertumbuhan investasi ini masih berada di bawah tingkat pertumbuhan investasi periode sebelumnya (1990-2000) yang mencapai lebih dari

10 persen per tahun. Kegiatan investasi dengan nilai total investasi tertinggi lebih banyak dilakukan di Kabupaten Bekasi daripada di Kota Bekasi.

Peningkatan populasi suburban, jumlah tenaga kerja dan investasi di Bekasi selama periode tahun 1990-2000 paralel dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan terjadinya proses suburbanisasi di wilayah Bekasi. PDRB Bekasi selama periode 2000-2010 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,93 persen per tahun. Sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap PDRB Bekasi adalah sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Fenomena suburbanisasi merupakan potensi ekonomi yang mampu menciptakan demand dan supply sehingga terjadi transaksi ekonomi diantara para pelaku ekonomi, yaitu pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat lokal. Dalam jangka panjang fenomena ini telah menghasilkan economic of scale dan multiplier effect yang menciptakan pusat-pusat industri dan perdagangan antar wilayah yang secara langsung berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi regional daerah.

Dampak ekonomi dari suburbanisasi telah membuat berbagai perubahan pada pembangunan wilayah suburban, contohnya perubahan di bidang infrastruktur, industri, perdagangan, pengembangan properti, keuangan dan kebijakan fiskal, tata kota, transportasi, komunikasi dan perubahan sosial-ekonomi. Sehubungan dengan dampak suburbanisasi, keragaman kota akan dapat terlihat sebagai akibat dari pengembangan daerah pinggiran terutama dalam hal pembangunan perumahan untuk tempat tinggal penduduk. Dampak suburbanisasi memiliki banyak manfaat sekaligus efek samping karena dalam jangka panjang hal ini menjadi sangat penting dalam perencanaan dan revitalisasi kota modern.

Suburbanisasi dapat berpengaruh positif atau negatif bagi penduduk dan perkembangan suatu wilayah. Tersedianya kebutuhan pokok penduduk yang cukup, infrastruktur dan fasilitas perkotaan yang memadai di wilayah suburban merupakan hal penting yang dapat mendukung kesejahteraan hidup penduduk dan keberlangsungan perekonomian di wilayah suburban seiring dengan proses suburbanisasi yang terus terjadi. Fenomena suburbanisasi dapat mendorong

penduduk urban lainnya datang ke wilayah suburban untuk mencari pekerjaan, melakukan perdagangan, investasi dan kegiatan produktif lainnya yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Kepadatan penduduk yang terus meningkat kontras dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk dikarenakan penggunaan lahan suburban yang tidak terkendali akan mengakibatkan kualitas hidup penduduk menurun sehingga hal ini justru menjadi berlawanan dengan tujuan suburbanisasi tersebut.

Fenomena suburbanisasi jika tidak dikendalikan dapat menimbulkan eksternalitas di wilayah suburban. Hal ini terlihat dari berkembangnya wilayah pinggiran kota yang kontras dengan penyediaan barang publik dan timbulnya berbagai masalah manajemen pembangunan wilayah akibat lemahnya sistem kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses suburbanisasi. Sebagai contoh, di Amerika Serikat pada era pasca perang dunia II dengan adanya kebijakan pemerintah federal, seperti kebijakan pembangunan jaringan jalan yang efisien, yaitu jalan raya dan jalan tol serta kebijakan penjaminan kredit rumah dipinggiran kota, telah berpengaruh besar pada proses suburbanisasi di negara tersebut. Akibatnya, pemerintah mendorong terjadinya pemindahan penduduk kelas menengah keluar dari pusat kota kepinggiran kota.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu proses usaha mengelola sumber-sumber daya yang ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakatnya untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi melalui berbagai kegiatan investasi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayahnya. Perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat dalam era otonomi daerah. Masing-masing daerah akan berlomba dan berusaha meningkatkan pertumbuhannya agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Kemampuan daerah untuk tumbuh ditentukan oleh pengelolaan berbagai faktor ekonomi yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sangat perlu untuk diketahui karakteristiknya sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat diakselerasi dari tahun ke tahun.

Dari paparan diatas timbul beberapa pertanyaan, yaitu apakah fenomena suburbanisasi berupa pertumbuhan populasi suburban, tenaga kerja dan investasi memang memberikan dampak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Bekasi? Apakah dengan meningkatnya populasi penduduk di wilayah suburban sebagai akibat masuknya para urbanit dari luar Bekasi, khususnya mereka yang berasal dari pusat kota Jakarta ke wilayah suburban Bekasi berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Bekasi atau malah justru sebaliknya malah menjadi beban bagi pemerintah daerah Bekasi? Kenapa fenomena suburbanisasi ini terus terjadi selama dua dekade?

Untuk melihat pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, hal pertama yang ingin diketahui peneliti adalah adakah hubungan antara pertumbuhan populasi, kebutuhan tenaga kerja dan kegiatan investasi di wilayah suburban Bekasi dengan pertumbuhan ekonomi regional Bekasi. Kemudian melakukan kajian bagaimana hal itu dapat terjadi dan dalam jangka panjang apa dampaknya terhadap perekonomian dan pembangunan wilayah Bekasi. Adakah hal-hal positif atau negatif yang ditimbulkannya. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyikapi kondisi ini, adakah strategi pembangunan wilayah yang dikembangkan pemerintah daerah untuk menjawab permasalahan lokal dan mencegah timbulnya berbagai permasalahan lain di masa yang akan datang.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan membahas ketiga variabel suburbanisasi, yaitu populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dalam satu paket kajian dengan melihat keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dan mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap PDRB Bekasi. Dengan mengetahui pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, maka berbagai rumusan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal perencanaan dan pembangunan wilayah serta pengembangan ekonomi daerah Bekasi dapat secara efektif dibuat dan diimplementasikan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah fenomena suburbanisasi dalam pertumbuhan populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mempunyai hubungan yang nyata dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Bekasi selama tahun 1990-2010?
2. Bagaimana dan berapa besarnya pengaruh yang disumbangkan oleh faktor populasi suburban, tenaga kerja dan investasi terhadap PDRB Bekasi?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap PDRB Bekasi melalui faktor populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
2. Menganalisis faktor mana diantara ketiga faktor suburbanisasi yang diteliti tersebut, yaitu populasi suburban, tenaga kerja dan investasi yang paling signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi.

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah:

1. Memberikan gambaran dan kondisi yang jelas tentang dampak dari fenomena suburbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional Bekasi.
2. Memberikan informasi dan pengetahuan penting tentang berbagai aspek strategis dan potensi dari suburbanisasi serta permasalahan yang dapat ditimbulkannya sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, pelaku ekonomi, perwakilan rakyat dan para pengambil keputusan lainnya dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah, terutama kebijakan kependudukan, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan investasi, kebijakan pengelolaan wilayah, kebijakan pemukiman dan kebijakan infrastruktur publik.

3. Informasi dan data dalam penelitian ini dapat juga digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam membuat strategi perencanaan wilayah dan pembangunan daerah.
4. Diharapkan dari informasi dan data-data penelitian yang dihasilkan, pada masa yang akan datang secara bertahap pemerintah dan para pelaku ekonomi dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, melayani dan memenuhi kebutuhan penduduk daerah dengan baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah Bekasi.
5. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan masalah suburbanisasi di Indonesia.

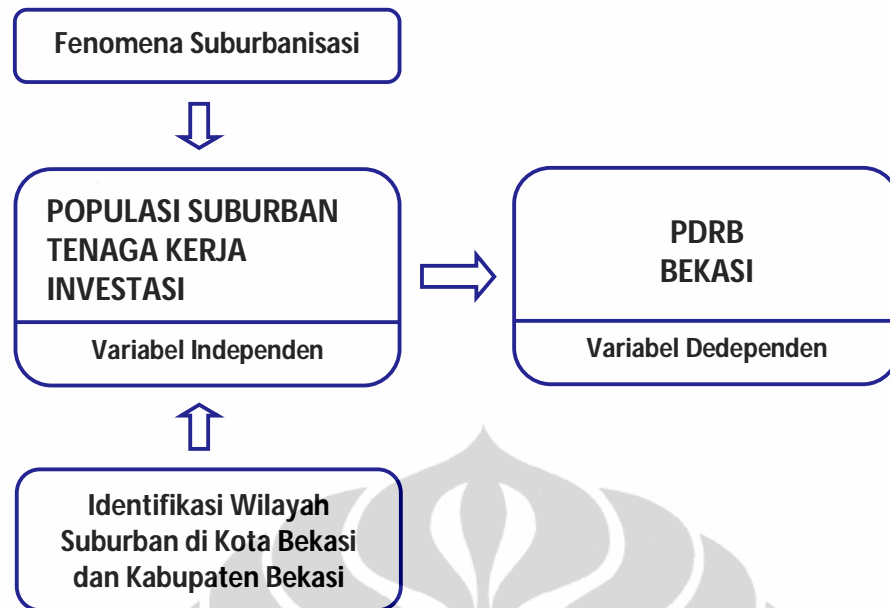
1.4. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Fenomena suburbanisasi yang terjadi di wilayah Bekasi selama kurun waktu tahun 1990 - 2010 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Bekasi.
2. Diduga pertumbuhan populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama periode tahun 1990 - 2010 mempunyai hubungan yang nyata dan berkontribusi secara signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB Bekasi.

1.5. Kerangka Analisis

Dalam kerangka analisis digambarkan secara sederhana logika penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi suburban, tenaga kerja dan investasi, sedangkan variabel dependennya adalah PDRB Bekasi. Untuk gambaran selengkapnya diagram berikut ini menunjukkan kerangka analisis yang digunakan oleh peneliti untuk membahas penelitian yang dilakukan.



Gambar 1.1. Kerangka Analisis

1.6. Batasan Penelitian

Sebenarnya ada terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi regional suatu daerah, faktor tersebut bisa merupakan faktor ekonomi ataupun faktor non-ekonomi. Agar analisa yang dilakukan lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang dari permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, maka analisis terhadap fenomena suburbanisasi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Bekasi difokuskan hanya pada variabel populasi suburban, tenaga kerja, investasi dan PDRB Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini dilakukan hanya pada kecamatan di wilayah suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dan dibatasi hanya pada periode tahun 1990 sampai 2010. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, dalam penelitian ini dikondisikan bahwa di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sudah terjadi fenomena suburbanisasi. Analisis dilakukan dengan menganggap faktor-faktor atau variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*).

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Suburbanisasi

Suburbanisasi merupakan kondisi yang menggambarkan pertumbuhan daerah pinggiran kota besar. Suburbanisasi adalah salah satu penyebab terjadinya peningkatan urban sprawl. Dalam fenomena suburbanisasi banyak penduduk kota besar yang bekerja di pusat kota memilih untuk tinggal dan menetap di pinggiran kota dimana untuk pergi bekerja mereka menggunakan mobil atau transportasi massal. Fenomena ini dapat terjadi juga karena dukungan kemajuan teknologi yang memungkinkan penduduk dapat bekerja dari rumah. Kondisi ini membuat pilihan bagi penduduk untuk melakukan aktivitasnya di lingkungan yang dianggap lebih menyenangkan dari pada kota, yaitu di wilayah suburban.

Menurut Rustiadi dan Panuju (1999), suburbanisasi diartikan sebagai proses terbentuknya pemukiman-pemukiman baru dan juga kawasan-kawasan industri di pinggiran wilayah perkotaan terutama sebagai akibat perpindahan penduduk kota yang membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan industri. Suburbanisasi menggambarkan suatu proses pertumbuhan daerah pinggiran yang secara sistematis lebih cepat dibandingkan dengan kotanya dan sebagai komuter adanya gaya hidup mempengaruhi aktivitas sehari-hari untuk bekerja di kota.

Menurut Paul M. Weaver, Rodriquez-Bachiller dan Francis Cherunilam (dalam Arif, 2009) perkembangan suatu kota umumnya dicirikan oleh adanya perkembangan kawasan pinggiran yang sering disebut suburbanisasi. Indikasi tersebut pada umumnya diawali dengan dua ciri utama, pertama terbentuknya pola tata ruang wilayah di kawasan pinggiran yang dikenal sebagai urban sprawl dan kedua diindikasikan dengan adanya ketergantungan kawasan pinggiran yang baru tumbuh ini terhadap kota induknya. Kedua ciri ini yang kemudian mempengaruhi keadaan pola pergerakan penduduk di wilayah pinggiran kota.

Menurut Sridhar (2007:322), suburbanisasi merupakan proses peningkatan prosentase penduduk yang tinggal di subpusat kota. Menurut Jordan, Ross dan Usowski (1988:612), suburbanisasi didefinisikan sebagai proses desentralisasi penduduk dari pusat kota yang diukur dengan fungsi kepadatan penduduk eksponensial secara sederhana, proses tersebut merupakan proses perpindahan penduduk menjauhi pusat kota. Menurut Van den Berg (1996) (dalam Artawan, 1998), suburbanisasi merupakan tingkatan dimana struktur suatu kota menjadi meluas dan mempengaruhi daerah sekitarnya serta menjanjikan kesejahteraan, sehingga penduduk daerah pinggiran bergerak menuju ke pusat kegiatan dipinggiran kota.

Menurut Klaassen dan Scimemi (dalam Arif, 2009) terjadinya suburbanisasi dikarenakan semakin menurunnya kualitas lingkungan di kawasan pusat kota yang kemudian mendorong tumbuhnya kegiatan perumahan di kawasan pinggiran kota. Perkembangan jaringan jalan raya, peningkatan ekonomi masyarakat dan tingginya persaingan untuk mendapatkan lahan di pusat kota menyebabkan perpindahan penduduk ke wilayah pinggiran kota. Bagi golongan orang yang mampu tinggal di daerah pinggiran kota dan bersedia melakukan perjalanan pulang-pergi ke pusat kota atau kota terdekat untuk bekerja atau melakukan kegiatan lain yang membutuhkan mobilitas, dengan adanya perbaikan dan tersedianya infrastruktur transportasi akan semakin mendorong terjadinya proses suburbanisasi. Pembangunan dan perbaikan jalur kereta api, rute bus dan jalan raya merupakan hal utama yang membuat suburbanisasi menjadi lebih mudah dilaksanakan. Peningkatan jumlah dan ukuran jalan raya merupakan output yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap proses suburbanisasi.

Penyebab terjadinya suburbanisasi terkait pada sejumlah faktor pendorong dan faktor penarik yang berbeda. Faktor pendorong suburbanisasi, antara lain adalah kemacetan jalan dan kepadatan penduduk pusat kota, polusi akibat aktivitas industri, kebisingan di kawasan permukiman, tingkat arus lalu lintas yang tinggi dan persepsi umum tentang rendahnya kualitas hidup di daerah pusat kota. Faktor penarik suburbanisasi, yaitu adanya ruang yang lebih terbuka, persepsi lebih dekat

dengan alam, harga rumah dan pajak properti dipinggiran kota lebih rendah dibandingkan dengan pusat kota serta adanya peningkatan jumlah kesempatan kerja di daerah pinggiran kota.

Menurut O'Sullivan (2007:144), beberapa faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya suburbanisasi adalah kenaikan pendapatan, biaya komuter yang murah, perumahan lama pusat kota, masalah fiskal pusat kota, tingkat kejahatan pusat kota dan kualitas pendidikan pusat kota.

1. Kenaikan Pendapatan

Adanya kenaikan pendapatan dengan harga rumah yang lebih murah dari pusat kota membuat penduduk mempunyai daya beli yang cukup tinggi sehingga tertarik untuk memiliki rumah di wilayah suburban. Kenaikan pendapatan juga menaikkan biaya oportunitas komuter dan meningkatkan daya tarik lokasi yang dekat dengan tempat kerja.

2. Biaya Komuter Murah

Inovasi teknologi transportasi yang dilakukan sampai saat ini membuat biaya perjalanan menjadi lebih murah dibandingkan dengan kondisi pada abad yang lalu. Penurunan biaya komuter relatif telah mengurangi biaya hidup penduduk yang tinggal jauh dari pusat kota dan kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap terjadinya suburbanisasi.

3. Perumahan Lama

Kekumuhan perumahan dipusat kota merupakan alasan lain yang mendorong para penduduk pusat kota pindah ke wilayah suburban. Di wilayah suburban mereka akan menemukan banyak pilihan perumahan baru yang lebih baik yang dibangun oleh para pengembang.

4. Masalah Fiskal

Banyak wilayah pusat kota mempunyai pajak yang relatif tinggi, kondisi ini mendorong para penduduknya untuk pindah ke wilayah suburban yang mempunyai pajak yang lebih rendah.

5. Tingkat Kejahatan

Kebanyakan wilayah-wilayah di pusat kota mempunyai tingkat kejahatan yang tinggi. Hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penduduknya

sehingga mendorong mereka untuk pindah ke wilayah suburban yang relatif lebih aman lingkungannya dibandingkan pusat kota.

6. Pendidikan

Kondisi sekolah-sekolah dipinggiran kota sering dianggap lebih unggul kualitasnya dari pada sekolah-sekolah di pusat kota. Hal ini mendorong para rumah tangga yang tinggal di kota pindah ke wilayah suburban untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Desentralisasi dalam konteks suburbanisasi menurut penjelasan O'Sullivan (2007:142-144) meliputi beberapa bentuk, yaitu:

1. Desentralisasi Populasi

Untuk mengetahui dan memetakan terjadinya suburbanisasi populasi dapat dilakukan dengan menggunakan gradien kepadatan populasi. Gradien kepadatan populasi adalah ukuran tingkatan dimana kepadatan populasi suatu wilayah mengalami penurunan pada setiap jarak tertentu. Artinya, ada perubahan persentase kepadatan populasi untuk setiap tambahan jarak dari pusat kota ke wilayah subpusat kota. Menurut Anas, Arnott dan Small (1998), desentralisasi populasi metropolitan merupakan fenomena di seluruh dunia. Di kota-kota diseluruh dunia, populasi telah bergeser kearah luar dari pusat kota.

2. Desentralisasi Pekerjaan Kantor

Kemajuan dan kecanggihan teknologi komunikasi telah memungkinkan lebih banyak kegiatan kantor dapat dilakukan diluar lokasi CBD. Transmisi informasi secara elektronik memungkinkan para pekerja melakukan pertukaran berbagai informasi secara leluasa tanpa melakukan pertemuan langsung dengan klien di perusahaan lain. Perusahaan dapat memisahkan operasional kantor, yaitu antara kegiatan pengelolaan informasi di wilayah suburban dan kegiatan yang membutuhkan tatap muka di CBD. Komunikasi yang cepat dan canggih menyebabkan orang lebih mudah melakukan kegiatan antar wilayah.

3. Desentralisasi Manufaktur

Moses dan Williamson (1972) mengatakan bahwa terjadinya suburbanisasi manufaktur tidak lepas dari tersedianya transportasi pengangkutan truk antar-kota yang lebih cepat dan murah. Adanya truk membuat perusahaan manufaktur mempertimbangkan trade-off antara tingginya biaya pengangkutan (biaya transportasi ke pelabuhan terus meningkat) dengan rendahnya upah tenaga kerja di wilayah suburban (jika pabrik dipindahkan lebih dekat dengan tempat kerja waktu perjalanan akan singkat, upah pekerja akan turun). Peran truk antar-kota telah menurunkan biaya pengangkutan per unit. Pertimbangan ini membuat perusahaan manufaktur pindah dari pelabuhan di pusat kota ke lokasi suburban.

2.1.1. Wilayah Suburban

Menurut Glasson (1974) dalam Tarigan (2009:111) secara subjektif wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Dengan demikian, pengelompokan ruang atau banyaknya wilayah tergantung kepada kriteria yang digunakan. Wilayah hanyalah suatu model agar kita bisa membedakan lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Menurut Sadyohutomo (2009:4) dalam arti fisik keruangan, wilayah dan daerah mempunyai pengertian yang sama, yaitu suatu hamparan luas sebagai kumpulan dari lokasi-lokasi (sites) atau areal-areal (areas), baik mencakup ciri perkotaan maupun pedesaan.

Wilayah suburban sering didefinisikan sebagai pinggiran kota. Wilayah suburban merupakan wilayah yang memiliki karakteristik campuran antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Apabila dilihat dalam suatu lingkungan daerah maka wilayah suburban merupakan wilayah yang berada di antara daerah rural dan urban. Juga jika dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka suburban merupakan komunitas yang memiliki sifat ditengah-tengah rural dan urban Menurut (Kuswitoyo, 2000).

Salah satu hal yang bisa dilihat dan menjadi ciri wilayah suburban adalah tingginya prosentase wilayah terbangun terhadap luas wilayah dipinggiran kota. Wilayah terbangun merupakan sebagian wilayah yang memiliki karakteristik penggunaan tanah perkotaan, yaitu ditandai dengan adanya pemukiman penduduk bangunan lainnya, seperti perkantoran serta berbagai kegiatan industri dan perdagangan.

Wilayah suburban dalam perspektif lingkungan dikenal sebagai desa-kota. Wilayah desa-kota umumnya mengandung karakteristik campuran desa dan kota. Beberapa daerah memperlihatkan bentuk kota dan yang lain lebih dekat kearah ciri pedesaan. Pengertian dasar desa-kota adalah sebagai tempat bermukim masyarakat pinggir kota dan dengan demikian mencakup semua aspek interaksi, perilaku sosial dan struktur fisik secara spasial. Perkembangannya sangat bergantung pada spasial sistem yang lebih tinggi, yaitu kota. Kondisi di Indonesia, wilayah sub-urban yang banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan kota ditandai dengan pembangunan perumahan baru. Kecirian spasial wilayah sub-urban ditandai oleh bentuk-bentuk campuran antara perumahan teratur yang dibangun oleh pengembang dan perumahan asli tradisional setempat. (Koestoer dalam Kuswitoyo, 2000).

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan bagi penduduk dan perusahaan untuk tinggal dan menetap di wilayah suburban. Bagi penduduk, mereka memiliki kesempatan untuk memiliki rumah berharga murah dan tanah yang lebih luas dari pada di pusat kota. Bagi perusahaan, tersedianya tanah yang murah dan luas serta pajak yang lebih rendah mendorong para pengusaha melakukan investasi lahan dan kegiatan industri untuk keuntungan perusahaan dan pembangunan di wilayah sub-urban. Berada dipinggiran kota mengurangi biaya operasional perusahaan, daerah perkotaan yang selalu mengalami kemacetan lalu lintas telah menciptakan biaya tambahan dalam biaya transportasi bagi perusahaan dimana hal ini dapat dikurangi jika mereka berada di daerah pinggiran dekat jalan raya. Tersedianya berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai di wilayah sub-urban juga menjadi daya tarik bagi para pelaku ekonomi lainnya untuk berinvestasi.

2.1.2. Penelitian Tentang Suburbanisasi

Penelitian fenomena suburbanisasi telah dilakukan oleh para peneliti. Dalam penelitian tersebut secara teori dan empiris telah dibuktikan terjadinya fenomena suburbanisasi di berbagai kota metropolitan dunia. Dalam penelitian tersebut juga diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya suburbanisasi.

Dari hasil penelitian Sitorus, Rustiadi dan Ardiansyah (2000) diketahui bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Jabotabek mempunyai dampak terhadap proses suburbanisasi, yaitu dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di pinggiran Jakarta secara signifikan. Namun hal ini telah membuat jumlah penduduk di pusat kota Jakarta menjadi menurun. Konsekuensi dari fenomena ini adalah telah terjadi konversi lahan di daerah pinggiran kota. Dalam penelitian ini pola spasial dari penggunaan lahan kota dan kepadatan penduduk dikarenakan adanya suburbanisasi dinilai secara empiris dengan mengasumsikan Monas sebagai pusat Jabotabek. Dari data antara tahun 1992 sampai 2000 terjadi pola penurunan kepadatan penduduk yang terlihat sampai sejauh 10 km dari Monas. Namun terjadi peningkatan rasio pada lahan perkotaan. Sementara itu kepadatan penduduk dan rasio kota menunjukkan pola meningkat mulai dari jarak 10 km sampai 45 km. Orang-orang bermigrasi ke daerah pinggiran dimana proses suburbanisasi sangat mempengaruhi pengembangan lahan perkotaan.

Suburbanisasi yang diartikan sebagai proses terbentuknya permukiman-permukiman baru dan juga kawasan-kawasan industri dipinggiran wilayah perkotaan akibat perpindahan penduduk kota terindikasi telah terjadi di Jakarta. Studi yang dilakukan Rustiadi et al. (1999:4) di Jakarta dan di salah satu wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bekasi, memperlihatkan keterkaitan proses migrasi, pertumbuhan ekonomi dan konversi lahan. Dalam studi yang dilakukan Rustiadi et al. tersebut dijelaskan bahwa paling sedikit terdapat tiga tahapan proses suburbanisasi di wilayah pinggiran Jakarta, khususnya Bekasi, yaitu:

1. Pra-suburbanisasi (hingga tahun 1970)
2. Suburbanisasi tahap pertama (awal 1980-an)
3. Suburbanisasi tahap kedua (mulai 1990-an).

Suburbanisasi tahap pertama, pada tahap pra-suburbanisasi di wilayah Bekasi dicirikan dengan rendahnya tingkat kepadatan penduduk dan rendahnya produktifitas lahan sawah dan pertanian pada umumnya. Rendahnya produktifitas lahan pertanian mendorong masyarakat desa di sekeliling kota Jakarta, untuk bermigrasi ke kota, khususnya kota Jakarta. Kebijakan “kota tertutup” merupakan salah satu pemicu terbentuknya perkampungan padat di sekeliling kota Jakarta di tahun 1970-an. Tumbuhnya perumahan kampung-kampung baru yang di sekeliling Jakarta merupakan ciri utama suburbanisasi pada proses suburbanisasi tahap pertama. Periode ini juga dicirikan dengan meningkatnya produktivitas dan luasan lahan sawah di wilayah Bekasi, khususnya sebagai akibat program pembangunan pertanian melalui perluasan sistim irigasi teknis dan introduksi berbagai teknologi pertanian intensif.

Wilayah-wilayah yang berbatasan dan berdekatan dengan Kota Jakarta mengalami proses pertambahan penduduk yang paling pesat seiring dengan banyaknya penduduk asal Jakarta yang mencari lahan yang lebih murah untuk perumahan. Suburbanisasi pada tahap ini masih didominasi oleh pembangunan perumahan yang dibangun secara mandiri - perumahan non real estate (Archer, 1994). Dalam banyak hal, pembangunan perumahan baru di daerah perbatasan dengan kota Jakarta telah menciptakan kampung-kampung perkotaan baru dan kekumuhan baru akibat kurang diimbangi pembangunan infrastruktur yang memadai. Dalam periode yang sama Bekasi mengalami intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian serta urbanisasi secara bersamaan. Suburbanisasi tahap pertama menciptakan pola penggunaan lahan yang kompleks sebagaimana ciri konsep “desa-kota” yang dijelaskan oleh McGee (1987:93-108, 1992). Land use mixture indice (indeks percampuran penggunaan lahan) antara lahan pertanian sawah dan aktivitas urban pada tahap ini, mencapai masa puncaknya (Rustiadi et al., 1999).

Suburbanisasi tahap kedua, pada tahap ini suburbanisasi dicirikan dengan semakin menurunnya luasan lahan sawah seiring dengan semakin pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan meluasnya lahan urban khususnya perumahan berareal luas tipe real-estate dan areal industri (Henderson et al., 1996:71-95).

Pola migrasi Kota Jakarta telah berubah, migrasi neto (netmigration) kota Jakarta telah menjadi negatif, dimana jumlah penduduk keluar (out-migration) telah melampaui jumlah penduduk yang datang (in-migration). Hal ini terutama sebagai akibat pesatnya proses suburbanisasi, akibat migrasi penduduk yang mencari perumahan di wilayah suburban. Proses suburbanisasi telah mempercepat proses konversi lahan di Jakarta dan sekitarnya. Konversi penggunaan lahan di dalam proses suburbanisasi umumnya merupakan proses konversi dari lahan-lahan pertanian yang umumnya paling produktif.

Suburbanisasi tahap ketiga, pada tahap ini mencakup fenomena commuting (melaju) yang sangat besar yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator pelengkap yang menunjukkan telah terjadinya proses suburbanisasi. Orientasi melaju umumnya memiliki dua kelompok tujuan utama, yaitu bekerja dan belajar atau sekolah. Faktor kenyamanan tempat tinggal dan harga lahan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan Jakarta menjadi sebagian alasan dari perpindahan kaum urbanit untuk berpindah dari Jakarta ke pinggiran kota Jakarta.

Penelitian suburbanisasi penduduk dan pabrik di Indonesia telah dilakukan oleh Henderson, Kuncoro dan Nasution (1996:32,71-95). Secara empiris dari hasil penelitian mereka terbukti telah terjadi suburbanisasi penduduk dan suburbanisasi manufaktur dari Jakarta ke Bogor, Tangerang dan Bekasi pada periode tahun 1980-1990. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gianasari (2010) diketahui bahwa telah terjadi suburbanisasi penduduk dari Jakarta ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada periode tahun 1995-2007. Suburbanisasi ini ditandai dengan menurunnya gradien kepadatan penduduk dari pusat kota (Jakarta) ke masing-masing subpusat kota (Tangerang, Bekasi, Bogor). Dari identifikasi suburbanisasi ditemukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat suburbanisasi penduduk dari pusat kota ke subpusat kota, yaitu variabel penduduk, PDRB per kapita dan pekerja.

Penelitian Bradbury, Downs dan Small (1982) dalam O'Sullivan (2007:145), membuktikan bahwa proses suburbanisasi yang terjadi di daerah metropolitan

disebabkan, antara lain karena perumahan penduduk yang sudah relatif lama di pusat kota, pajak yang relatif tinggi di pusat kota, populasi penduduk kulit hitam yang relatif besar jumlahnya di pusat kota dan adanya sejumlah besar lembaga pemerintahan di wilayah suburban. Frey (1979) dalam penelitiannya berpendapat suburbanisasi relatif bisa cepat terjadi di daerah metropolitan karena di pusat kota terdapat pajak yang tinggi, tingkat kejahatan yang tinggi dan rendahnya pengeluaran untuk biaya sekolah anak. Cullen and Levitt (1999) memperkirakan untuk setiap tambahan tingkat kejahatan di pusat kota akan membuat penambahan satu orang penduduk di wilayah suburban yang pindah dari pusat kota.

Penelitian Jordan, Ross dan Usowski (1998) bertujuan untuk mengukur tingkat perubahan suburbanisasi dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dalam mengukur suburbanisasi, Jordan, Ross dan Usowski menggunakan gradien kepadatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata gradien kepadatan area metropolitan di Amerika Serikat pada tahun 1970-1980 dan 1980-1990 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa suburbanisasi telah terjadi di sebagian besar area metropolitan di Amerika Serikat pada tahun 1970-1990 dimana terlihat juga adanya keberlanjutan peningkatan suburbanisasi dari tahun ke tahun. Jordan, Ross dan Usowski juga melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi suburbanisasi. Dari hasil regresi yang di peroleh, ditemukan tidak ada satu faktor yang paling baik dalam menjelaskan tingkat suburbanisasi. Namun beberapa faktor secara bersama-sama signifikan mempengaruhi tingkat suburbanisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Bayoh, Irwin dan Haab (2002) adalah untuk mengidentifikasi pentingnya karakteristik spesifik individu (natural evolution) terhadap barang publik lokal (flight from blight) dalam menentukan keputusan lokasi rumah tangga. Dengan mengidentifikasi besaran tersebut, teori mana yang lebih robust, natural evolution atau flight from blight terhadap suburbanisasi dapat diketahui. Hasil dari penelitian ini adalah rumah tangga memiliki preferensi yang tinggi akan lingkungan yang aman dan sekolah berkualitas. Tingkat kriminalitas yang tinggi di pusat kota mendorong rumah tangga keluar dari pusat kota.

Kualitas sekolah yang lebih baik di subpusat kota menjadi daya tarik bagi rumah tangga untuk pindah dari pusat kota. Dengan mengasumsikan tingkat kejahatan konstan, rumah tangga memiliki preferensi tempat dalam hal membelanjakan pengeluaran relatif untuk rekreasi. Tersedianya fasilitas rekreasi relatif lebih banyak di subpusat kota mendorong suburbanisasi rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Sridhar (2007) bermaksud untuk menghitung gradien kepadatan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi suburbanisasi penduduk, pekerjaan dan rumah tangga di aglomerasi urban Indoa tahun 1981-1991. Hasil dari penelitian yang dilakuka Sidhar adalah proporsi penduduk, rumah tangga dan pekerjaan di subpusat kota lebih besar dibandingkan di pusat kota. Penduduk yang melakukan suburbanisasi meningkat dari 20,67% (1981) ke 21,33% (1991). Rumah tangga lebih terurbanisasi dibandingkan penduduk karena rumah tangga mengkonsumsi jumlah lahan dan perumahan yang lebih besar. Demikian juga dengan pekerjaan yang lebih terurbanisasi dibandingkan penduduk. Secara rata-rata gradien kepadatan penduduk di aglomerasi urban mengalami penurunan dari 1981 ke 1991. Hal tersebut menunjukkan aglomerasi urban mengalami suburbanisasi. Begitu pula dengan rata-rata gradien kepadatan rumah tangga dan pekerjaan tidak terlalu berbeda dengan aglomerasi urban. Sektor pertambangan, penggalian dan manufaktur mengalami suburbanisasi lebih tinggi dibandingkan sektor lain.

2.1.3. Studi Terdahulu dan Penelitian Yang Dilakukan

Dari paparan penelitian tentang fenomena suburbanisasi yang dijelaskan diatas, terlihat bahwa studi-studi terdahulu dilakukan para peneliti kebanyakan bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya suburbanisasi di suatu wilayah kota metropolitan dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya suburbanisasi tersebut. Penelitian suburbanisasi dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan perubahan-perubahan pola spasial penyebaran penduduk, migrasi dan penggunaan lahan. Penelitian tersebut dilakukan di berbagai kota metropolitan dunia dimana masing-masing kota

dengan karakteristik wilayah yang beragam ditemukan adanya faktor-faktor pendorong terjadinya suburbanisasi yang hampir sama.

Makalah ini mencoba membahas fenomena suburbanisasi lebih jauh lagi setelah fase penentuan terjadinya suburbanisasi dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu bagaimana dampak suburbanisasi tersebut terhadap perekonomian suatu wilayah. Penelitian ini mencoba melihat keterkaitan antara proses suburbanisasi di daerah suburban dengan pertumbuhan ekonomi regional wilayah tersebut. Dampak ekonomi dari terjadinya proses suburbanisasi di suatu wilayah yang ingin diketahui dan menjadi penekanan dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan identifikasi konsep dan teori suburbanisasi melalui riset literatur serta menganalisa hasil beberapa penelitian terdahulu dan dalam rangka mengetahui dampak fenomena suburbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah beberapa faktor yang ditentukan oleh peneliti sebagai variabel yang turut mempengaruhi terjadinya suburbanisasi adalah populasi suburban, tenaga kerja dan investasi. Bagian berikut ini akan menguraikan dan menjelaskan pengertian, konsep dan teori sehubungan dengan variabel suburbanisasi tersebut dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi wilayah.

2.2. Populasi Suburban

Penduduk adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang tinggal menetap disuatu wilayah geografis paling sedikit enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Populasi adalah jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu wilayah administrasi (BPS). Populasi dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui tingkat perkembangan suatu wilayah. Apabila jumlah populasi suatu wilayah dari waktu ke waktu semakin meningkat maka dapat dikatakan bahwa wilayah tersebut memiliki daya tarik yang tinggi bagi para pendatang dari luar sehingga mereka bersedia tinggal menetap di wilayah tersebut. Wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk tinggi kemungkinan telah berubah menjadi wilayah yang bersifat urban.

Dari hasil penelitian tentang fenomena suburbanisasi terdahulu, disebutkan bahwa penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya suburbanisasi. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya suburbanisasi penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari pusat kota ke subpusat kota (wilayah suburban). Penduduk yang pindah ini kemudian membentuk populasi suburban, yaitu komunitas atau jumlah penduduk yang tinggal menetap di wilayah suburban. Migrasi penduduk dari pusat kota ke subpusat kota dengan tujuan untuk tinggal menetap di wilayah suburban dalam periode waktu panjang telah mengakibatkan peningkatan jumlah populasi suburban. Peningkatan populasi di wilayah suburban menunjukkan adanya proses suburbanisasi yang terus terjadi.

Hasil penelitian Sitorus, Rustiadi dan Ardiansyah (2000) menyebutkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah Jabotabek mempunyai dampak dalam proses suburbanisasi, yaitu dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di pinggiran Jakarta secara signifikan. Namun hal ini telah membuat jumlah penduduk di pusat kota Jakarta menjadi menurun. Konsekuensi dari fenomena ini adalah telah terjadi konversi lahan di daerah pinggiran kota. Dalam penelitian ini pola spasial dari penggunaan lahan kota dan kepadatan penduduk dikarenakan adanya suburbanisasi dinilai secara empiris dengan mengasumsikan Monas sebagai pusat Jabotabek. Dari data antara tahun 1992 sampai 2000 terjadi pola penurunan kepadatan penduduk yang terlihat sampai sejauh 10 km dari Monas. Namun terjadi peningkatan rasio pada lahan perkotaan. Sementara itu kepadatan penduduk dan rasio kota menunjukkan pola meningkat mulai dari jarak 10 km sampai 45 km. Orang-orang bermigrasi ke daerah pinggiran dimana proses suburbanisasi sangat mempengaruhi pengembangan lahan perkotaan.

Laju pertumbuhan jumlah penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk per luas wilayah. Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah dimana mereka tinggal. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah jiwa/luas daerah, misalkan kepadatan penduduk suatu wilayah

diketahui 100 jiwa/Km². Kepadatan penduduk merupakan para meter yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan populasi di wilayah suburban.

Pertumbuhan populasi suburban yang terus meningkat dari waktu ke waktu karena adanya suburbanisasi penduduk, salah satu faktor pendorongnya adalah karena harga rumah di wilayah suburban relatif lebih murah dibandingkan harga rumah di pusat kota. Hal ini didukung pula dengan tersedianya akses jalan dari pusat kota ke perumahan tersebut dimana dengan menggunakan kendaraan pribadi orang bisa menemukan pemukiman dan menentukan perumahan mana yang diminati dan mampu untuk dibelinya.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di pusat kota jika tidak dikendalikan dan diakomodir kebutuhannya akan membawa berbagai persoalan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan berbagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup seluruh penduduk kota akan menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat. Kebutuhan dan penggunaan sumber daya ruang kota akan terus meningkat secara simultan. Berapa contoh meningkatnya kebutuhan ruang perkotaan dapat disebutkan, antara lain dengan meningkatnya kebutuhan fasilitas perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, infrastruktur dan jaringan jalan. Implikasi dari peningkatan kebutuhan perumahan, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial infrastruktur dan jaringan jalan adalah meningkatnya permintaan lahan. Permasalahannya, penyediaan lahan semakin langka dan semakin mahalnya harga lahan di pusat kota, akibatnya sebagian penduduk perkotaan tersebut cenderung untuk memilih pindah dan bertempat tinggal dipinggiran kota (wilayah suburban).

2.2.1. Mobilitas Penduduk Suburban

Pengertian mobilitas yang berkaitan dengan pindah tempat tinggal (migrate) berbeda dengan pengertian mobilitas yang berkaitan dengan gerak (move). Dalam hal ini terdapat dua kategori, yaitu mobilitas pemanen dan mobilitas non permanen. Menurut Mantra dan Sunarto (1988) perbedaan mobilitas pemanen dan

mobilitas non permanen terletak pada ada atau tidaknya niat untuk bertempat tinggal menetap di daerah tujuan. Mobilitas permanen bertujuan pindah tempat tinggal secara tetap dan mobilitas non permanen tidak mempunyai tujuan pindah tetapi memiliki tempat aktivitas yang berbeda dengan tempat tinggalnya.

Pola mobilitas penduduk di Indonesia telah diwarnai pergeseran dari mobilitas permanen (migrasi) menuju mobilitas non permanen baik mobilitas sirkuler maupun komuter. Disebut mobilitas sirkuler bila penduduk yang melakukan perpindahan sejak semula sudah bermaksud untuk kembali ke daerah asalnya (Gould dan Prothero, 1975). Sedangkan komuter adalah pergerakan yang dilakukan dalam waktu satu hari dengan melintasi batas wilayah dan kembali ketempat asal (Mantra, 1981).

Salah satu bentuk mobilitas non permanen yang mengalami pertumbuhan adalah komuter dimana keberadaannya semakin menonjol terutama pada kota-kota besar dan sekitarnya. Karena sifatnya yang non permanen maka keberadaan komuter tidak mempengaruhi jumlah penduduk secara administratif namun mempengaruhi penggunaan keberadaan fasilitas-fasilitas umum dan sosial pada daerah tujuan. Pada daerah yang menjadi tujuan komuter timbul istilah penduduk siang dan penduduk malam. Penduduk siang dipengaruhi oleh komuter yang datang pada pagi hari atau siang hari untuk bekerja, sekolah atau lainnya dan diwaktu sore atau malam komuter kembali ke daerah tempat tinggalnya.

Di Indonesia konsep migrasi atau mobilitas permanen menggunakan konsep internal migration sebagaimana disarankan oleh United Nation, yaitu mobilitas yang berkaitan dengan pindah tempat tinggal. Dalam konsep ini, migrasi memiliki penekanan pada dua unsur pokok, yaitu permanenitas (adanya dimensi waktu) dan unit geografi (adanya batas daerah). Dimensi waktu digunakan periode enam bulan dan batas geografi didasarkan pada batas wilayah administratif kabupaten/kota dan batas provinsi (BPS, Supas 2005).

Menurut Shryock dan Siegel (1971) migrasi adalah suatu bentuk pergerakan penduduk secara geografi atau mobilitas keruangan yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanen antar unit-unit geografi tertentu disebut migrasi. Migrasi dapat dikatakan bertujuan untuk pindah tempat tinggal secara tetap. Menurut White (1986), mobilitas penduduk merupakan keputusan individu maupun rumah tangga dalam menentukan lokasi tempat kerja dan tempat tinggalnya. Rumah tangga akan menentukan lokasi tempat tinggal dan tempat kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Begitupun secara individu, pekerja akan menetapkan lokasi kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan memperhatikan gradiasi upah dan gradiasi harga pasar perumahan.

Menurut Arsyad (2010:350), migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah tertentu ke daerah lainnya. Migrasi ini dipengaruhi oleh banyak faktor dan kompleks. Oleh karena migrasi merupakan suatu proses memilih (selective proses) yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik-karakteristik ekonomi, sosial, pendidikan dan demografis tertentu, maka pengaruh-pengaruh ekonomis dan non-ekonomis tersebut dapat berbeda-beda tidak hanya antar negara dan wilayah namun juga di dalam daerah geografis dan penduduk tertentu. Banyak penelitian awal tentang migrasi cenderung difokuskan kepada faktor-faktor sosial, budaya dan psikologis saja, namun tidak memperhatikan arti penting dari variabel-variabel ekonomi. Migrasi penduduk terjadi terutama disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor ekonomi.

E.G. Ravenstein (1883) dalam Todaro (1969) berpandangan bahwa migrasi (proses mobilitas penduduk) terjadi secara spasial dan relatif permanen, namun ada pula kecenderungan pola migrasi non permanen, yaitu komuter. Komuter didefinisikan sebagai penduduk yang biasanya (secara rutin) melakukan perjalanan pergi dan pulang melintasi batas kabupaten atau kota dalam kurun waktu sehari. Dalam situasi ekonomi yang terus berkembang dan disertai dengan meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang semakin membaik, arus mobilitas penduduk cenderung menunjukkan gerak yang sifatnya berulang-ulang. Mobilitas ini banyak terjadi antara daerah kota yang pekerja-pekerjanya berulang-alik dari tempat

tinggal ke tempat kerjanya (biasanya pagi berangkat ke tempat kerja dan sore kembali ke rumah) yang dilakukan secara terus-menerus.

Masalah komuter berkaitan dengan adanya ketidakcocokan antara tempat tinggal dan tempat kerja. Berdasarkan daerah tempat tinggalnya, Hugo (1981) membedakan komuter menjadi dua kelompok, yaitu *Autochthonous Commuters* dan *Allochthonous Commuters*. Kelompok *Autochthonous Commuters* adalah penduduk asli luar kota yang melakukan komutasi ke kota untuk bekerja disebabkan oleh faktor ekonomi juga di dorong oleh faktor budaya. Disatu pihak mereka enggan tinggal jauh dari lingkungan keluarga dan sanak famili, dilain pihak mereka membutuhkan kota untuk mencari nafkah dan penghasilan yang lebih baik. Dengan adanya transportasi yang makin lancar mereka cenderung untuk tetap tinggal menetap di desa dan tiap hari pergi ke daerah tujuan untuk bekerja.

Allochthonous Commuters adalah penduduk yang sebelumnya tinggal di kota namun karena alasan-alasan tertentu pindah dan menetap diluar kota, namun tetap bekerja dengan jalan melakukan komuter. *Allochthonous Commuters* merupakan bagian dari proses suburbanisasi dimana terjadi perpindahan penduduk dari pusat kota ke pinggiran atau luar kota dengan tujuan untuk mendapatkan perumahan yang cukup baik dengan biaya yang relatif murah, lingkungan bersih dan sehat.

Fenomena *commuting* (melaju) yang sangat besar dapat dijadikan sebagai salah satu indikator pelengkap yang menunjukkan telah terjadinya proses suburbanisasi penduduk. Orientasi *commuting* umumnya memiliki dua kelompok tujuan utama, yaitu bekerja dan belajar/sekolah. Berdasarkan penelitian fenomena *commuting* yang dilakukan oleh Rustiadi et al. (1999), diketahui bahwa telah terjadi proses suburbanisasi di Jakarta dimana sebagian urbanit berpindah ke pinggiran kota Jakarta, terutama ke wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Kondisi ini dapat ditunjukkan dalam penjelasan Tabel 2.1. di bawah ini yang memperlihatkan tabulasi silang antara tempat tinggal dan tempat kerja penduduk kota Jakarta dan sekitarnya:

Tabel 2.1. Prosentase Tempat Tinggal dan Tempat Kerja (1991)

Tempat Tinggal	Tempat Kerja					Total
	DKI	Bogor	Tangerang	Bekasi	Luar Botabek	
DKI	95.96	0.97	2.00	0.50	0.57	100.00
Bogor	47.82	50.38	0.51	1.02	0.27	100.00
Tangerang	55.46	0.53	43.47	0.27	0.27	100.00
Bekasi	59.83	0.58	0.87	37.85	0.87	100.00
Luar Botabek	54.13	18.13	15.08	12.21	0.45	100.00

Sumber: Makalah Suburbanisasi Kota Jakarta, Penelitian Fenomena Commuting, Rustiadi et al.

Data pada tabel ini mengindikasikan telah terjadi proses suburbanisasi di Jakarta dimana sebagian urbanit berpindah tempat tinggal ke pinggiran kota Jakarta, terutama Bekasi, Tangerang dan Bogor. Urbanit yang berpindah dari Jakarta ke Bekasi, Tangerang dan Bogor tersebut tetap bekerja di Jakarta namun tinggal di berbagai wilayah di Bekasi, Tangerang dan Bogor. Data tabel diatas menunjukkan bahwa 59,83% penduduk bertempat tinggal di Bekasi namun bekerja di DKI Jakarta, 55,46% penduduk bertempat tinggal di Tangerang namun kerjanya di DKI Jakarta dan 47,82% penduduk bertempat tinggal di Bogor namun bekerja di DKI Jakarta. Rata-rata penduduk sekitar Bekasi, Tangerang dan Bogor yang bekerja di Jakarta mencapai lebih dari 50%, kecuali Bogor.

Mobilitas non permanen merupakan keputusan individu maupun rumah tangga dalam menentukan lokasi tempat kerja dan tempat tinggalnya. Rumah tangga menentukan lokasi tempat tinggal dan tempat kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya. Begitu pun secara individu, pekerja akan menetapkan lokasi kerjanya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya dengan memperhatikan gradiasi upah dan gradiasi harga pasar perumahan (White, 1986).

2.2.2. Populasi dan PDRB

Penduduk merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Faktor penduduk secara kuantitas dan kualitas turut menentukan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang potensial bagi pemasaran hasil-hasil produksi. Sementara kualitas penduduk menentukan besarnya produktivitas yang dihasilkan oleh

berbagai sektor perekonomian. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan menyebabkan peningkatan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa dalam kegiatan transaksi ekonomi. Kegiatan ekonomi yang meningkat secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah.

Menurut Sukirno (1981:332) salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertambahan dari pendapatan nasional atau PDRB adalah jumlah dan mutu dari penduduk. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Peningkatan produksi di berbagai sektor perekonomian secara langsung akan mempengaruhi PDRB. Penduduk bukan saja merupakan faktor produksi, akan tetapi yang lebih penting lagi penduduk merupakan aktor yang menciptakan dan mengembangkan teknologi serta mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Pengusaha adalah bagian dari penduduk, para pengusaha memegang peranan yang sangat penting di dalam menentukan luasnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Apabila tersedianya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu adalah lebih banyak, maka lebih banyak kegiatan ekonomi akan dijalankan.

Menurut Todaro dan Smith (2006:119) salah satu komponen pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk, dan yang pada akhirnya dihubungkan dengan kenaikan angkatan kerja, secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang lebih besar, berarti tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif dan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik. Kondisi jumlah penduduk yang semakin besar akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat dimana total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi (PDRB) akan lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan semakin luasnya pasar domestik maka akan semakin banyak tenaga produktif yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan agregat, kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan

masyarakat yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan PDRB. Hal ini tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan secara produktif tambahan tenaga kerja tersebut.

Menurut Tarigan (2009:185), penduduk adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Jumlah penduduk adalah faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah. Jumlah penduduk dapat dilihat sebagai faktor produksi yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan sehingga dapat dicapai suatu nilai tambah (kemakmuran) yang maksimal bagi wilayah tersebut. Analisis komposisi penduduk dalam bentuk umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan/pendapatan, tingkat pendidikan dan jenis perumahan yang dimiliki akan memberi implikasi yang lebih rinci baik terhadap tingkat kebutuhan maupun terhadap kegiatan produksi yang disumbangkan.

Dalam literatur tradisional, pada umumnya penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan ekonomi, apalagi dalam jumlah besar dan dengan pertumbuhan yang tinggi, penduduk dinilai hanya menambah beban pembangunan. Dikatakan, jumlah penduduk yang besar memperkecil pendapatan perkapita dan menimbulkan masalah ketenagakerjaan. Dalam literatur modern, penduduk justru dipandang sebagai pemacu pembangunan ekonomi, berlangsungnya kegiatan produksi adalah berkat adanya orang-orang yang membeli dan mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang menimbulkan permintaan agregat pada akhirnya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha-usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan. Jadi perkembangan ekonomi turut ditentukan oleh permintaan yang datang dari penduduk atau populasi (Dumairy, 1996:68).

Analisa Keynes menunjukkan pentingnya peranan dari pengeluaran keatas barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Keynes memusatkan pembahasan pada aspek permintaan, yaitu

menganalisa mengenai peranan dari permintaan berbagai golongan masyarakat di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh suatu perekonomian. Tingkat kegiatan perekonomian ditentukan oleh besarnya pengeluaran agregat yang wujud dalam perekonomian. Analisa Keynes berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk membayar barang-barang dan jasa-jasa yang diminta tersebut, yang wujud dalam perekonomian. Bertambah besar permintaan efektif yang wujud dalam perekonomian, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi dan penggunaan faktor-faktor produksi (Sukirno, 1981:103).

Penduduk adalah faktor krusial dalam pembangunan ekonomi. Ada yang menganggap penduduk sebagai pendorong dan sebaliknya ada pula yang menganggap penduduk sebagai penghambat ekonomi, namun jumlah penduduk dalam suatu wilayah setiap tahunnya bertambah, dengan sendirinya kebutuhan akan konsumsi sehari-hari akan bertambah setiap tahunnya. Selain dari sisi konsumsi, dari sisi penawaran pertumbuhan penduduk juga membutuhkan kesempatan kerja dimana tujuan pembangunan ekonomi adalah peningkatan standar hidup penduduk suatu negara yang biasanya diukur dengan penghasilan riil perkapita. Jika kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja bisa terpenuhi, selanjutnya akan tercapai suatu peningkatan output agregat barang dan jasa atau PDRB secara terus-menerus, dimana pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan riil perkapita (Tambunan, 2003:41)

Argumentasi konvensional dari para ahli ekonomi pembangunan tentang perlunya pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi, menurut penjelasan Todaro dan Smith (2006:345) dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk bukanlah merupakan suatu masalah, melainkan justru merupakan unsur penting dalam pembangunan ekonomi. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan

skala ekonomis (economies scale) dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya-biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan merangsang tingkat output atau produksi agregat (PDRB) yang lebih tinggi lagi.

Menurut Sukirno (1981:333) dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) bersumber dari akibat penambahan luas pasar. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu ekonomi tergantung kepada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Maka apabila penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Karena peranannya ini maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada penambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi. Menurut Swastha dan Irawan (2003:90), salah satu dasar yang dapat dipakai untuk segmentasi pasar berdasarkan faktor demografi adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menggambarkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran besarnya potensi pasar untuk konsumsi barang dan jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan.

Mankiw (2003:193,195) menuliskan, untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, model Solow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian (PDRB) serta pertumbuhan sepanjang waktu. Pertumbuhan populasi membedakan model Solow dalam tiga cara, yaitu:

1. Pertumbuhan populasi menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi, modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun demikian, karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat tertentu, maka modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat tertentu. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan (karena output per pekerja adalah konstan dalam kondisi

mapan), pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan.

2. Dampak dari kenaikan tingkat pertumbuhan populasi mengurangi tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan. Karena tingkat modal per pekerja lebih rendah maka tingkat output per kapita juga lebih rendah. Model Solow memprediksi bahwa negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi akan memiliki tingkat PDB per kapita yang lebih rendah.
3. Pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria untuk menentukan tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan. Dalam kondisi mapan, tingkat modal, produk marjinal modal setelah terdepresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan populasi.

2.3. Tenaga Kerja

Dari berbagai hasil penelitian tentang fenomena suburbanisasi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suburbanisasi. Terciptanya berbagai lapangan pekerjaan di wilayah suburban berdampak pada tumbuh dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di wilayah suburban. Kondisi ini mendorong terjadinya suburbanisasi tenaga kerja ke wilayah suburban. Tenaga kerja yang datang dan bekerja akan mencari tempat tinggal yang dekat dengan lokasi pekerjaannya di wilayah suburban. Peningkatan tenaga kerja di wilayah suburban menunjukkan proses suburbanisasi yang terus terjadi.

Pada kota modern, pekerjaan tidak lagi hanya terpusat di pusat kota melainkan telah menjadi tersebar di area metropolitan, yaitu di pusat kota, subpusat kota dan area lain dalam wilayah metropolitan. Tersebarnya pekerjaan di area metropolitan mendorong penduduk melakukan suburbanisasi. Suburbanisasi penduduk dapat menunjukkan adanya peningkatan tenaga kerja di subpusat kota. Kondisi ini kemudian menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk berlokasi di subpusat kota. Dengan pola yang sama, suburbanisasi perusahaan kemudian menjadi daya tarik bagi tenaga kerja untuk datang dan berlokasi di subpusat kota. Secara umum

terlihat bahwa penduduk lebih terdesentralisasi dibandingkan pekerjaan. Daya tarik-menarik secara bersamaan antara perusahaan dan tenaga kerja dapat diartikan bahwa suburbanisasi penduduk mendorong terjadinya suburbanisasi perusahaan sementara suburbanisasi perusahaan mendorong terjadinya suburbanisasi tenaga kerja.

Menurut konsep dan definisi Labor Force Approach yang diperkenalkan oleh International Labor Organization (ILO) yang juga telah dibakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 1976, penduduk dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas (kalau menurut versi Bank Dunia batas usia kerja adalah antara 15 hingga 64 tahun). Penduduk usia kerja terbagi atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan atau penduduk yang termasuk dalam pengangguran. Angkatan kerja dibedakan dalam dua kelompok, yaitu bekerja dan pengangguran. Bekerja adalah penduduk yang melakukan kegiatan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu. Bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja atau penduduk yang sementara tidak bekerja. Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu mereka yang mempunyai kegiatan bersekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya (pensiun, cacat, tidak mampu berkerja, dsb.)

Menurut Sukirno (1981:4) tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor-faktor produksi. Pengertian tenaga kerja merupakan jumlah penduduk yang dapat digunakan dalam proses produksi dengan kemahiran-kemahiran yang mereka

miliki. Oleh sebab itu tenaga kerja bukan saja diartikan sebagai besarnya tenaga jasmani yang dapat digunakan dalam proses produksi, tetapi juga meliputi kemampuan tenaga kerja yang ada untuk berfikir dan bekerja. Melihat kesanggupan untuk bekerja dan berfikir, tenaga kerja yang ada dalam masyarakat dapat digolongkan tiga golongan, yaitu:

1. Tenaga Kerja Yang Tidak Terdidik

Merupakan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendidikan sehingga daya kerjanya terutama harus berasal dari tenaga jasmaninya. Golongan tenaga kerja ini adalah petani, pekerja toko, penarik becak dan yang semacam itu.

2. Tenaga Kerja Terlatih

Merupakan tenaga kerja yang telah memperoleh sedikit pendidikan dan pelatihan dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Dalam golongan ini termasuk tukang kayu, tukang besi, tukang elektris dan sebagainya.

3. Tenaga Kerja Terdidik

Merupakan tenaga kerja yang sangat tinggi pendidikannya. Golongan tenaga kerja ini, antara lain guru, dosen, pilot, berbagai jenis tenaga teknik, konsultan dan sebagainya.

2.3.1. Mobilitas Tenaga Kerja

Menurut O'Sullivan (2007:144), suburbanisasi penduduk dan pekerjaan akan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Pekerjaan akan mengikuti tenaga kerja yang bergerak ke wilayah suburban, sisi lain tenaga kerja akan mengikuti pekerjaan yang bergerak ke wilayah suburban. Dalam hal ini, perpindahan penduduk dan tenaga kerja dapat terjadi sebagai akibat dari perbedaan pola kehidupan antar wilayah yang meliputi aspek: ketersediaan lapangan kerja, gaya hidup masyarakat, budaya, agama, kondisi lingkungan dan lain-lainnya. Misalnya, terdapat tendensi masyarakat untuk pindah ke daerah dengan penyediaan lapangan kerja yang cukup banyak dan lingkungan hidup yang menyenangkan. Disamping itu ada pula tendensi bagi tenaga kerja setelah pensiun untuk pindah ke daerah asalnya untuk menikmati hari tua bersama anggota keluarga lainnya.

Menurut Sjafrizal (2008:71), salah satu model mobilitas antar wilayah yang terkait dengan tenaga kerja adalah model perpindahan penduduk dan tenaga kerja. Perpindahan penduduk dan tenaga kerja antar wilayah merupakan fenomena yang umum dialami oleh suatu wilayah. Hal ini dikenal sebagai perpindahan penduduk antar wilayah dalam suatu negara (interregional migration). Dalam analisa ekonomi migrasi, perbedaan antara model equilibrium dan model disequilibrium adalah penting. Model migrasi disequilibrium umumnya didasarkan pada asumsi bahwa terjadinya migrasi di dorong oleh keuntungan dan kerugian secara relatif yang terdapat pada masing-masing wilayah. Misalnya, wilayah dengan tingkat upah tinggi akan cenderung mendorong penduduk dan tenaga kerja untuk pindah ke wilayah ini. Sedangkan model migrasi equilibrium berpendapat bahwa migrasi juga dapat terjadi bilamana tingkat upah antar wilayah sama yang berarti berada dalam kondisi equilibrium. Kegiatan komutasi merupakan alternatif bagi pekerja yang bertempat tinggal di daerah asal tidak terlalu jauh dari daerah tujuan dimana berlaku upah di daerah asal rendah dan upah upah di daerah tujuan tinggi. Makin dekat ke daerah tujuan biaya komutasi cenderung makin kecil daripada selisih upah antara daerah asal dan daerah tujuan. Dalam hal ini jarak yang merupakan fungsi dari biaya menjadi pertimbangan pelaku dalam menentukan pola mobilitas.

Keputusan individu untuk pindah dari satu daerah ke daerah lainnya adalah sangat bervariasi tergantung pada kondisi wilayah dan karakteristik sosial dari individu bersangkutan. Secara umum faktor-faktor yang mendorong keputusan migrasi dapat dikelompokkan dalam unsur-unsur penting dari biaya dan manfaat yang diakibatkan oleh perpindahan penduduk dan tenaga kerja tersebut. Perbaikan terhadap potensi penerimaan di daerah tujuan diperkirakan merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keputusan individu untuk pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Ini berarti bahwa secara umum migrasi perpindahan penduduk dan tenaga kerja dapat dijelaskan melalui model penyamaan harga faktor produksi (factor price equalization). Pemahaman terhadap berbagai faktor tambahan yang juga dapat mempengaruhi keputusan untuk pindah tentunya akan dapat pula menambah penjelasan terhadap fenomena migrasi antar daerah dengan lebih baik (Sjafrizal, 2008:72).

2.3.2. Tenaga Kerja dan PDRB

Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor-faktor produksi, yaitu unsur penting yang menentukan tingginya tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai suatu negara. Faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia atau yang disediakan oleh alam dan dapat digunakan untuk memproduksi berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu untuk menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, kemahiran tenaga kerja akan selalu bertambah tinggi. Maka produktivitas akan bertambah, dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat dari pada pertambahan tenaga kerja. Pertambahan produksi tentunya akan mempengaruhi peningkatan PDRB suatu wilayah (Sukirno 1981:4, 333).

Mankiw (2003:42) menjelaskan bahwa output barang dan jasa suatu perekonomian (PDRB) bergantung pada jumlah input, yang disebut faktor-faktor produksi dan kemampuan untuk mengubah input menjadi output, sebagaimana yang ditunjukkan oleh fungsi produksi. Faktor-faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi yang paling penting adalah modal dan tenaga kerja. Hubungan fungsional antara output (PDRB) dengan faktor produksi modal dan tenaga kerja dinyatakan dalam fungsi produksi:

$$Y = F(K, L)$$

Dimana:

$$\begin{aligned} Y &= \text{Output (PDRB)} \\ K &= \text{Jumlah Modal} \\ L &= \text{Jumlah Tenaga Kerja} \end{aligned}$$

Persamaan ini menyatakan bahwa output (PDRB) adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi ini menunjukkan bahwa jumlah output (PDRB) yang diproduksi membutuhkan input dan bergantung pada jumlah modal dan jumlah tenaga kerja. Faktor-faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang sama dengan

output perekonomian. Nilai output perekonomian merupakan nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Diasumsikan bahwa jumlah modal dan jumlah tenaga kerja tetap, faktor-faktor produksi digunakan sepenuhnya, yaitu tidak ada sumber yang terbuang.

Menurut Todaro dan Smith (2006:119) kenaikan angkatan kerja, secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi (PDRB). Jika angkatan kerja tersedia dalam jumlah yang lebih besar, berarti tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif. Kondisi ini akan memberi dampak pada peningkatan produktivitas kerja dimana akan lebih banyak barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah. Pengaruh positif dari peningkatan tenaga kerja tergantung pada kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap dan mempekerjakan secara produktif tambahan tenaga kerja.

2.4. Investasi

Dari berbagai hasil penelitian tentang fenomena suburbanisasi seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, investasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya suburbanisasi. Dalam rangka investasi dengan mempertimbangkan biaya produksi dan margin keuntungan yang diperoleh perusahaan antara berlokasi di pusat kota dan subpusat kota, telah mendorong terjadi suburbanisasi manufaktur dari pusat kota ke subpusat kota, yaitu ke wilayah suburban.

Migrasi perusahaan dari pusat kota ke subpusat kota yang dilanjutkan dengan pembangunan pabrik-pabrik dan kantor, pembelian mesin-mesin, menambah persediaan barang perusahaan atau membangun konstruksi perumahan merupakan kegiatan investasi di wilayah suburban. Kondisi ini dalam jangka panjang berdampak pada tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru dan membentuk komunitas pabrik/ komunitas industrial berupa aglomerasi kawasan industri di wilayah suburban. Peningkatan kegiatan investasi di wilayah suburban menunjukkan proses suburbanisasi perusahaan yang terus terjadi.

Keberadaan industri di wilayah suburban akan mempengaruhi pola komutasi penduduk terutama kebijakan perusahaan dalam merekrut pekerja. Pada daerah yang terdapat kesenjangan dalam pengadaan tenaga kerja maka alasan komuter adalah untuk bekerja sedangkan pada daerah yang terdapat kesenjangan dalam ketersediaan fasilitas sosial dan umum alasan komuter adalah untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman dengan fasilitas publik baik. Daya tarik-menarik secara bersamaan antara perusahaan dan tenaga kerja mengindikasikan bahwa adanya suburbanisasi penduduk mendorong suburbanisasi perusahaan dan suburbanisasi perusahaan mendorong suburbanisasi tenaga kerja dimana suburbanisasi perusahaan dan suburbanisasi tenaga kerja memberi dampak pada kegiatan investasi di wilayah suburban.

Investasi dapat mengacu pada dua terminologi, yaitu investasi finansial dan investasi riil. Investasi finansial adalah investasi yang dilakukan dengan membeli aset finansial berupa surat-surat berharga, misalnya pembelian saham, obligasi, atau surat bukti hutang lainnya. Sedangkan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang tahan lama (barang modal) yang akan digunakan dalam proses produksi. Pengeluaran yang dilakukan adalah untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Dornbusch et al (2008:28) menjelaskan bahwa komponen investasi domestik swasta bruto, sebagai permintaan untuk output domestik (PDB) memiliki beberapa defenisi. Investasi berarti penambahan stok modal fisik. Investasi tidak termasuk pembelian obligasi atau pembelian saham. *Investasi meliputi konstruksi perumahan, pembelian mesin-mesin, pembangunan pabrik-pabrik dan kantor serta tambahan inventori barang perusahaan.* Investasi diasosiasikan dengan penambahan modal fisik pada sektor bisnis, termasuk inventori.

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:58) investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (capital stock). Stok barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian, pada satu saat

tertentu, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang. Dalam konteks ekonomi makro investasi ini merupakan investasi fisik dalam bentuk investasi barang modal dan bangunan dan investasi persediaan barang (inventory). Investasi barang modal (capital goods) dan bangunan (construction) mencakup pengeluaran-pengeluaran untuk pembelian pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan produksi dan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang baru. Karena daya tahan barang modal dan bangunan umumnya lebih dari setahun, sering kali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (fixed investment). Di Indonesia, istilah yang setara dengan fixed investment adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) . Besarnya angka PMTB ini dapat dilihat pada statistik PDRB berdasarkan pengeluaran yang dikeluarkan oleh BPS.

Menurut BPS yang mengacu pada konsepsi pendapatan nasional pada A system of National Account (UN, 1968), investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun tertentu (t) dikurangi dengan stok kapital pada tahun sebelumnya (t-1). Dengan demikian maka setiap terjadi penambahan modal dianggap sebagai investasi. Oleh karena itu, besarnya investasi pada tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto. Menurut BPS (Data Strategis BPS, 2011:79), Pembentukan Modal Tetap Bruto didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pakai satu tahun atau lebih. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dapat dibedakan atas: a) pembentukan modal dalam bentuk bangunan/konstruksi; b) pembentukan modal dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan; c) pembentukan modal dalam bentuk alat angkutan; dan d) pembentukan modal untuk barang modal lainnya.

Pengertian investasi dalam bentuk persediaan (inventori) adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang

sudah jadi maupun yang sedang dalam proses atau persediaan bahan baku dan barang setengah jadi. Tujuan persediaan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan atau keuntungan di masa mendatang (BPS).

Menurut Mankiw (2003:453) ada tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu:

1. Investasi Tetap Bisnis (Business Fixed Investment)

Mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Bagian terbesar dari pengeluaran investasi, yaitu kira-kira 3/4 dari totalnya adalah investasi tetap bisnis. Isitilah "bisnis" berarti barang-barang investasi ini dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi masa depan. Isitilah "tetap" berarti pengeluaran ini adalah untuk modal yang akan menetap untuk sementara, sebagai lawan dari investasi persediaan, yang akan digunakan atau dijual dalam waktu dekat.

2. Investasi Persediaan

Mencakup bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses, dan barang jadi. Investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang. Investasi persediaan merupakan salah satu komponen pengeluaran terkecil, rata-rata sekitar satu persen dari PDRB.

3. Investasi Residensial (Residential Investment)

Mencakup pembelian rumah baru untuk tempat tinggal pembelinya dan yang dibeli tuan tanah untuk disewakan kepada orang lain.

Menurut Dornbusch et al (2008:340) investasi adalah jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu. Investasi merupakan arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. Elemen permintaan modal dan investasi merupakan arus yang menyesuaikan tingkat stok modal. Modal adalah stok, seluruh nilai nominal dari gedung-gedung, mesin-mesin dan inventori lainnya pada suatu titik waktu tertentu. Baik PDRB dan investasi mengacu kepada arus pengeluaran. Investasi merupakan jumlah yang dibelanjakan sektor usaha untuk menambah stok modal dalam periode tertentu.

Menurut Sukirno (1981:116) investasi diartikan sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membangun industri-industri. Dalam perhitungan pendapatan nasional, investasi meliputi a) seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan perbelanjaan untuk mendirikan industri-industri; b) pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah-rumah tempat tinggal; d) penambahan dalam nilai stok barang perusahaan, misalnya berupa bahan mentah, barang yang belum selesai diproses dan barang jadi.

Kegiatan investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berdasarkan sumber dan kepemilikan modalnya, investasi dibedakan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN ialah penggunaan dari pada kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan sesuatu usaha baik secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. PMA meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

2.4.1. Mobilitas Investasi dan Faktor Produksi

Menurut Sjafrizal (2008:59) kegiatan perdagangan, mobilitas barang dan faktor-faktor produksi antar wilayah mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekonomi regional. Dalam perekonomian regional mobilitas barang dan faktor produksi dalam negeri lebih lancar dibandingkan dengan mobilitas internasional. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan perdagangan internasional dimana biasanya terdapat bea masuk (tariff) dan pembatasan impor (impor restriction), sedangkan

dalam perdagangan antar wilayah umumnya tidak ada pembatasan. Ini berarti mobilitas barang dan faktor produksi antar wilayah lebih lancar dibandingkan dengan mobilitas internasional. Dalam keadaan mobilitas sumber daya antar wilayah lancar, maka faktor produksi akan bergerak (pindah) menuju wilayah yang dapat memberikan kompensasi yang lebih tinggi.

Menurut Sukirno (1981:183, 185) para pengusaha membeli barang-barang modal bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi digunakan untuk memperoleh keuntungan. Sampai dimana besarnya keuntungan yang diharapkan akan diperoleh, maka besar sekali perannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Besarnya investasi yang dilakukan sangat bergantung kepada harapan mengenai keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Para ahli ekonomi pada umumnya sependapat bahwa investasi terutama ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang, tingkat bunga, perubahan dan perkembangan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, keuntungan yang dicapai perusahaan-perusahaan.

Dalam fenomena suburbanisasi bukan hanya individu saja yang dapat melihat adanya keuntungan lokasi dipinggiran kota, para pengusaha juga melihat ini sebagai oportunitas dan potensi dimana biaya untuk membeli lahan, menyewa ruang dan menjalankan operasi bisnisnya lebih murah dilakukan di pinggiran kota dibandingkan di pusat kota. Kondisi ini mengakibatkan kegiatan-kegiatan perindustrian, pergudangan dan pemanfaatan lahan pabrik oleh para pelaku ekonomi pindah ke daerah pinggiran kota dan membentuk apa yang dinamakan kawasan industri. Manfaat daerah suburban bagi perusahaan, dengan melihat kondisi diluar pusat kota, yaitu di daerah pinggiran kota memungkinkan mereka untuk menggunakan lahan yang lebih luas disamping bisa memenuhi permintaan karyawannya untuk bekerja di lingkungan yang lebih tenang serta memungkinkan para pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya di tanah yang murah.

Jumlah kumpulan barang modal yang terdapat pada suatu daerah tertentu pada dasarnya merupakan hasil dari berbagai keuntungan lokasi yang dapat diserap dunia usaha. Keuntungan aglomerasi yang biasanya terdapat di daerah perkotaan atau konsentrasi kegiatan ekonomi sangat mempengaruhi distribusi investasi baru antar wilayah. Karena usaha bisnis sangat tergantung dari usaha lain dan infrastruktur terkait, sebuah perusahaan biasanya sulit untuk pindah dari tempat semula dimana terdapat usaha dan fasilitas terkait yang mendukung. Bahkan bilamana keuntungan aglomerasi itu cukup besar, tetapi pengusaha masih harus hati-hati dalam mengambil keputusan pindah karena sangat besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pindah ke sebuah lokasi baru.

Keputusan dalam memilih lokasi dan pengembangan modal merupakan cara yang nyata untuk merubah modal dalam bentuk uang menjadi barang modal. Konstruksi fasilitas pada suatu wilayah dapat pula mempengaruhi nilai fasilitas yang berlokasi di wilayah lainnya walaupun tidak banyak fasilitas yang digunakan berasal dari luar. Dalam hal ini, investor dapat menggunakan tenaga lokal untuk melakukan kegiatan konstruksi fasilitas atau pabrik tersebut. Dalam hal ini peningkatan investasi menggunakan dana dari wilayah lain akan meningkatkan barang modal (*capital stock*) pada suatu wilayah tertentu walaupun tidak ada barang modal yang didatangkan dari wilayah lainnya atau luar negeri. Secara teoritis, modal dapat berpindah dari suatu wilayah ke wilayah lain secara lancar bilamana para investor mempunyai informasi yang cukup dan perbedaan pengembalian investasi antar daerah adalah sama.

Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas sosial-ekonomi sangat menentukan pemilihan lokasi investasi baru. Sulit bagi seorang investor untuk melakukan investasi pada suatu daerah bilamana infrastruktur dan fasilitas sosial-ekonomi yang terdapat di daerah tersebut belum memadai. Dalam hal ini *sunk cost* menjadi tidak relevan, karena biasanya investor mengambil keputusan berdasarkan *Marginal Cost* dan *Marginal Benefit*. Biasanya *Marginal Cost* dari pabrik yang telah didirikan akan lebih rendah dibandingkan dengan mendirikan baru lokasi lain. Sungguhpun kenyataan masa lalu menunjukkan bahwa pemindahan lokasi

usaha akan menimbulkan biaya yang cukup besar, namun demikian hal ini tidak akan menghambat keinginan seorang pengusaha untuk pindah ke lokasi baru dimana terdapat tingkat pengembalian modal yang lebih besar.

Menurut Sukirno (1981:105), penanaman modal oleh para pengusaha ditentukan oleh dua faktor, yaitu efisiensi marginal modal dan tingkat bunga. Efisiensi marginal modal adalah tingkat pendapatan atau hasil minimal yang akan diperoleh dari suatu kegiatan investasi yang dilakukan dalam perekonomian. Apakah seorang pengusaha akan menanam modal atau membatalkannya tergantung kepada sifat hubungan diantara efisiensi atau tingkat pendapatan minimal dari penanaman modal yang akan dilakukannya dengan tingkat bunga. Sekiranya tingkat bunga lebih tinggi dari pada efisiensi marginal dari investasi itu, maka pengusaha itu akan membatalkan rencananya untuk menanam modal. Pengusaha baru akan menanam modal apabila hasil investasinya lebih tinggi dari tingkat bunga. Dalam perekonomian, besarnya jumlah investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha tergantung kepada besarnya nilai penanaman modal yang akan mempunyai tingkat pendapatan lebih besar dari pada tingkat bunga.

Di daerah suburban dengan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai akan menjadi daya tarik bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan investasi. Berada dipinggiran kota dapat mengurangi biaya operasional perusahaan, daerah perkotaan yang selalu mengalami kemacetan lalu lintas telah menciptakan biaya tambahan dalam biaya transportasi bagi perusahaan yang mana hal ini dapat dikurangi jika mereka berada di daerah pinggiran dekat jalan raya. Fasilitas telekomunikasi yang murah mendukung perusahaan dalam melakukan operasional bisnisnya dari pinggiran kota. Perumahan, pajak properti lebih rendah dan harga tanah yang murah mendorong para pengusaha melakukan investasi lahan dan kegiatan industri untuk keuntungan perusahaan dan pembangunan wilayah. Daerah suburban menawarkan lebih banyak luas tanah, menawarkan keringanan pajak, zonasi khusus dan insentif peraturan yang dapat menarik pengguna lahan industri, seperti yang terdapat pada kawasan industri.

2.4.2. Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Investasi

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi terutama yang berkaitan dengan investasi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah suatu ukuran yang menunjukkan besarnya tambahan investasi baru yang diperlukan untuk meningkatkan output sebesar satu unit. ICOR dapat merefleksikan besarnya produktivitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. ICOR bermanfaat untuk memperkirakan kebutuhan dana, baik untuk perencanaan PDRB secara menyeluruh maupun sektoral. Secara teoritis hubungan ICOR dengan pertumbuhan ekonomi dikembangkan oleh R. F. Harrod dan Evsey Domar (1939 dan 1947). Namun karena kedua teori tersebut banyak kesamaannya, maka kemudian teori tersebut lebih dikenal sebagai Teori Harrod-Domar.

ICOR atau rasio kenaikan output akibat kenaikan kapital merupakan indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja investasi di suatu negara. Kegunaan lainnya adalah untuk menghitung besarnya investasi yang dibutuhkan agar perekonomian tumbuh dengan laju yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya teori tentang ICOR dilandasi oleh dua macam konsep Rasio Modal-Output, yaitu:

1. Rasio Modal-Output atau Capital Output Ratio (COR) atau yang sering disebut sebagai Average Capital Output Ratio (ACOR), yaitu perbandingan antara kapital yang digunakan dengan output yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. COR atau ACOR ini bersifat statis karena hanya menunjukkan besaran yang menggambarkan perbandingan modal dan output.
2. Rasio Modal-Output Marginal atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yaitu suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan

tambahan output. Konsep ICOR ini lebih bersifat dinamis karena menunjukkan perubahan kenaikan/ penambahan output sebagai akibat langsung dari penambahan kapital. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Dari pengertian diatas, ICOR secara konsep diformulasikan berikut:

$$\text{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Y} \quad (1)$$

dimana:

$$\begin{aligned} \text{ICOR} &= \text{Incremental Capital Ouput Ratio} \\ \Delta K &= \text{Perubahan nilai kapital} \\ \Delta Y &= \text{Perubahan nilai output} \end{aligned}$$

Dari persamaan rumus (1) didapatkan pengertian bahwa ICOR merupakan besarnya penambahan stok kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan output satu unit.

Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan barang modal baru atau perubahan stok kapital melainkan Investasi (I) yang ditanam baik oleh swasta maupun pemerintah. sehingga rumus ICOR dimodifikasi menjadi:

$$\text{ICOR} = \frac{I}{\Delta Y} \quad (2)$$

dimana:

$$\begin{aligned} \text{ICOR} &= \text{Angka yang menunjukkan besarnya tambahan} \\ &\quad \text{Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan satu} \\ &\quad \text{unit Output pada tahun } t \\ I &= \text{Besarnya Investasi pada tahun } t \\ \Delta Y &= \text{Besarnya tambahan Output (PDRB) pada tahun } t \end{aligned}$$

Persamaan rumus (2) dapat diartikan sebagai, banyaknya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit output. Sebagai contoh, misalnya besarnya Investasi pada suatu tahun di negara A adalah sebesar Rp 360 miliar,

sedangkan tambahan Output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah sebesar Rp 90 miliar, maka nilai ICOR negara A adalah sebesar 4 (360 miliar / 90 miliar). Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit Output (PDRB) dibutuhkan investasi sebesar 4 unit. Angka ICOR bervariasi dari suatu negara ke negara lainnya, hal ini bergantung pada tingkat efisiensi ekonomi suatu negara. Semakin tinggi angka ICOR, semakin tidak efisien kegiatan produksi di negara tersebut, demikian sebaliknya.

Pada kenyataannya pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan tidak berubah (*ceteris paribus*).

2.4.3. Investasi dan PDRB

Roy Harrod menulis buku *Towards a Dynamic Economics* (1948) dan E. Domar menulis buku *Essays in the Theory of Economic Growth* (1957). Sir Roy Harrod dari Inggris dan Prof. E. Domar dari Amerika mencetuskan konsep pertumbuhan berimbang (eksponensial). Teori tersebut mencakup penjelasan tentang tingkat pertumbuhan alamiah jangka panjang, yaitu makin bertambah besarnya kapasitas produksi akibat makin luasnya investasi. Analisis Harrod-Domar memberikan peranan penting kepada akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, tetapi mereka menekankan bahwa akumulasi modal itu mempunyai peran ganda, di satu pihak investasi menghasilkan pendapatan dan di lain pihak investasi akan menambah kapasitas produksi perekonomian (Adisasmita, 2008: 31).

Menurut Dornbusch et al. (2008:362), investasi merupakan komponen penting permintaan agregat dan dalam jangka panjang, investasi penting bagi penawaran agregat. Investasi juga meningkatkan modal dan meningkatkan kapasitas produksi perekonomian. Menstimulus atau menaikkan investasi bisa merupakan salah satu

perangkat paling penting untuk menciptakan kemakmuran jangka panjang. Dampak dari kenaikan tahunan yang moderat dalam stok modal dapat bertambah besar dalam periode panjang. Hal ini terbukti dengan melihat amat tingginya tingkat investasi ketika negara bergerak kedalam pembangunan modern dengan tingkat pertumbuhan tinggi yang berkesinambungan dalam periode panjang. Salah satu alasan tercapainya negara-negara dengan pertumbuhan tinggi adalah karena mereka mencurahkan bagian substansial dari output mereka ke dalam investasi. Ini dapat dilihat dari rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (gross fixed capital formation) terhadap PDB di negara-negara tersebut. Rasio investasi ditentukan baik oleh permintaan modal maupun oleh penawaran tabungan.

Menurut Sukirno (1981:183), investasi, yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (capital goods) digunakan dalam proses produksi, yang secara agregat akan membentuk pendapatan nasional atau regional (PDRB). Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat untuk terus-menerus meningkatkan kegiatan ekonomi, membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan kemakmuran masyarakat. Hal ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Menurut Adisasmita (2008: 32), model pertumbuhan Harrod-Domar dapat dipakai untuk menganalisis pertumbuhan wilayah dengan memperhitungkan perpindahan modal dan tenaga kerja antar wilayah. Pertumbuhan yang mantap (steady growth) harus memenuhi syarat-syarat keseimbangan, yaitu adanya kesamaan antara tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan modal dan tingkat pertumbuhan

angkatan kerja. Jika tingkat pertumbuhan wilayah pada mulanya berbeda-beda maka divergensi tersebut cenderung bertambah tajam.

Pertumbuhan wilayah-wilayah akan makin pesat apabila hasrat tabungan makin besar dan apabila rasio modal output makin rendah. Wilayah-wilayah yang mempunyai surplus import modal (sebagai tambahan terhadap tabungan total) diharapkan dapat bertumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah lain, demikian pula wilayah-wilayah yang melakukan imigrasi netto tenaga kerja. Jadi wilayah-wilayah yang tidak memiliki tingkat tabungan yang sangat tinggi dan tingkat pertumbuhan alamiah yang tinggi, menurut model Harrod-Domar, agar dapat mampu melakukan pertumbuhan yang cepat maka wilayah-wilayah tersebut akan cenderung mendatangkan modal dan tenaga kerja dari wilayah-wilayah lain.

Dalam Sukirno (1981:339) Teori Harrod-Domar menunjukkan bahwa investasi mempunyai peranan ganda dalam perekonomian. Di satu pihak investasi merupakan sebahagian dari pengeluaran agregat, dalam hal ini investasi adalah sejenis pengeluaran yang akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi negara. Di lain pihak, investasi akan menambah jumlah barang-barang modal di dalam masyarakat. Dengan demikian investasi akan mempertinggi kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang-barang.

Tujuan dari analisa Harrod-Domar adalah untuk menerangkan syarat yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang mantap, yaitu pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin agar dari tahun ke tahun perekonomian menggunakan barang-barang modalnya (termasuk yang bertambah dari tahun ke tahun) secara penuh dan tidak menganggur. Teori Harrod-Domar melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan peningkatan output (PDRB). Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung.

Dornbusch et al (2008:339) mengatakan bahwa investasi berpengaruh besar pada siklus bisnis. Pengeluaran investasi amat berfluktuasi dan oleh karenanya berperan luas pada gejolak PDRB yang besar akibat siklus bisnis. Di sisi penawaran, investasi dalam jangka panjang menentukan jumlah stok modal dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengeluaran investasi merupakan penghubung utama bagaimana suku bunga kemudian kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Investasi merupakan unsur PDRB yang paling sering berubah. Ketika pengeluaran atas barang dan jasa turun selama resesi, sebagian besar dari penurunan itu berkaitan dengan anjloknya pengeluaran investasi. Para ekonom mempelajari investasi untuk memahami fluktuasi dalam output barang dan jasa perekonomian dengan baik. Ditingkat perusahaan, syarat untuk memelihara keuntungan adalah dengan menjaga agar tingkat produksi tidak berkurang. Untuk itu stok barang modal tidak boleh berkurang. Dilihat dari sisi ini, investasi merupakan upaya memelihara stok barang modal (capital stock adjustment process).

Sehubungan dengan komponen dari permintaan agregat dan faktor-faktor yang menentukan besarnya komponen permintaan agregat, analisa Keynes membagi permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Apabila dalam suatu perekonomian kecondongan mengkonsumsi adalah rendah, maka keadaan tersebut akan menyebabkan gap diantara produksi nasional pada penggunaan tenaga penuh dengan pengeluaran konsumsi menjadi bertambah lebar. Gap yang lebih lebar ini menyulitkan suatu perekonomian untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Agar penggunaan tenaga penuh dapat dicapai perlulah para penguasaha menaikkan jumlah investasi yang akan dilakukannya, yaitu mereka harus dapat menginvestasi sebanyak nilai gap diantara produksi nasional pada penggunaan tenaga penuh dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada penggunaan tenaga penuh. Apabila investasi tidak dapat mencapai tingkat tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Kynes pada umumnya, pengangguran akan berlaku. Ahli-ahli ekonomi berkeyakinan bahwa investasi merupakan komponen dari pengeluaran agregat yang terutama bertanggung-jawab

keatas kondisi gerak naik-turun yang besar dalam tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun. Perubahan dalam investasi merupakan faktor yang paling penting yang menimbulkan gelombang perusahaan (Sukirno, 1981:104).

Bertambah besarnya kapasitas produksi berarti mempunyai kemampuan menghasilkan keluaran dengan tingkat biaya produksi yang lebih rendah, tetapi di lain pihak mungkin pula menimbulkan pengangguran yang lebih besar pada faktor produksi tergantung pada pendapatan. Dalam model pembangunan menurut Harrod-Domar, penambahan pendapatan nasional (PDB) dihubungkan dengan pembentukan modal, hasrat marginal untuk menabung (marginal propensity to save) dan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke dalam suatu kesatuan hubungan ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi (rate of development) ditentukan oleh hubungan antara pembentukan modal (capital formation), laju pertumbuhan penduduk (rate of population growth) dan rasio modal output (COR). Dari model tersebut tampak jelas bahwa peranan rasio modal output adalah sangat penting dalam proses pembangunan, seolah-olah hanya modal yang dianggap sebagai parameter yang strategis, sedangkan peranan atau perbandingan faktor-faktor produksi lainnya yang dipakai dalam proses produksi dan berbagai variabel kelembagaan (institusional) lainnya dianggap konstan.

Dalam penjelasan Daryanto dan Hafizrianda (2010:49), kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan investasi dapat dikaji melalui konsep Capital Output Ratio atau COR, baik dalam bentuk rata-rata maupun pertambahan atau marginal. COR yang berbentuk rata-rata memiliki sifat statis, sedangkan yang marginal bersifat dinamis. Adanya perbedaan perspektif waktu ini menyebabkan COR rata-rata lebih banyak dipakai hanya untuk mengukur produktivitas kegiatan investasi pada tahun tertentu, sementara COR dalam bentuk marginal sering digunakan sebagai alat untuk memperkirakan kebutuhan investasi dan pertumbuhan ekonomi wilayah dimasa mendatang. COR yang memiliki sifat dinamis ini biasa disebut juga ICOR atau Incremental Capital Output Ratio.

ICOR merupakan konsep yang penting dan sangat berguna bagi perencanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. ICOR dapat digunakan untuk memeriksa konsistensi antara sasaran pertumbuhan pendapatan regional dengan modal tambahan yang mungkin akan terkumpul dari tabungan domestik yang sedang berjalan. Dalam memperkirakan keperluan finansial pertumbuhan diperlukan adanya perkiraan mengenai volume investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target output tertentu. Dengan demikian besar kecilnya nilai perkiraan kebutuhan investasi dimasa mendatang sangat ditentukan oleh nilai ICOR.

Daryanto dan Hafizrianda (2010:50,53) menjelaskan, perkiraan ICOR tahunan dilakukan berdasarkan data time series tahunan. yang dapat dipisahkan berdasarkan gestation period (tenggang waktu). Bila investasi yang dilakukan pada pada tahun ke t diasumsikan akan menghasilkan tambahan pendapatan (output) pada tahun ke t juga, maka perkiraan ICOR yang diperoleh melalui pendekatan ini merupakan ICOR Tanpa Tenggang Waktu yang dapat dihitung dengan rumus:

$$k_t = \frac{I_{it}}{\Delta Y_{it}} = \frac{\frac{I_{it}}{Y_{it-1}} \times 100}{g_{it}}$$

dimana:

- k_{it} = ICOR pada tahun ke t untuk aktivitas i
- I_{it} = Investasi pada tahun ke t untuk aktivitas i
- Y_{it-1} = Pendapatan regional pada tahun ke t-1 untuk aktivitas i
- g_{it} = Laju pertumbuhan aktivitas i pada tahun ke t

Penetapan sasaran laju pertumbuhan ekonomi mengandung implikasi yang cukup besar didalam memperkirakan kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam konteks ini, semakin tinggi sasaran laju pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai, maka semakin besar pula kebutuhan investasi dimasa mendatang, begitu pula sebaliknya.

Seandainya telah diketahui besarnya ICOR (tahunan atau rata-rata) dan telah ditetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi wilayah, maka investasi yang

dibutuhkan untuk menghasilkan target pertumbuhan ekonomi tersebut dihitung dengan persamaan:

$$\hat{I} = k \Delta Y$$

dimana:

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \text{Perkiraan investasi yang dibutuhkan} \\ k &= \text{ICOR} \\ \Delta Y &= \text{Besarnya pertambahan hasil} \end{aligned}$$

Perkiraan kebutuhan investasi dalam persamaan diatas juga dihitung berdasarkan tenggang waktu, hal ini disesuaikan tenggang waktu ICOR yang digunakan dalam persamaan tersebut. Misalkan, ICOR yang dipakai memiliki tenggang waktu satu tahun, maka perkiraan investasi yang dihitung juga memiliki tenggang waktu satu tahun. Demikian bila tenggang waktu ICOR adalah dua tahun, berarti perkiraan investasi juga berdasarkan tenggang waktu dua tahun.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dimungkinkan oleh adanya pertambahan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Investasi pada suatu tahun tertentu akan menambah jumlah barang-barang modal pada tahun berikutnya. Pertambahan penduduk dan kegiatan pendidikan akan menambah jumlah tenaga kerja dan mempertinggi keahlian penduduk. Sedangkan penelitian, pengembangan dan investasi akan menimbulkan perkembangan dalam teknologi. Pertambahan jumlah dan mutu faktor-faktor produksi yang berlangsung dari tahun ke tahun memungkinkan suatu perekonomian untuk terus-menerus mempertinggi kapasitasnya memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tentunya akan mempengaruhi PDRB dan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional

Teori pertumbuhan ekonomi regional merupakan bagian penting dalam analisa ekonomi regional. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Teori pertumbuhan ekonomi regional memasukkan

unsur lokasi dan wilayah secara eksplisit dimana sasaran utama analisa pertumbuhan ekonomi regional ini adalah untuk menjelaskan mengapa suatu daerah dapat tumbuh cepat dan ada pula yang tumbuh lambat. Analisa ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Disamping itu, analisa pertumbuhan ekonomi regional juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi wilayah dengan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah (Sjafrizal, 2008:85).

Teori yang membicarakan pertumbuhan ekonomi regional dimulai dari teori yang dikutip dari ekonomi makro atau ekonomi pembangunan dengan mengubah batas wilayah dan disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi regional. Apabila dalam ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, istilah ekspor atau impor adalah perdagangan dengan luar negeri maka dalam ekonomi regional hal itu berarti perdagangan dengan luar wilayah (termasuk perdagangan dengan luar negeri). Teori pertumbuhan yang dijelaskan dalam ekonomi makro adalah berlaku untuk ekonomi nasional yang dengan sendirinya juga berlaku untuk wilayah atau daerah yang bersangkutan. Jadi tidak mungkin mengabaikan teori tersebut, walaupun yang dibahas adalah satu wilayah tertentu. Namun demikian, dalam penerapannya harus dikaitkan dengan ruang lingkup wilayah operasinya, misalnya daerah tidak memiliki wewenang untuk membuat kebijakan fiskal dan moneter, wilayah bersifat lebih terbuka dalam pergerakan orang dan barang. Teori yang dikembangkan dalam ekonomi regional antara lain membahas pengklasifikasian pendapatan dari satu daerah dan faktor-faktor apa yang menunjang peningkatan pendapatan daerah tersebut. Demikian pula dibahas akibat hubungan antar dua daerah atau lebih dan kaitannya dengan pemerataan pendapatan dan kebijakan yang menunjang pemerataan pendapatan antar daerah (Tarigan, 2009:47).

Sjafrizal (2008:87) menyebutkan ada beberapa model pertumbuhan ekonomi yang bisa diterapkan dalam menganalisa faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional, yaitu Model Interregional Income dan Model Neo-Klasik. Masing-masing model menggunakan variabel dan formulasi tersendiri dan menghasilkan

analisa dan kesimpulan tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional yang tersendiri pula. Dalam prakteknya, penerapan model-model ini dapat dilakukan secara utuh dan ada pula dalam bentuk penggabungan dari beberapa model tertentu, tergantung dari kondisi wilayahnya.

1. Model Interregional Income

Perluasan dari Model Basis Ekspor dapat dilakukan dengan memasukkan unsur hubungan ekonomi antar wilayah hal ini dikenal sebagai Interregional Income Model yang dikembangkan oleh Harry W. Richardson (1978). Dalam Model Interregional Income, ekspor diasumsikan sebagai faktor yang berada dalam sistem (endogeneous variabel) yang ditentukan oleh perkembangan kegiatan perdagangan antar wilayah. Selanjutnya, kegiatan perdagangan antar daerah tersebut dibagi atas barang konsumsi dan barang modal. Disamping itu agar analisa lebih realistis, maka pada model antar region ini dimasukkan pula unsur pemerintah yang ditampilkan dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah serta kegiatan investasi sesuai dengan prinsip Teori Ekonomi Keynes. Mengikuti logika Keynes, model pertumbuhan ekonomi interregional dapat dirumuskan :

$$Y_i = C_i + I_i + G_i + (X_i - M)$$

Subskrip ini menunjukkan region dimana:

Y	=	Pendapatan Regional (PDRB)
C	=	Konsumsi
I	=	Investasi
G	=	Pengeluaran Pemerintah
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan ini mempunyai implikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan melihat pada peningkatan pendapatan regional untuk periode tertentu. PDRB dapat ditingkatkan melalui peningkatan unsur konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan melalui penurunan impor. Tanda positif pada variabel konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor pada persamaan diatas menunjukkan bahwa antara PDRB sebagai variabel

terikat dengan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor sebagai variabel bebas berkorelasi positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor meningkat, baik secara terpisah atau secara bersama-sama, akan berdampak pada meningkatnya PDRB. Sebaliknya, tanda negatif unsur Impor pada persamaan diatas menunjukkan bahwa antara Impor dan PDRB berkorelasi negatif. Artinya, jika Impor meningkat akan berdampak pada menurunnya PDRB. Dalam persamaan ini diasumsikan variabel lainnya tidak berubah (*ceteris paribus*).

2. Model Neo-Klasik

Model pertumbuhan ekonomi regional ini dipelopori oleh George H. Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi pada suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah. Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti pendapat Richardson (1978), Model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan menurut fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk fungsi Cobb-Douglas, maka dapat diformulasikan:

$$Y = A K^{\alpha} L^{1-\alpha}$$

Dimana:

Y	=	Pendapatan Regional (PDRB)
A	=	Teknologi
K	=	Modal
L	=	Tenaga Kerja
α	=	Konstanta antara 0 dan 1

Persamaan diatas memberikan suatu kesimpulan yang penting dari Model Neo-Klasik, yaitu pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemajuan teknologi, penambahan modal atau investasi

dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja. Jika modal dan tenaga kerja meningkat dalam proporsi yang sama, maka output (PDRB) meningkat menurut proporsi yang sama pula. Dimana α adalah konstanta antara 0 dan 1 yang mengukur bagian modal dari pendapatan, α menentukan berapa bagian pendapatan yang masuk ke modal dan berapa yang masuk ke tenaga kerja.

2.6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting ekonomi makro yang sering digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun tanpa memperhitungkan kepemilikan (BPS). Dari data PDRB dapat diturunkan beberapa indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral dan distribusi perekonomian. Selain itu data PDRB dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan disuatu wilayah dan sebagai dasar perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan memperhatikan dan menganalisis PDRB, pemerintah daerah dapat memulai, melanjutkan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pembangunan yang tepat sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Sukirno (1981:52), nilai seluruh produksi yang tercipta dalam suatu negara dalam satu tahun tertentu dinamakan pendapatan nasional. Oleh karena itu pendapatan nasional didefinisikan sebagai nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Dalam penghitungan pendapatan nasional terdapat tiga istilah yang memberikan gambaran tentang pendapatan nasional dari suatu negara, yaitu Produk Nasional Bruto (PNB), Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Nasional. PNB adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran, PDB adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara produksi, sedangkan Pendapatan

Nasional adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pendapatan. Secara umum, apabila disebutkan pendapatan nasional, yang dimaksud adalah PDB atau PNB.

Menurut Lisey dan Steiner (1981:491, 492), pendapatan nasional adalah nilai dari seluruh produk yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama satu tahun. Nilai yang dimaksud dalam perhitungan pendapatan nasional adalah nilai jual, termasuk pajak-pajak yang timbul atas transaksi penjualan barang atau tersebut. Pendapatan nasional dapat juga disebut sebagai Produk Nasional. Produk Nasional mengindikasikan nilai jual dari seluruh produk yang dihasilkan, sedangkan Pendapatan Nasional mengindikasikan jumlah yang dibayarkan oleh seluruh pelaku ekonomi untuk menghasilkan produk tersebut.

Rahardja dan Manurung (2008:11-12) menyebutkan istilah yang paling sering dipakai untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto - PDB (untuk daerah disebut pendapatan regional adalah Produk Domestik Regional Bruto - PDRB). Pengertian PDB adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar, yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode (kurun waktu) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada (berlokasi) dalam perekonomian tersebut. Besarnya nilai PDB menunjukkan seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian (tenaga kerja, barang modal, uang dan kemampuan kewirausahawan) digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Secara umum, makin besar PDB suatu negara, semakin baik efisiensi alokasi sumber daya ekonominya. Besarnya PDB juga dapat menggambarkan produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara atau wilayah serta masalah-masalah struktural yang dihadapi suatu perekonomian, misalnya masalah distribusi pendapatan yang tidak merata.

Menurut Dornbusch et al (2008:23) Produk Domestik Bruto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Dornbusch et al mendefinisikan dan membagi output (PDB) dalam dua sisi, di sisi produksi, output adalah pengeluaran untuk tenaga kerja (dalam bentuk upah) dan

modal (dalam bentuk bunga dan dividen). Di sisi permintaan, output dikonsumsi atau diinvestasikan untuk masa depan. Pembagian output ke dalam pembayaran faktor (upah, dll) di sisi produksi merupakan gambaran pertumbuhan (growth) dan penawaran agregat (aggregate supply). Pembagian output ke dalam konsumsi, investasi dan sebagainya, disisi permintaan merupakan gambaran permintaan agregat (aggregate demand). Penghitungan input dan output atau permintaan dan produksi, harus seimbang dalam kondisi keseimbangan.

2.6.1. Penghitungan PDRB

Output perekonomian daerah diukur dengan menghitung jumlah PDRB satu periode tertentu. PDRB adalah total jumlah dan atau nilai produksi perekonomian yang dihasilkan dalam satu periode tertentu, tanpa membedakan siapa pemilik faktor produksi (mesin-mesin, tenaga kerja, uang, pengusaha). Dalam arti, penghitungan PDRB tidak dibedakan apakah faktor produksi yang digunakan milik perekonomian tersebut atau milik perekonomian lainnya/luar negeri (Rahardja dan Manurung, 2008:39).

Menurut penjelasan Lisey dan Steiner (1981) penghitungan pendapatan nasional dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran (pengeluaran uang dari rumah tangga ke perusahaan) dan pendekatan produksi (nilai produk seluruh perusahaan yang ditawarkan ke rumah tangga). Tidak ada perbedaan hasil penghitungan dari dua pendekatan ini karena kedua pendekatan tersebut sebenarnya menghitung besarnya aliran pendapatan yang sama. Perbedaannya hanya karena titik aliran tempat melakukan penghitungan.

Penghitungan PDRB yang dilakukan oleh BPS menggunakan dua metode, yaitu *Metode Produksi (PDRB Menurut Lapangan Usaha)* dan *Metode Pengeluaran (PDRB Menurut Penggunaan)*, kedua metode penghitungan ini menghasilkan jumlah pendapatan yang sama. Dengan metode produksi (PDRB Menurut Lapangan Usaha), dijumlahkan seluruh nilai produksi yang dikelompokkan kedalam sembilan sektor lapangan usaha yang meliputi (1) Pertanian, Peternakan,

Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Galian, (3) Industri Pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air Bersih, (5) Konstruksi/Bangunan, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, (9) Jasa-jasa. Dalam penghitungan PDRB melalui Metode Produksi, yang dihitung adalah nilai tambah bruto yang diberikan oleh perusahaan dalam proses produksinya. Nilai tambah tersebut diperoleh dari perkalian jumlah produksi dengan harga barang tersebut, selanjutnya dikurangi dengan biaya antara, yakni nilai bahan yang dipergunakan dalam proses produksi. PDRB adalah jumlah dari nilai tambah bruto (belum dikurangi penyusutan alat produksi) dari seluruh pelaku ekonomi di dalam negeri selama satu tahun.

Penghitungan PDRB melalui metode pengeluaran (PDRB Menurut Penggunaan) adalah berdasarkan jenis pengeluaran atau konsumsi permintaan akhir. Jenis pengeluaran terhadap barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan persediaan barang (stok), ekspor dikurangi impor. Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir tidak saja berasal dari produk domestik tetapi bisa saja berasal dari impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Penghitungan PDRB dengan metode pengeluaran (PDRB Menurut Penggunaan) diformulasikan:

$$Y = C + If + Is + X - M$$

Dimana :

Y	=	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
C	=	Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Swasta Nirlaba, Pemerintah
If	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Is	=	Perubahan Persediaan Barang (Stok)
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Dalam metode pengeluaran jenis pengeluaran dikelompokkan kedalam tujuh jenis pengeluaran, yaitu (1) Konsumsi Rumah Tangga, (2) Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba, (3) Konsumsi Pemerintah, (4) Pembentukan Modal Tetap Bruto, (5) Perubahan Persediaan Barang, (6) Ekspor Barang/Jasa, (7) Impor Barang/Jasa.

Dalam metode pengeluaran, Investasi (I) dipisah menjadi dua kelompok, yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (If) dan Perubahan Persediaan Barang (Is).

Pada dasarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi bila dilihat dari segi penggunaannya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam proses produksi yang disebut konsumsi antara (intermediate consumption) dan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang disebut konsumsi akhir (final consumption). Barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi permintaan akhir tidak saja berasal dari produk domestik tetapi bisa saja berasal dari impor baik dari luar negeri maupun dari wilayah lain. Barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi antara akan habis dalam proses produksi sedangkan barang dan jasa yang termasuk dalam konsumsi akhir meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung (nirlaba), pengeluaran konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, perubahan persediaan (stok), ekspor dan impor. Penjumlahan dari komponen pengeluaran ini merupakan PDRB.

Menurut BPS, penghitungan PDRB dengan metode pengeluaran membedakan jenis pengeluaran pendapatan regional dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang jadi dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh berbagai perusahaan. Pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dipakai dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods), contohnya, makanan, pakaian, rumah, mobil, peralatan rumah tangga, rekreasi dan lain sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas rumah yang ditempati, seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air telepon. Dalam penghitungan pendapatan nasional, belanja individu

diperlakukan sebagai pengeluaran konsumsi personal. Semua pengeluaran rumah tangga dihitung sebagai pengeluaran konsumsi.

2. Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan jumlah seluruh pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa akhir (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai) dan penyusutan barang modal dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah. Kegiatan pemerintah mencakup kegiatan administrasi termasuk administrasi pertahanan dan keamanan. Pengeluaran untuk tunjangan tidak masuk dalam perhitungan konsumsi pemerintah.

3. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba

Lembaga swasta nirlaba adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba meliputi semua pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pembayaran upah dan gaji, penerimaan transfer, penyusutan dan pajak tidak langsung netto dikurangi dengan penjualan barang-barang bekas atau tak terpakai.

4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pengeluaran ini dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal untuk mendirikan perusahaan atau memperluas industri dan perusahaan. Penghitungan PMTB ini menunjukkan bahwa pendekatan pengeluaran lebih mempertimbangkan barang modal yang baru. Barang-barang modal tersebut merupakan output baru, karena itu harus dimasukkan dalam perhitungan PDRB. Pengertian konsep PMTB dalam suatu wilayah adalah semua barang modal baru yang digunakan untuk dipakai sebagai alat untuk proses produksi di wilayah itu sendiri. Jenis barang modal adalah barang-barang yang mempunyai umur satu tahun

lebih dan yang dimaksud pemakaian adalah penggunaan barang-barang modal tersebut sebagai alat yang tetap dalam proses produksi.

5. Perubahan Persediaan Barang (Stok)

Pengertian persediaan (stok) disini adalah persediaan barang-barang pada akhir tahun baik berasal dari pembelian yang akan dipakai sebagai input pada suatu kegiatan ekonomi atau untuk dijual lagi, maupun barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang belum dijual, baik barang yang sudah jadi maupun yang sedang dalam proses. Perubahan stok adalah selisih kondisi awal tahun dengan akhir tahun dari barang atau bahan yang ada dalam penyimpanan para pedagang/produsen ataupun stok dalam proses produksi.

6. Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor meliputi transaksi barang dan jasa antara masyarakat suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lain (termasuk negara lain). Transaksi barang dan jasa yang dimaksud adalah semua barang dan jasa yang melewati batas geografis suatu wilayah atau negara, termasuk daerah pabean dan daerah bebas pajak. Ekspor bersih atau ekspor neto adalah selisih antara nilai ekspor dengan impor.

Cara penghitungan pendapatan regional dilakukan dari satu tahun ke tahun lainnya dimana akan berlaku kenaikan dalam pendapatan nasional dan tingkat harga-harga. Nilai-nilai pendapatan regional yang dihitung menurut harga yang tidak berubah dari satu tahun ke tahun lainnya dinamakan pendapatan nasional menurut harga tetap atau pendapatan nasional riil. Sebaliknya pendapatan regional yang dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun dimana produksi nasional yang sedang dinilai diproduksi dinamakan pendapatan regional menurut harga yang berlaku. Sebagai akibat dari adanya perubahan harga-harga tersebut maka dalam hal membandingkan nilai pendapatan regional dari satu tahun ke tahun lainnya atau menentukan tingkat pertumbuhan pendapatan regional yang sebenarnya berlaku, haruslah nilai pendapatan regional dari berbagai tahun yang akan dihitung atau dibandingkan tingkat pertumbuhannya menurut harga-

harga tetap. Tingkat perubahan pendapatan regional menurut harga tetap dari satu tahun ke tahun berikutnya menunjukkan lajunya atau tingkat pertumbuhan dari perkembangan ekonomi yang berlaku (Sukirno, 1981:53,178).

Menurut BPS, dasar penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar untuk penentuan harga konstan. Jadi, kenaikan PDRB hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi karena harga dianggap tetap (konstan). Akan tetapi, pada sektor jasa yang tidak memiliki unit produksi, nilai produksi dinyatakan dalam harga jual.

PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui kenaikan PDRB yang sebenarnya (riil), faktor inflasi harus dikeluarkan lebih dahulu. PDRB yang didalamnya masih ada unsur inflasi dinamakan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Sedangkan PDRB dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Untuk mengetahui apakah daya beli masyarakat meningkat atau tidak, pendapatannya harus dibandingkan dalam nilai konstan. Dengan alasan inilah maka PDRB perlu dihitung dalam dua bentuk, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan.

2.6.2. Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan pengangguran. Indikator keberhasilan

pembangunan ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan penduduk maupun antar wilayah.

Dari tahun ke tahun sumber-sumber daya yang dimiliki sesuatu negara akan mengalami penambahan. Penduduk menjadi bertambah banyak, dan ini memperbesar jumlah tenaga kerja. Pendidikan dan pengalaman kerja mempertinggi kemampuan tenaga kerja. Juga teknologi dan investasi barang-barang modal berkembang. Perkembangan dalam sumber-sumber daya ini memungkinkan suatu perekonomian menambah kapasitas produksinya, yaitu lebih banyak barang-barang dapat dihasilkan oleh perekonomian tersebut. Hal ini tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Sukirno, 1982:20).

Menurut Tarigan (2009:46), pertumbuhan ekonomi regional adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi. Pendapatan regional menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di daerah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar daerah atau mendapat aliran dana dari luar daerah. Untuk dapat melihat pertumbuhan dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya, penghitungan pendapatan regional harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dihitung dalam harga konstan.

Menurut Boediono (1985:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, prosentase pertumbuhan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertumbuhan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Ada ahli ekonomi yang membuat definisi yang lebih ketat, yaitu bahwa pertumbuhan itu haruslah bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Ketentuan ini

sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional, karena bisa saja suatu wilayah mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan dana atau suntikan dari pemerintah pusat dan pertumbuhan itu terhenti apabila suntikan dana itu dihentikan. Dalam kondisi seperti ini, sulit dikatakan ekonomi wilayah itu bertumbuh.

Tingkat pertumbuhan ekonomi perlu diketahui agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan produksi riil suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari besarnya prosentase pertumbuhan ekonomi tahunan. Salah satu indikator ekonomi makro yang sering digunakan untuk mengetahui keadaan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah dengan melihat pertumbuhan PDB atau PDRB. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut dinyatakan dalam bentuk prosentase. Pertumbuhan riil 100 persen mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat telah menjadi dua kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya dihitung berdasarkan laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan, hal ini dikarenakan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dianggap lebih riil tanpa melihat laju inflasi suatu daerah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi suatu daerah berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah sebagai berikut:

$$\text{dimana: } g_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \times 100\%$$

g_t = Tingkat pertumbuhan tahun ke t
 P_t = PDRB tahun ke t
 P_{t-1} = PDRB tahun sebelumnya

2.7. Manajemen Kota dan Wilayah

Menurut Sadyohutomo (2009:6) lingkup kegiatan manajemen kota dan wilayah berkaitan erat dengan kegiatan penataan ruang. Dalam penataan ruang mencakup tiga proses, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang. Manajemen terhadap kota dan wilayah sekitarnya merupakan suatu kesatuan pengelolaan. Penekanan manajemen kota dan wilayah adalah pada operasional penyediaan pelayanan publik dan intervensi pada publik terutama dalam bentuk pengaturan.

Menurut Mahmudi (2005) dalam Hardiyansyah (2011:20-23) pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi kesehatan, pendidikan dasar dan bahan kebutuhan pokok masyarakat. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah adalah pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa.

Menurut Tarigan (2009:125) fasilitas perkotaan atau fungsi perkotaan, antara lain:

1. Pusat perdagangan
Melayani masyarakat kota itu sendiri, melayani masyarakat kota dan daerah pinggiran, melayani beberapa kota kecil (pusat kabupaten), melayani pusat provinsi atau pusat kegiatan perdagangan ekspor.
2. Pusat pelayanan jasa
Jasa perorangan ataupun jasa perusahaan.
3. Tersedianya prasarana perkotaan
Seperti, sistem jalan kota yang baik, jaringannya listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, pelayanan sampah, sistem drainase, taman kota, pasar.
4. Pusat penyediaan fasilitas sosial
Seperti, prasarana pendidikan, kursus ketrampilan, prasarana kesehatan, apotek, tempat ibadah, prasarana olah raga, prasarana sosial.
5. Pusat pemerintahan
Menjadi lokasi pusat pemerintahan, misalnya tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.
6. Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi
Dari kota masyarakat bisa berhubungan ke banyak tujuan dengan berbagai pilihan alat penghubung, misalnya telepon, teleks, internet, radio dan

faksimile. Bisa bepergian langsung ke berbagai tujuan dengan berbagai pilihan alat transportasi, seperti bus, kapal laut, kereta api atau pesawat.

7. Lokasi permukiman yang tertata

Penduduk membutuhkan tempat tinggal. Hal ini berarti kota merupakan lokasi permukiman dan mestinya di kota permukiman itu kelihatan teratur atau tertata karena harus meminta IMB apabila ingin membangun.

Menurut Sadyohutomo (2009:52) masalah-masalah yang sering ditemui di dalam pengelolaan kota dan wilayah di Indonesia, antara lain adalah yang berhubungan dengan landasan hukum manajemen kota dan wilayah termasuk tumpang tindihnya peraturan perundangan, status penguasaan tanah, ancaman kelestarian lingkungan, pembangunan prasarana kota dan wilayah, transportasi, pendanaan, lemahnya penegakan hukum dan kelembagaan pengelolaan kota dan wilayah.

Dalam pemanfaatan ruang kota dan wilayah diperlukan campur tangan pemerintah. Hal ini disebabkan karena kegagalan pasar (*market failure*), yaitu ketidakmampuan ekonomi pasar mengalokasikan barang dan jasa secara efisien atau ketidakmampuan mendistribusikan sumber daya secara adil terutama terhadap barang publik. Menurut Cadwallader (1985) dalam Sadyohutomo (2009:17), peranan pemerintah dalam mengelola kota dan wilayah, antara lain sebagai penyedia service dan barang publik (*supplier of public goods and services*); mengatur dan memfasilitasi (*regulating and facilitating*) berjalannya ekonomi pasar agar tercipta alokasi sumber daya sebaik-baiknya; sebagai *social engineering* dalam mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan atau nilai-nilai yang diinginkan bangsa dan negara; dan sebagai arbiter dalam konflik antar kelompok masyarakat.

Hardiyansyah (2011:24) menjelaskan dalam memberikan barang publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan No.63 tahun 2003 menyebutkan, antara lain :

1. **Transparansi.** Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas.** Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional.** Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif.** Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan hak.** Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Keseimbangan hak dan kewajiban.** Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kota sebagai pusat pelayanan selalu berinteraksi dengan wilayah sekitarnya. Kota berfungsi sebagai tempat pasar dan rantai perdagangan produk pedesaan. Peningkatan pembangunan ekonomi di perkotaan akan memberikan peluang lapangan pekerjaan, termasuk bagi para migran dari wilayah sekitarnya. Dalam konteks ini pembangunan kota berdampak positif bagi penduduk sekitar kota dalam memperoleh pekerjaan. Migrasi penduduk desa bagi kota juga memberi manfaat, yaitu penduduk desa ikut andil dalam menggerakkan perekonomian kota.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sumber Data

Menurut Singarimbun (1995:11) untuk kepentingan pekerjaan ilmiah bisa saja sudah tersedia data yang dapat digunakan untuk penelitian. Data-data tersebut bisa berupa hasil survei yang belum diolah dan dianalisa lebih lanjut yang dapat menghasilkan sesuatu yang amat berguna.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang diperoleh dan diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi, BPS Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota dan Kabupaten Bekasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota dan Kabupaten Bekasi, Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota dan Kabupaten Bekasi serta Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota dan Kabupaten Bekasi. Data yang digunakan juga bersumber dari berbagai hasil penelitian atau laporan studi banding yang pernah dilakukan serta sumber-sumber lain yang relevan, seperti website, artikel, booklet, brosur dalam bentuk media cetak atau elektronik.

Data-data sekunder merupakan hasil dari Sensus Penduduk (SP), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Diantaranya SP 1990, SUPAS 1995, SP 2000, SUPAS 2005, SP 2010, SAKERNAS 2010, SUSENAS 2007, 2009; Kota Bekasi Dalam Angka 1997-1999, 2003-2010; Kabupaten Bekasi Dalam Angka 1990, 2005-2011; PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983, 1993, 2000 Menurut Kabupaten/Kota 1986-2010; PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 1983, 1993, 2000 Menurut Penggunaan 1987-2009.

Data variabel yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah data populasi suburban, jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan PDRB Bekasi yang

mencakup wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi. Untuk data populasi suburban, yaitu jumlah penduduk di wilayah suburban Kota dan Kabupaten Bekasi diolah dari data statistik hasil SP, SUPAS, Kota dan Kabupaten Bekasi Dalam Angka. Untuk data tenaga kerja, yaitu jumlah angkatan kerja yang ada di Kota dan Kabupaten Bekasi diolah dari data statistik hasil SP, SAKERNAS, Kota dan Kabupaten Bekasi Dalam Angka. Sedangkan data investasi dan PDRB Kota dan Kabupaten Bekasi diolah dari berbagai publikasi data statistik BPS hasil perhitungan PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota, PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Penggunaan, SUSENAS, Kota dan Kabupaten Bekasi Dalam Angka.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pengolahan data sekunder serta penyajian data penelitian dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan melalui penyelidikan dan pencarian di berbagai dokumen, buku-buku literatur, laporan-laporan statistik, laporan hasil penelitian atau jurnal, artikel koran, majalah, website di internet ataupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian dan permasalahan yang diteliti. Data-data sekunder yang telah terkumpul tersebut kemudian diolah agar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan dianalisis. Data yang dikumpul dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif dan data kualitatif diperlukan untuk analisis variabel penelitian. Data kuantitatif yang diolah adalah data time series dalam bentuk data panel untuk periode tahun 1990 hingga 2010.

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan dan penentuan data-data sampel yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

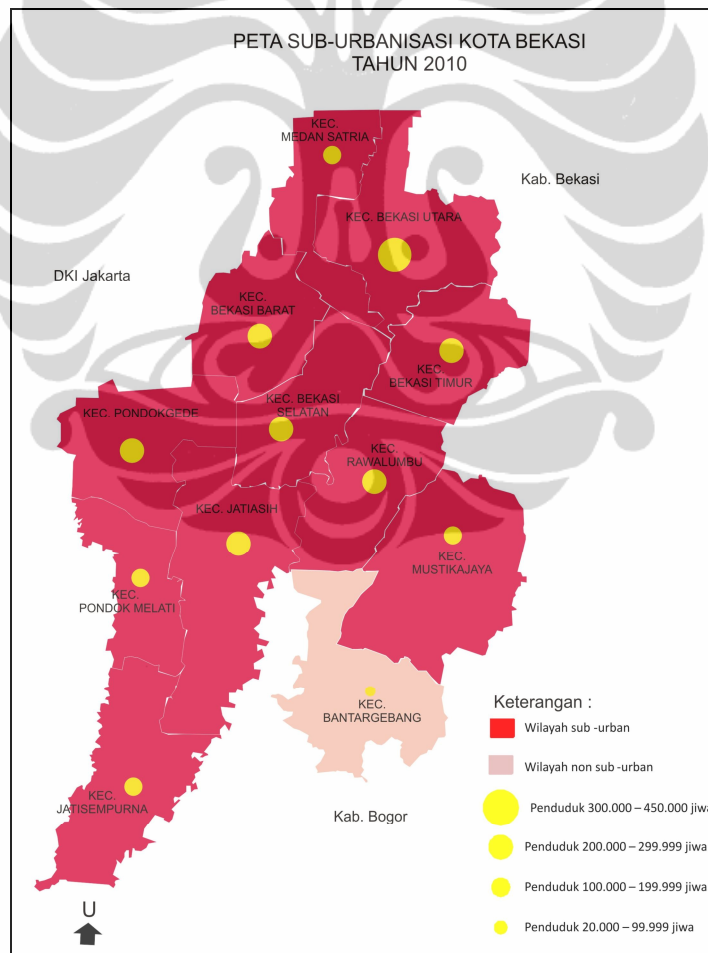
1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang juga disebut penarikan sampel (sampling) bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai populasi dengan mengamati hanya sebagian saja dari populasi itu. Pengambilan sampel dilakukan adalah karena sering tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi itu atau oleh karena pengamatan seluruh populasi tidak praktis dan efisien. Populasi menurut Ida Bagoes Mantra dan Kasto (Singarimbun, 1995:152) ialah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi sampling dalam penelitian ini adalah jumlah populasi suburban, jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan PDRB Bekasi di 35 kecamatan wilayah Bekasi yang terdiri dari 12 kecamatan di Kota Bekasi dan 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (Djarwanto dan Pangestu, 2000:108). Pengambilan, pengolahan dan analisa data sampel dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk periode tahun 1990 sampai 2010 karena berdasarkan data-data yang diperoleh diperkirakan pada periode inilah yang tepat dapat dilihat pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap PDRB Kota dan Kabupaten Bekasi. Penentuan periode waktu penelitian dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa sejak tahun 1990 hingga 2010 kondisi wilayah dan perekonomian Kota dan Kabupaten Bekasi telah menunjukkan perkembangan yang berarti. Pada periode tersebut populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di Kota dan Kabupaten Bekasi terlihat menunjukkan pertumbuhan yang berarti sebagai suatu fenomena suburbanisasi di wilayah suburban. Sebagai suatu rangkaian proses yang terjadi di wilayah suburban, penentuan periode penelitian yang relatif cukup panjang dan ketersediaan data variabel penelitian selama 20 tahun terakhir, dinilai akan dapat memetakan proses terjadinya suburbanisasi serta dampak yang dihasilkan di wilayah Bekasi.

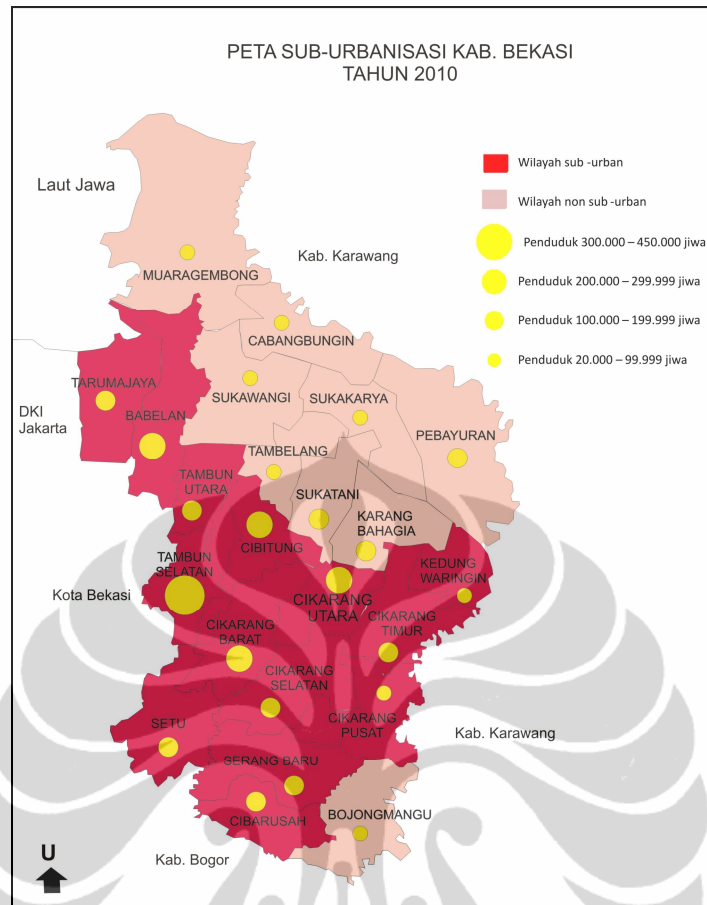
Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan sampel terbatas, yaitu sampel yang diperoleh dengan membagi populasi atas beberapa

kelompok. Dari kelompok tersebut kemudian dipilih beberapa buah sampel (Pasaribu, 1983:224). Populasi dalam penelitian ini mencakup 35 kecamatan yang ada di Bekasi (12 Kecamatan Kota Bekasi dan 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi). Berdasarkan identifikasi profil masing-masing wilayah kecamatan, dari total 35 kecamatan tersebut ditentukan sebanyak 25 kecamatan yang merupakan wilayah suburban (11 kecamatan di Kota Bekasi dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi). Penentuan kelompok data ini adalah berdasarkan daerah yang dinilai merupakan wilayah suburban dimana proses suburbanisasi itu terjadi. Dari 25 kecamatan suburban inilah data-data variabel penelitian diambil dan dianalisis karakteristiknya.



Gambar 3.1. Peta Wilayah Suburbanisasi Kota Bekasi 2010

Sumber : Peta Kota Bekasi, Data diolah



Gambar 3.2. Peta Wilayah Suburbanisasi Kabupaten Bekasi 2010

Sumber : Peta Kabupaten Bekasi, Data diolah

2. Pengambilan Data PDRB

Data PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penggunaan PDRB ADHK dikarenakan data PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi sehingga angka PDRB tersebut dapat dianalisa dan dilihat perkembangannya secara riil. PDRB ADHK digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Sampel data PDRB ADHK yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series PDRB ADHK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi dari tahun 1990 sampai 2010. Pembatasan kebutuhan data ini membuat pengambilan sampel data PDRB ADHK berada pada tahun dasar yang berbeda-beda, yaitu pada tahun dasar 1983, 1993 dan 2000. Perbedaan

tahun dasar akan membuat sampel data PDRB ADHK menjadi tidak konsisten sehingga tidak dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Untuk itu tahun dasar PDRB ADHK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi harus disamakan terlebih dulu dengan memilih tahun dasar yang representatif dan mengkonversikan data PDRB ADHK menurut tahun dasar yang dipilih tersebut. Tahun dasar PDRB ADHK yang dipilih dan dianggap paling representatif untuk digunakan dalam melihat dampak perekonomian dalam penelitian ini adalah PDRB ADHK dengan tahun dasar 2000.

Digunakannya tahun dasar 2000 sebagai dasar pengambilan sampel PDRB ADHK, antara lain karena secara nasional telah terjadi perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang terhitung berdasarkan tahun dasar 1933 dan 2000 menjadi tidak realistis lagi. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya berpengaruh terhadap perekonomian domestik dimana dalam periode tersebut pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang berdampak pada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Akibatnya struktur perekonomian Indonesia pada tahun 1993 telah berbeda dengan tahun 2000.

Dalam penelitian ini sampel data PDRB ADHK Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menggunakan tahun tahun dasar 2000. Karena periode penelitian ini adalah dari tahun 1990 sampai 2010, supaya konsisten dan dapat diperbandingkan datanya maka data sebelum tahun 2000, yaitu data PDRB ADHK yang masih menggunakan tahun dasar 1983 dan 1993 dikonversikan menjadi data PDRB ADHK bertahun dasar 2000.

3. Pengambilan Data Investasi

Data investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data investasi Kota dan Kabupaten Bekasi. Ketidakterediaan data investasi Kota dan Kabupaten Bekasi secara lengkap membuat pengambilan data investasi dilakukan dengan memperhitungkan nilai ICOR. Hal ini dilakukan karena

data Pembentuk Modal Tetap Bruto (PMTB) Kota dan Kabupaten Bekasi yang merupakan data investasi Bekasi tidak tersedia.

ICOR adalah suatu ukuran yang menunjukkan besarnya tambahan investasi baru yang dibutuhkan untuk menaikkan output sebesar satu unit baik secara fisik maupun secara nilai (uang). Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan investasi dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal). Dalam penelitian ini diasumsikan ICOR Jawa Barat merupakan ICOR Kota dan Kabupaten Bekasi. Pertimbangannya karena share PDRB Provinsi Jawa Barat salah satunya berasal dari Kota dan Kabupaten Bekasi dimana secara geografis Kota dan Kabupaten Bekasi masih merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari hasil perkalian antara ICOR Bekasi dengan perubahan nilai PDRB Kota dan Kabupaten Bekasi selama periode tahun 1990 sampai 2010 diperoleh data investasi untuk Kota dan Kabupaten Bekasi.

3.4. Definisi Konseptual dan Defenisi Operasional

Definisi konseptual dari masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suburbanisasi

Suburbanisasi adalah proses terbentuknya *pemukiman-pemukiman baru* dan juga *kawasan-kawasan industri dipinggiran wilayah perkotaan* terutama sebagai akibat *perpindahan penduduk kota* yang membutuhkan tempat bermukim dan untuk kegiatan industri perusahaan. Suburbanisasi menggambarkan *proses pertumbuhan daerah pinggiran kota* yang secara sistematis lebih cepat dibandingkan dengan kotanya dan sebagai komuter adanya gaya hidup mempengaruhi aktivitas sehari-hari untuk bekerja di

kota (Rustiadi dan Panuju, 1999). Suburbanisasi merupakan *proses peningkatan prosentase penduduk yang tinggal di sub-pusat kota* (Sridhar, 2007:322).

2. Wilayah Suburban

Wilayah suburban didefinisikan sebagai daerah pinggiran kota. Salah satu ciri wilayah suburban adalah tingginya persentase wilayah terbangun terhadap luas wilayah dipinggiran kota. Wilayah terbangun merupakan sebagian wilayah yang memiliki karakteristik penggunaan tanah perkotaan, ini ditandai dengan adanya pemukiman dan bangunan lainnya, seperti perkantoran, kegiatan industri dan perdagangan (Koestoer, 2000).

3. Populasi

Populasi adalah jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu wilayah administrasi. Penduduk adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang tinggal menetap disuatu wilayah geografis paling sedikit enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS). Populasi merupakan faktor utama dalam menentukan banyaknya permintaan barang konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu di bangun di suatu wilayah. Populasi merupakan faktor produksi yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan sehingga dapat dicapai suatu nilai tambah atau kemakmuran yang maksimal bagi suatu wilayah (Tarigan, 2009:185).

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan penduduk yang termasuk dalam pengangguran, meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS). Tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa jumlah penduduk yang dapat digunakan dalam proses produksi yang memiliki kemahiran dan kemampuan dalam bekerja dan berfikir (Sukirno, 1981:4).

5. Investasi

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha untuk membeli barang-barang modal dan membangun industri-industri. Investasi merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal (Sukirno, 1981:116). Investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun (t) dikurangi dengan stok kapital pada tahun (t-1). Sehingga setiap terjadi penambahan atau penimbunan kapital (modal) selalu dianggap sebagai investasi. Besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan pada suatu tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan pembuatan dan pembelian barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (A System of National Account, UN 1968).

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu, biasanya satu tahun, tanpa memperhitungkan kepemilikan. Komponen PDRB menurut penggunaan adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentuk modal tetap bruto, perubahan persediaan dan ekspor dikurangi dengan impor (BPS). Pengertian domestik atau regional dapat berupa provinsi atau kabupaten/kota. Transaksi ekonomi yang dihitung adalah transaksi yang terjadi dalam wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat dari daerah tersebut (resident) atau masyarakat daerah lain (non-resident). Resident adalah unit institusi yang mencakup penduduk/rumah tangga, perusahaan, pemerintah, lembaga swasta nirlaba yang bertempat tinggal di suatu wilayah domestik tertentu selama satu tahun atau lebih, atau mempunyai/melakukan kegiatan ekonomi di suatu wilayah domestik (BPS).

Definisi Operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Suburbanisasi

Suburbanisasi adalah proses terbentuknya pemukiman-pemukiman dan kawasan-kawasan industri dipinggiran daerah Jakarta, yaitu di wilayah suburban Bekasi sebagai akibat perpindahan penduduk kota Jakarta atau penduduk daerah pinggiran yang membutuhkan tempat bermukim dan mobilisasi perusahaan untuk kegiatan industri selama periode tahun 1990 hingga 2010. Dalam proses suburbanisasi ini terjadi peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah suburban Bekasi.

2. Wilayah Suburban

Kecamatan-kecamatan di wilayah Bekasi yang menjadi tempat terjadinya suburbanisasi selama periode tahun 1990 hingga 2010. Ada 25 kecamatan di Kota dan Kabupaten Bekasi yang diidentifikasi sebagai wilayah suburban, yaitu 11 kecamatan di Kota Bekasi dan 14 kecamatan di Kabupaten Bekasi.

3. Populasi Suburban

Populasi suburban ditunjukkan oleh jumlah penduduk yang terdapat di wilayah suburban Kota dan Kabupaten Bekasi selama periode tahun 1990 hingga 2010. Penduduk suburban adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang tinggal menetap di wilayah suburban Kota dan Kabupaten Bekasi paling sedikit selama enam bulan atau kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah jumlah angkatan kerja Kota dan Kabupaten Bekasi, yaitu penduduk Bekasi usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan penduduk Bekasi yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha atau penduduk Bekasi yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja selama periode tahun 1990 hingga 2010.

5. Investasi

Besarnya nilai investasi Kota dan Kabupaten Bekasi selama periode tahun 1990 hingga 2010 yang diperoleh dengan menggunakan nilai ICOR. Nilai investasi Kota dan Kabupaten Bekasi adalah hasil perkalian antara ICOR Bekasi dengan perubahan PDRB Kota dan Kabupaten Bekasi selama periode tahun 1990 sampai 2010.

6. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi per tahun selama periode 1990 hingga 2010. Nilai PDRB yang digunakan adalah PDRB menurut penggunaan atau pengeluaran atas dasar harga konstan untuk Kota dan Kabupaten Bekasi.

3.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan studi literatur. Analisis kuantitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan matematis, tabel, grafik atau bentuk numerik lainnya. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk menghitung atau memperkirakan besarnya pengaruh suatu kejadian terhadap kejadian lainnya secara kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan metode ekonometrika, yaitu pengukuran dalam ekonomi.

Gujarati (2004) menyebutkan bahwa pembahasan dalam ekonometrika lebih dari sebuah proses pengukuran. Ekonometrika merupakan integrasi pemahaman teori ekonomi, matematika, statistika dan matematika statistik. Teori ekonomi membahas mengenai pernyataan atau hipotesis dari sebuah fenomena ekonomi yang sebagian besar sifat analisisnya kualitatif (teori ekonomi tidak sampai menyebutkan angka sebagai suatu ukuran). Perhatian utama matematika ekonomi adalah untuk menggambarkan fenomena ekonomi dalam kalimat matematika

tanpa ada hubungannya dengan pengukuran empiris yang dapat dipergunakan untuk melakukan verifikasi teori ekonomi. Statistik dalam ekonomi berhubungan dengan tahapan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data-data ekonomi dalam bentuk tabel dan grafik. Statistik tidak membahas lebih lanjut mengenai bagaimana daya yang tersedia dapat digunakan untuk menguji teori ekonomi yang ada. Metode ekonometrika memberikan bukti empiris mengenai teori ekonomi.

Ekonometrika membutuhkan teknik dan metode yang terdapat dalam matematika statistik untuk menghadapi masalah data-data ekonomi yang sering kali tidak sama dengan apa yang dihasilkan dalam eksperimen yang terkontrol. Metode statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, analisis dan penafsiran data. Metode statistik digunakan untuk mendapatkan suatu fenomena umum atau fenomena khusus yang diperoleh dari data pada waktu tempat tertentu. Metode statistik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik, sedangkan analisis statistik inferensial dilakukan melalui estimasi, uji hipotesis, prediksi dan perhitungan derajat asosiasi antara variabel-variabel. Analisis ekonometrika dan statistik dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Eviews.

Studi literatur digunakan dalam rangka melihat hubungan antara hasil analisis kuantitatif dengan teori-teori pendukungnya atau hasil-hasil penelitian terdahulu. Studi literatur dilakukan melalui riset kepustakaan, yaitu penelitian terhadap buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, data-data statistik atau dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Riset kepustakaan merupakan suatu metode untuk menjamin keilmiahan dan juga untuk menunjang riset lapangan agar dapat terlihat sinkronisasi antara teori dan praktek.

3.6. Metode Pengolahan Data

Analisis regresi digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pengaruh fenomena suburbanisasi melalui variabel independen

populasi suburban, tenaga kerja dan investasi terhadap variabel dependen PDRB Bekasi serta mengetahui faktor mana diantara ketiga variabel independen tersebut yang berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB Bekasi.

Telah dikatakan diatas bahwa ekonometrika membutuhkan teknik dan metode yang terdapat dalam matematika statistik untuk mengolah dan menganalisis data-data ekonomi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi. Analisis regresi adalah analisis yang ingin mengetahui hubungan (dependence) satu variabel, yaitu variabel terikat (dependent variabel) dengan satu atau lebih dari satu variabel, yaitu variabel penjelas/variabel bebas (explanatory variabel) dengan tujuan ingin mengestimasi atau melakukan prediksi rata-rata nilai dependent variabel berdasarkan nilai explanatory variabel yang telah diketahui sebelumnya (Gujarati, 2004). Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan yang ada diantara dua variabel jika memang diantara keduanya terdapat hubungan yang signifikan.

Analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti tahapan metodologi klasik dalam ekonometrika, yaitu:

1. Pernyataan teori atau hipotesis
2. Pembentukan model ekonometrika
3. Pengumpulan dan perolehan data
4. Estimasi parameter model ekonometrika
5. Uji hipotesis

Melihat jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear untuk lebih dari dua variabel disebut analisis regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis ini lebih realistis karena mempunyai hubungan lebih dari dua variabel karena sebenarnya hubungan antara variabel-variabel kebanyakan merupakan hubungan regressional, artinya bahwa tidak ada nilai Y tertentu untuk nilai X tertentu, terdapat banyak kemungkinan nilai Y untuk nilai X

tertentu karena nilai Y tersebut dipengaruhi oleh banyak variabel X (Djarwanto dan Subagyo, 2000:309).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi suburban, tenaga kerja, investasi dan PDRB Bekasi. Model hubungan regresional digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen fenomena suburbanisasi, yaitu populasi suburban, tenaga kerja dan investasi terhadap variabel dependen PDRB Bekasi. Analisis regresi dilakukan dengan menggunakan program analisis ekonometrika dan statistika Eviews. Hasil output analisis regresi diperoleh dengan menginput data-data variabel penelitian tersebut kedalam program Eviews. Model persamaan regresi yang diformulasikan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

dimana:

Y	=	PDRB Bekasi (Variabel Dependen)
X_1, X_2, X_3	=	Populasi Suburban, Tenaga Kerja, Investasi (Variabel Independen)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Parameter Variabel Independen X_1, X_2, X_3
β_0	=	Constanta
ε	=	Error

Dalam estimasi persamaan regresi, agar estimator yang dihasilkan bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimate) beberapa asumsi yang harus dipenuhi adalah:

1. Variabel Y dan variabel X berhubungan linier dalam parameter
2. Rata-rata dari residual adalah nol
3. Varian dari residual konstan (homoskedastisitas)
4. Tidak ada hubungan antar residual (tidak ada auto korelasi)
5. Residual berdistribusi normal.

Asumsi-asumsi terkait dengan berbagai masalah yang sering dijumpai dalam analisis regresi dan korelasi, seperti masalah multikolinieritas, heteroskedastitas, autokorelasi dan normalitas.

BAB 4

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

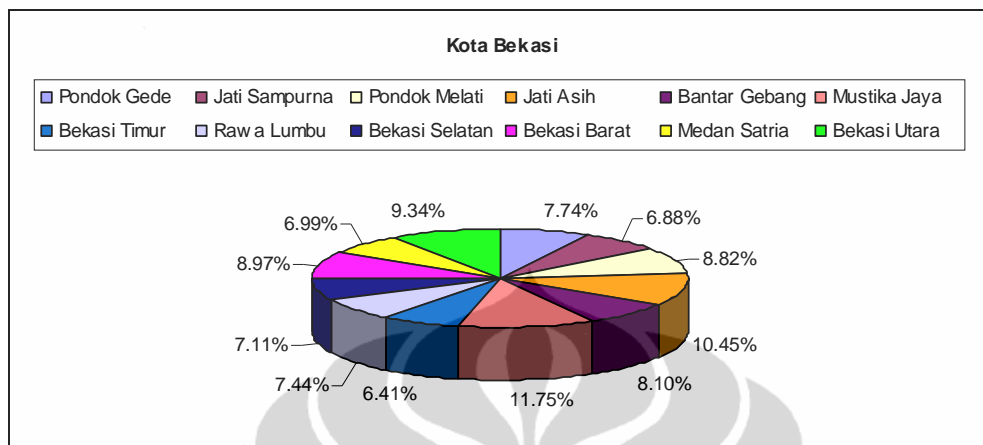
4.1. Wilayah Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Secara geografis Kota Bekasi berada pada posisi 106°55' Bujur Timur dan 6°7' - 6°15' Lintang Selatan pada ketinggian 19 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah mencapai 210,49 Km². Batas wilayah administrasi Kota Bekasi adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, di sebelah Barat berbatasan dengan Kota Jakarta Timur dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.

Kota Bekasi sebelumnya merupakan sebuah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bekasi yang pembangunan wilayahnya mengalami perkembangan sangat pesat hingga pada tahun 1982 statusnya wilayahnya ditingkatkan menjadi Kota Administratif Bekasi. Wilayah Kota Administratif Bekasi pada saat itu masih terdiri dari empat kecamatan, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Bekasi Utara yang meliputi 18 kelurahan dan 8 desa. Pada tahun 1996 Kota Administratif Bekasi ditingkatkan kembali statusnya wilayahnya menjadi kotamadya dan kemudian tahun 1997 terbentuklah Kota Bekasi dengan wilayah administrasi yang terpisah dari Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 04 tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan yang meliputi 56 kelurahan. Kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Bekasi adalah Pondok Gede, Jati Sampurna, Pondok Melati, Jati Asih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara. Luas wilayah Kota Bekasi mencapai 210,49 Km² dimana kecamatan dengan wilayah terbesar adalah Kecamatan

Mustika Jaya dengan luas 24,73 Km² (11,75%) sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bekasi Timur dengan luas 13,49 Km² (6,41%).



Gambar 4.1. Prosentase Luas Wilayah Kota Bekasi Menurut Kecamatan 2010

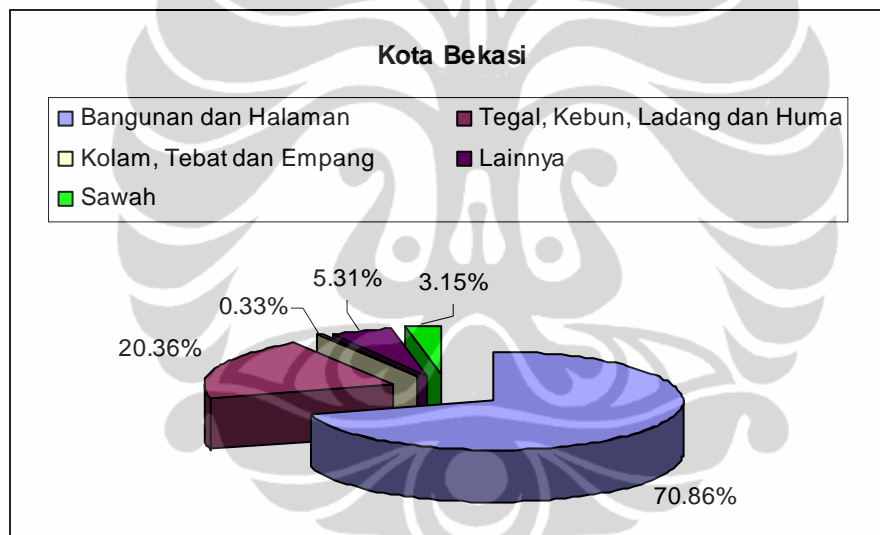
Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi dalam Angka 2010, Data sekunder diolah

Salah satu hal yang bisa dilihat dan menjadi ciri wilayah suburban adalah tingginya persentase wilayah terbangun terhadap luas wilayah dipinggiran kota. Saat ini Kota Bekasi telah berkembang menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban. Dari luas wilayah Kota Bekasi sebesar 210,49 Km², lebih dari 50% sudah menjadi kawasan efektif perkotaan. Wilayah yang sudah terbangun adalah seluas 107,33 Km² dimana 90% telah menjadi kawasan permukiman, 4% telah menjadi kawasan industri, 3% digunakan untuk kawasan perdagangan dan jasa, sisanya lahan untuk pendidikan dan pemerintahan sebesar 2% dan untuk bangunan umum sebesar 1% (DPU Ditjen Cipta Karya).

Peranan sektor pertanian di Kota Bekasi relatif kecil karena sudah tergeser oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan. Berkurangnya peranan sektor pertanian terlihat dari penggunaan lahan untuk sawah yang relatif kecil. Pada tahun 2009 luas lahan sawah di Kota Bekasi hanya 662 Ha atau 3,15% dari seluruh luas wilayah Kota Bekasi (21.049 Ha). Dilihat dari sistim pengairan yang digunakan, sebagian sawah di Kota Bekasi masih merupakan sawah tadah hujan (352 Ha) yang sebagian besar terletak di Kecamatan Bantar Gebang. Sementara lahan sawah yang sudah menggunakan sistim pengairan irigasi teknis dan irigasi

setengah teknis hanya seluas 52 ha dan 90 ha. Jika luas lahan sawah hanya sebesar 3,15% berarti 96,85% dari luas wilayah Kota Bekasi adalah tanah kering, yaitu 20.387 Ha. Penggunaan tanah kering ini sebagian besar untuk bangunan perumahan, kantor dan industri.

Diagram dibawah ini menunjukkan data luas tanah kering dan tanah sawah menurut penggunaannya pada tahun 2009 di wilayah Kota Bekasi. Dalam diagram tersebut terlihat bahwa dari luas wilayah Kota Bekasi sebesar 21.049 Ha, penggunaan tanah terbesar adalah untuk bangunan dan halaman sebesar 14.915 Ha (70,86%) dan berupa tegal, kebun, ladang dan huma sebesar 4.285 Ha (20,36%), luas tanah sawah hanya sebesar 662 Ha (3,15%).



Gambar 4.2. Luas Tanah Kering dan Tanah Sawah Kota Bekasi Menurut Penggunaannya 2009

Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi dalam Angka 2010, Data sekunder diolah

Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tanah di wilayah Kota Bekasi digunakan untuk permukiman penduduk yang ditandai dengan banyaknya bangunan perumahan, kantor dan industri yang ada di wilayah Kota Bekasi.

Perumahan merupakan kebutuhan primer bagi seluruh masyarakat selain sandang dan pangan. Permintaan unit rumah yang akan dibangun terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Ini dapat terlihat dari jumlah Ijin

Membangun Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Bangunan. Banyaknya IMB yang dikeluarkan dari tahun 2000 sampai 2009 adalah sejumlah 72.071. IMB yang dikeluarkan selama tahun tersebut berfluktuasi jumlahnya mengikuti permintaan masyarakat dan investasi yang dilakukan pengembang properti. Jumlah IMB yang terbanyak dikeluarkan ada pada tahun 2005, yaitu sebanyak 10.269 kemudian sampai tahun 2009 mengalami penurunan. Penurunan permintaan IMB belum tentu mengurangi jumlah unit rumah yang dibangun, mengingat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997 yang salah satu akibatnya adalah banyak pengembang yang menunda atau menghentikan pembangunan perumahan.

Tabel 4.1. Banyaknya IMB yang Dikeluarkan di Kota Bekasi 2000-2009

Tahun	Banyaknya IMB
2000	7.471
2001	4.927
2002	5.737
2003	8.564
2004	8.838
2005	10.269
2006	8.745
2007	6.541
2008	5.816
2009	5.163
Total	72.071

Sumber: BPS, Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi, Kota Bekasi dalam Angka 2010, Data sekunder diolah.

Untuk perumahan masyarakat jenis bangunan yang umum dibangun oleh pengembang bervariasi, antara lain rumah bertipe lebih kecil dari T.36, T.36, T.60, T.120, T.300, lebih besar dari T.300 dan berbagai jenis ruko. Menurut data Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Bekasi, pada tahun 2008 banyaknya IMB yang dikeluarkan adalah sebanyak 5.716, terdiri dari bangunan rumah tinggal sejumlah 5.474, ruko 153, sekolah 5, tempat ibadah 1 dan bangunan lainnya 83. Tahun 2009, IMB yang dikeluarkan sebanyak 4241 dimana bangunan rumah tinggal sejumlah 3.794 dan ruko sejumlah 447.

Kawasan pemukiman turut mengalami perkembangan seiring dengan adanya penambahan penduduk. Pertambahan penduduk di daerah pemukiman dapat terjadi karena adanya suburbanisasi penduduk dari pusat kota. Dari data penyebaran penduduk terlihat bahwa lahan pemukiman di wilayah Kota Bekasi yang seluas 21.049 hektar, terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Bekasi Timur, Bekasi Utara, Pondok Gede, Bekasi Barat dan Bekasi Selatan. Beberapa kawasan pemukiman di Kota Bekasi yang mengalami perkembangan diantaranya perumahan Kemang Pratama dan Perumahan Harapan Indah dengan luas lahan seluruhnya mencapai 2000 hektar. Selain itu pengembang Summarecon Agung juga membangun kota mandiri Summarecon Bekasi seluas 300 Ha di kecamatan Bekasi Utara.

4.1.1. Kependudukan Kota Bekasi

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik diketahui jumlah penduduk Kota Bekasi tahun 2010 adalah sebanyak 2.336.489 orang yang tersebar di 12 wilayah kecamatan Kota Bekasi. Dari data hasil sensus tersebut diketahui pula bahwa penyebaran penduduk di Kota Bekasi belum merata masih didominasi oleh empat wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 310.198 orang (13,28%) dengan kepadatan penduduknya 15.786 jiwa/Km², Bekasi Barat sebanyak 270.569 orang (11,58%) dengan kepadatan penduduk 14.323 jiwa/Km², Bekasi Timur sebanyak 248.046 orang (10,62%) dengan kepadatan penduduk 18,387 jiwa/Km² dan Kecamatan Pondok Gede sebanyak 246.413 orang (10,55%) dengan kepadatan penduduk 15,127 jiwa/Km². Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Bantar Gebang sebesar 95.957 orang (4,11%) dengan kepadatan penduduknya 5628 jiwa/Km².

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 melaporkan populasi wilayah perkotaan/urban Kota Bekasi adalah sebanyak 1.622.170 orang sedangkan populasi wilayah perdesaan/rural Kota Bekasi ada sebanyak 41.632 orang. Jumlah penduduk non migran ada sejumlah 629.923 orang dan migran masuk ada sejumlah 1.033.879

orang. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kota Bekasi ada sejumlah 1.663.802 orang dimana selama periode tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 5,18 persen per tahun. Terlihat pada periode ini pertumbuhan penduduk Kota Bekasi sangat tinggi dan terjadi penambahan penduduk yang signifikan di wilayah Kota Bekasi dari tahun ke tahun.

Tabel 4.2. Populasi Kota Bekasi Tahun 1990 - 2010

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
1990	1,003,650	4,768	5,18	1990-2000
1991	1,075,794	5,111		
1992	1,141,580	5,423		
1993	1,210,735	5,752		
1994	1,283,396	6,097		
1995	1,330,202	6,320		
1996	1,387,815	6,593		
1997	1,471,477	6,991		
1998	1,543,847	7,335		
1999	1,556,176	7,393		
2000	1,663,802	7,904		
2001	1,708,337	8,116		
2002	1,809,306	8,596		
2003	1,845,005	8,765		
2004	1,914,316	9,095		
2005	2,001,899	9,511		
2006	2,071,444	9,841		
2007	2,143,804	10,185		
2008	2,238,717	10,636		
2009	2,319,518	11,020		
2010	2,336,489	11,100		

Sumber: BPS, Kota Bekasi dalam Angka, SP 2000, 2010, Data sekunder diolah

Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.336.489 orang, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kenaikan jumlah penduduk Kota Bekasi masih cukup tinggi walaupun laju pertumbuhan penduduknya sebesar 3,45 persen per tahun (periode tahun 2000-2010). Kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah Kecamatan Mustikajaya yakni 8,43 persen pertahun, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan

Bekasi Timur yakni sebesar 1,33 persen pertahun. Namun demikian penyebaran penduduk di wilayah Kota Bekasi masih belum merata.

Tabel 4.3. Kota Bekasi Menurut Kecamatan Tahun 2010

Kecamatan Kota Bekasi	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah Rumah Tangga
Pondok Gede	16.29	7.74	246,413	10.55	15,127	63.397
Jati Sampurna	14.49	6.88	103,513	4.43	7,144	26.951
Pondok Melati	18.56	8.82	129,219	5.53	6,962	32.303
Jati Asih	22.00	10.45	199,496	8.54	9,068	49.966
Bantar Gebang	17.05	8.10	95,957	4.11	5,628	30.215
Mustika Jaya	24.73	11.75	160,381	6.86	6,485	41.161
Bekasi Timur	13.49	6.41	248,046	10.62	18,387	63.594
Rawa Lumbu	15.67	7.44	207,484	8.88	13,241	57.614
Bekasi Selatan	14.96	7.11	203,596	8.71	13,609	53.014
Bekasi Barat	18.89	8.97	270,569	11.58	14,323	70.180
Medan Satria	14.71	6.99	161,617	6.92	10,987	42.077
Bekasi Utara	19.65	9.34	310,198	13.28	15,786	77.101
Kota Bekasi (SP 2010)	210.49	100.00	2,336,489	100	11,100	607.573
Kota Bekasi (SP 2000)	210.49		1.663.802		7,904	828.717

Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi dalam Angka 2010, Data sekunder diolah

Dengan luas wilayah 210,49 Km² yang didiami oleh 2.336.489 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Bekasi adalah sebesar 11.100 jiwa/Km². Wilayah Kota Bekasi yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bekasi Timur dimana kepadatannya mencapai 18.387 jiwa/Km². Sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Bantargebang dengan angka kepadatan penduduknya sekitar 5.628 jiwa/Km².

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk per kecamatan yang tertinggi adalah Kecamatan Mustikajaya, yaitu sebesar 8,36% per tahun disusul kemudian Kecamatan Jati Sampurna sebesar 6,06%, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Bekasi Timur, yaitu sebesar 1,32% per tahun. Jumlah penduduk Kecamatan Mustika Jaya pada tahun 2010 telah naik menjadi lebih dari 2 kali lipat dari penduduk tahun 2000. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mustika Jaya juga terjadi pada seluruh kelurahan yang dalam wilayahnya. Hal ini disebabkan karena diseluruh wilayah kecamatan ini yang pada

awalnya merupakan daerah potensi pertanian dan perkebunan kini telah berubah dan menjamur dengan pesatnya pembangunan perumahan hunian baru. Laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan lainnya sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan rumah tangga dan pertumbuhan bangunan tempat tinggal.

Jika dilihat menurut kecamatan dalam kurun waktu 2000-2010, hampir seluruh kecamatan di Kota Bekasi mempunyai laju pertumbuhan penduduk diatas rata-rata Kota Bekasi itu sendiri kecuali empat kecamatan yang laju pertumbuhan penduduknya di bawah rata-rata, yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat dan Medan Satria. Pertumbuhan penduduk di keempat kecamatan ini berada dibawah rata-rata karena kepadatan penduduk di kecamatan-kecamatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Bekasi.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi cukup tinggi hal ini di duga berkaitan dengan wilayah Kota Bekasi yang merupakan daerah yang sangat strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, Kecenderungan jumlah penduduk yang terus bertambah dari sejak dibentuknya Kota Bekasi pada tahun 1997 sampai dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 2010 tidak terlepas dari daya tarik Kota Bekasi yang sudah menjadi kota industri, jasa dan perdagangan sehingga banyak menarik perhatian para pendatang. Kota Bekasi termasuk salah satu kota yang berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek yang pada saat ini telah menjadi kota dengan populasi terbesar keempat di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya dan Bandung.

4.1.2. Ketenagakerjaan Kota Bekasi

Adanya peningkatan jumlah penduduk di wilayah Kota Bekasi diikuti pula dengan peningkatan jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi. Berdasarkan data statistik BPS, jumlah angkatan kerja Kota Bekasi tahun 1996 adalah sebesar 451.874 orang sedangkan pada tahun 2010 telah mencapai 1.015.941 orang yang tersebar di

kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Pada tabel data dibawah ini terlihat dalam kurun waktu tahun 1996-2010 jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduknya. Terlihat ada hubungan searah antara kenaikan jumlah penduduk dengan kenaikan jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi.

Tabel 4.4. Angkatan Kerja Kota Bekasi 1996 - 2010

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja
1996	451,874
1997	473,685
1998	574,404
1999	597,215
2000	723,439
2001	687,250
2002	724,127
2003	720,697
2004	755,377
2005	794,208
2006	919,353
2007	921,181
2008	963,557
2009	1,083,298
2010	1,015,941

Sumber: BPS, Kota Bekasi dalam Angka, Data sekunder diolah

Jika kita membandingkan jumlah angkatan kerja Kota Bekasi pada tahun 2010 dengan jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2010, yaitu sejumlah 2.336.489 orang maka dapat diketahui bahwa 43,48% penduduk Kota Bekasi merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah tenaga-tenaga kerja yang bekerja di berbagai sektor perekonomian di wilayah Kota Bekasi.

Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 diketahui bahwa di Kota Bekasi jumlah angkatan kerja perkotaan sebanyak 703.457 orang dan angkatan kerja perdesaaan sebanyak 19.982 orang. Sektor ekonomi yang utama dan berkembang dengan pesat di Kota Bekasi adalah sektor jasa, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Di sektor-sektor inilah terjadi banyak penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan. Data statistik BPS yang menunjukkan jumlah

tenaga kerja yang bekerja menurut tiga lapangan usaha utama yang mempunyai jumlah tenaga kerja terbanyak di Kota Bekasi ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama Kota Bekasi 2000 - 2010

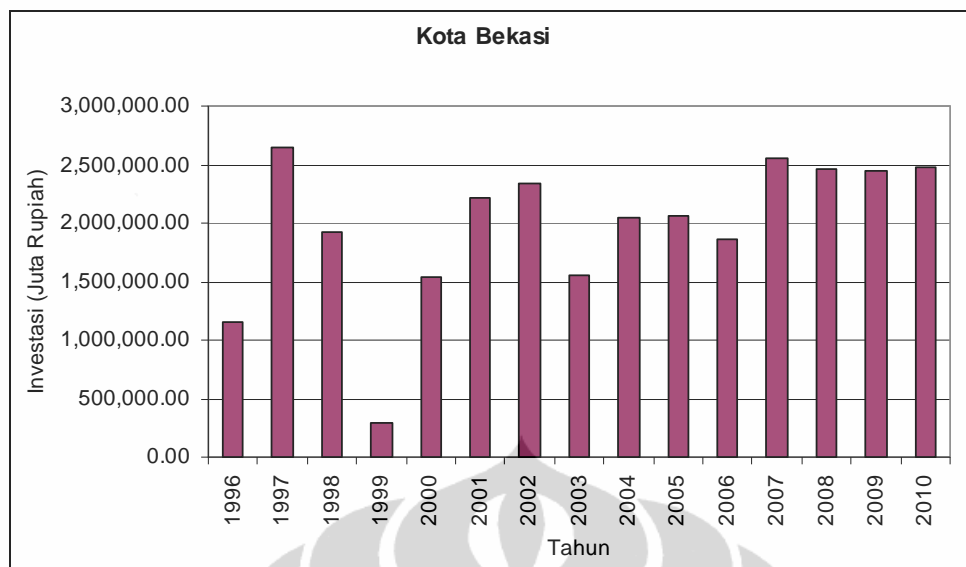
Tahun	Jasa-Jasa (orang)	Industri Pengolahan (orang)	Perdagangan, Hotel, Restoran (orang)
2000	198,680	132,356	148,751
2001	122,616	145,347	155,550
2002	206,523	133,535	155,709
2003	192,012	157,310	118,218
2004	152,390	194,988	128,934
2005	157,170	199,888	150,722
2006	165,110	183,920	171,798
2007	247,512	157,932	218,775
2008	229,534	213,315	109,959
2009	223,807	118,200	121,497
2010	254,043	183,256	213,873

Sumber: BPS, Jawa Barat dalam Angka, Data sekunder diolah

Berdasarkan catatan Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi, pada tahun 2008 jumlah pencari kerja terdaftar ada sejumlah 42.376 orang sedangkan tahun 2009 ada sejumlah 45.316 orang, ada peningkatan jumlah tenaga kerja pada periode tersebut. Sebagian besar pencari kerja tersebut adalah mereka yang berpendidikan SLTA, yaitu 28.311 orang dan Akademi/Universitas sekitar 14.968 orang. Namun jumlah mereka yang diterima bekerja hanya sekitar 919 orang, 871 orang berpendidikan SLTA dan 9 orang berpendidikan Akademi/Universitas.

4.1.3. Investasi Kota Bekasi

Diagram dibawah ini menunjukkan kegiatan investasi di Kota Bekasi selama tahun 1996 hingga 2010. Dalam kurun waktu tersebut investasi Kota Bekasi terlihat mengalami peningkatan walaupun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 1996 nilai investasi di Kota Bekasi sebesar 1,156,961.57 juta rupiah, di tahun 2010 nilai investasi Kota Bekasi sebesar 2,471,382.78 juta rupiah. Dalam waktu empat belas tahun investasi Kota Bekasi telah menjadi dua kali lipatnya jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 1996. Pertumbuhan investasi menjadi lambat karena terjadi fluktuasi selama kurun waktu tersebut.



Gambar 4.3. Investasi Kota Bekasi 1996-2010

Sumber: BPS Kota Bekasi, BPS Jawa Barat, Data sekunder diolah

Fluktuasi nilai investasi pada titik terendah terjadi di tahun 1999, pada tahun tersebut iklim dan kondisi investasi Kota Bekasi tidak begitu baik sehingga kegiatan investasi tidak banyak dilakukan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya berbagai krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia sehingga banyak perusahaan tidak dapat menjalankan operasional usahanya. Secara rata-rata tren investasi Kota Bekasi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2010 dibandingkan tahun 1996.

Dari data Sensus Penduduk tahun 2000 diketahui bahwa jumlah perusahaan atau usaha menurut berbagai lapangan usaha di Kota Bekasi adalah sebanyak 567,598 perusahaan yang terdiri dari 260.906 perusahaan jasa, 138.414 perusahaan industri pengolahan dan sebanyak 168.278 merupakan perusahaan lainnya. Tahun 2009 untuk perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kota Bekasi ada 221 perusahaan. Secara keseluruhan jumlah pekerja di sektor Industri Besar dan Sedang berjumlah 52.669 orang dengan jumlah tenaga kerja di sub sektor industri makanan dan minuman menempati jumlah pekerja tertinggi yaitu sebanyak 8.910 pekerja.

Adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki perusahaan menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan investasi sekaligus juga merupakan potensi pajak bagi pemerintah daerah.

Tabel 4.6. Banyaknya Perusahaan Yang Mendapatkan SIUP di Kota Bekasi

Tahun	Jumlah Perusahaan
1999	1.645
2000	2.159
2001	1.477
2002	1.580
2003	2.278
2004	2.710
2005	3.330
2006	3.192
2007	3.411
2008	3.582
2009	2.996
Total	28.360

Sumber: BPS, Kota Bekasi dalam Angka, Data sekunder diolah

Jumlah SIUP yang dikeluarkan juga berkorelasi dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan perusahaan. Pemberian SIUP oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kota Bekasi pada periode tahun 1999-2009 terlihat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Diketahui pada tahun 2009 jumlah perusahaan yang mendapatkan SIUP di Kota Bekasi mengalami penurunan, dimana turun 16,36% dibanding tahun sebelumnya. Secara total dalam kurun waktu 1999-2009 ada sebanyak 28.360 SIUP yang telah dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi.

4.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Bekasi

Kota Bekasi yang dibentuk Tahun 1997 sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bekasi dimana masing-masing wilayah tersebut dalam perkembangannya mempunyai potensi perekonomian yang berbeda. Awalnya, kedua daerah memiliki karakteristik perekonomian yang hampir sama yang ditunjukkan dengan besarnya peranan sektor industri dalam perekonomiannya. Namun, dalam perkembangannya perekonomian Kota Bekasi mengalami

perubahan potensi ekonomi dari sektor industri ke sektor perdagangan dan jasa. Indikator ekonomi yang sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Data PDRB biasanya disajikan secara series dalam suatu periode waktu sehingga dapat diketahui dan dibandingkan perkembangan berbagai sektor perekonomian dari tahun ke tahun. Data PDRB dapat disajikan dalam dua bentuk laporan, yaitu menurut Lapangan Usaha dan menurut Penggunaan yang dihitung Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) atau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Tabel berikut menunjukkan perkembangan perekonomian Kota Bekasi dalam kurun waktu 1996-2010 dilihat dari nilai PDRB yang dihasilkan per tahunnya. Jika dilihat secara keseluruhan dalam kurun waktu 1996-2010, PDRB Kota Bekasi terlihat relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan PDRB-nya.

Tabel 4.7. PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha 1996-2010

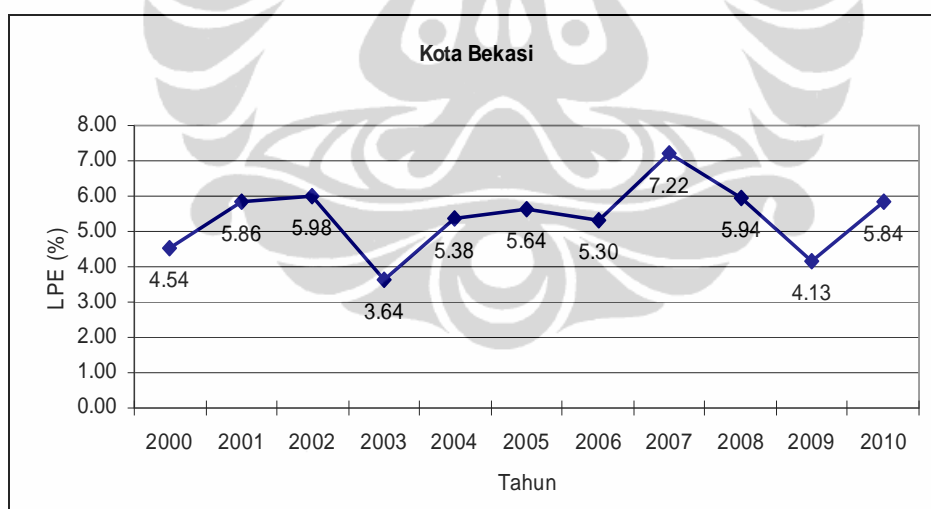
Tahun	PDRB Kota Bekasi (Juta Rupiah)
1996	9,852,958.62
1997	10,414,864.91
1998	8,489,974.70
1999	8,675,373.51
2000	9,069,483.00
2001	9,600,926.00
2002	10,175,298.00
2003	10,545,460.00
2004	11,113,000.00
2005	11,740,000.00
2006	12,362,484.55
2007	13,255,153.53
2008	14,042,404.18
2009	14,622,593.73
2010	15,476,000.00

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Jawa Barat ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota, Data sekunder diolah

PDRB Kota Bekasi tahun 2010 adalah sebesar 15.476.000 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa PDRB Kota Bekasi tahun 2010 mempunyai nilai yang tertinggi selama 14 tahun terakhir. Adanya

fluktuasi nilai PDRB dari tahun 1997-1999 dan ditahun 2009 adalah akibat dampak dari krisis ekonomi dan krisis keuangan global yang terjadi secara berkepanjangan silih berganti yang melanda Indonesia. Terlihat pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi mengalami perlambatan walaupun masih terjadi peningkatan PDRB-nya dari tahun ke tahun.

Perlambatan perekonomian Kota Bekasi sudah terlihat sejak krisis ekonomi tahun 1998 dimana laju pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan dan berfluktuasi. Pada tahun 2002 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi adalah sebesar 5,98 persen. Tahun 2003 laju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,64 persen, kemudian tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,22 dan turun kembali menjadi 5,94 persen pada tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi 2006-2007 menunjukkan kenaikan tren, tetapi sejak 2008 terjadi koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi akibat krisis keuangan global.



Gambar 4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi 2000 – 2010

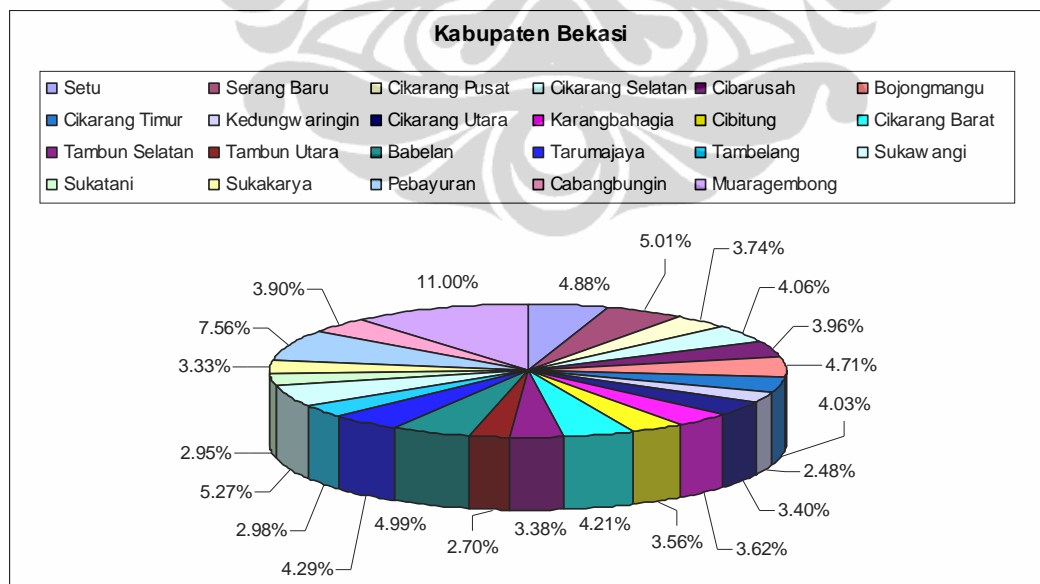
Sumber: BPS Kota Bekasi, Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi, Data sekunder diolah

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi tahun 2009 adalah sebesar 4,13 persen, dibandingkan tahun sebelumnya 5,94 persen terlihat mengalami penurunan. Perlambatan perekonomian Kota Bekasi lebih disebabkan karena dampak krisis keuangan global.

4.2. Wilayah Kabupaten Bekasi

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara geografis terletak pada koordinat $106^{\circ}58'5''$ - $107^{\circ}17'45''$ Bujur Timur dan $05^{\circ}54'50''$ - $06^{\circ}29'15''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.273,88 Km². Batas administrasi wilayah Kabupaten Bekasi adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang.

Wilayah Kabupaten Bekasi terbagi menjadi 23 kecamatan yang meliputi 5 kelurahan dan 182 desa. Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi adalah Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Karangbahagia, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin dan Muaragembong.



Gambar 4.5. Prosentase Luas Wilayah Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan 2010

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi dalam Angka 2011, Data sekunder diolah

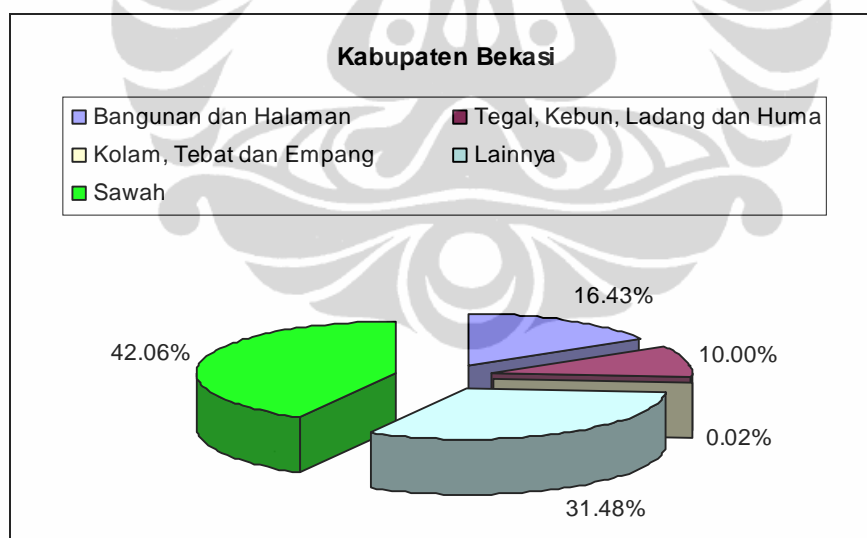
Luas wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 1.273,88 Km² dimana kecamatan dengan wilayah terbesar adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas 140,09 Km² (11%) kepadatan penduduk 253 jiwa/ Km², sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kedungwaringin dengan luas 31,53 Km² (2,48%) kepadatan penduduk 1.765 jiwa/ Km². Diagram diatas menunjukkan data prosentase luas wilayah Kabupaten Bekasi menurut Kecamatan pada tahun 2010.

Satu hal yang bisa dilihat dan menjadi ciri wilayah suburban adalah tingginya prosentase wilayah terbangun terhadap luas wilayah dipinggiran kota. Wilayah terbangun merupakan wilayah yang memiliki karakteristik penggunaan tanah perkotaan, yaitu ditandai dengan adanya permukiman dan bangunan lainnya, seperti perkantoran, kegiatan industri dan perdagangan. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah terbangun yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

Luas wilayah terbangun Kabupaten Bekasi tahun 2006 adalah 36.810 Ha dengan persentase terhadap luas wilayah seluruhnya sebesar 32,5%. Meningkat lebih dari 5% sejak tahun 1996, yaitu dengan luas 30.433 Ha atau sebesar 27,7% wilayah terbangun. Penyebaran wilayah terbangun di Kabupaten Bekasi mengalami perubahan dari tahun 1996 hingga 2006. Perubahan tersebut terletak pada perluasan wilayah terbangun dan peningkatan luas wilayah pada setiap desanya. Pada tahun 1996 Desa Babelan Kota di Kecamatan Babelan memiliki persentase wilayah terbangun terendah, yaitu hanya sebesar 1% dari keseluruhan luas wilayahnya yang memiliki penggunaan wilayah terbangun. Jauh berbeda dari Desa Babelan Kota, Desa Sukaresmi di Kecamatan Cikarang Selatan memiliki persentase wilayah terbangun sebesar 99% dari luas wilayahnya. Pada tahun 2006, Desa Pantai bakti di Kecamatan Muaragembong dan Desa Sindang jaya di Kecamatan Cabungin memiliki persentase wilayah terbangun terendah, yaitu sebesar 2% dari luas wilayahnya masing-masing. Persentase wilayah terbangun 100% terjadi pada tahun 2006, dimana beberapa desa memiliki wilayah yang keseluruhannya adalah wilayah terbangun. Desa-desa tersebut adalah Desa Sukadanau dan Danau Indah di Kecamatan Cikarang Barat; Desa Setiadarma,

Tridayasakti dan Mangunjaya di Kecamatan Tambun Selatan; serta Desa Harjamekar dan Karangbaru di Kecamatan Cikarang Utara.

Penggunaan tanah dibedakan atas tanah sawah dan tanah kering. Tahun 2010 luas wilayah Kabupaten Bekasi mencapai 127.388 Ha dimana persentase penggunaan tanah sawahnya adalah sebesar 42,06% (53.584 Ha), sisanya sebesar 57,94% (73.804 Ha) berupa tanah kering. Wilayah Kabupaten Bekasi dengan tanah sawah terluas adalah Kecamatan Pebayuran (6.827 Ha) kemudian Sukawangi (4.801 Ha) dan Cabungin (3.313 Ha). Penggunaan tanah kering paling banyak untuk bangunan dan halaman. Penggunaan tanah kering untuk bangunan dan halaman yang paling luas ada di Kecamatan Cikarang Barat, yaitu mencapai 1.856 Ha, kemudian Kecamatan Cikarang Selatan 1.758 Ha dan Cibitung sebesar 1.680 Ha. Untuk hutan rakyat meliputi 4,03 % dari luas lahan kering dan dapat ditemui di Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cikarang Barat, dan Muara Gembong.



Gambar 4.6. Luas Tanah Kering dan Tanah Sawah Kabupaten Bekasi Menurut Penggunaannya 2010

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi dalam Angka 2011, Data sekunder diolah

Diagram diatas menunjukkan data luas tanah kering dan tanah sawah menurut penggunaannya pada tahun 2010 di wilayah Kabupaten Bekasi. Dalam diagram tersebut terlihat dari luas wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 127.388 Ha,

penggunaan tanah terbesar adalah untuk tanah sawah, yaitu sebesar 42,06% (53.584 Ha). Penggunaan tanah terbesar kedua adalah untuk fungsi tanah lainnya, yaitu sebesar 31,48% (40.097 Ha), yang dimaksud fungsi tanah lainnya adalah berupa hutan negara, rawa-rawa, tambak, padang rumput, tanah yang sementara tidak diusahakan, hutan rakyat tanaman kayu-kayuan, perkebunan dan lainnya. Kemudian untuk bangunan dan halaman sebesar 16,43% (20.935 Ha).

Dari data-data ini terlihat bahwa sebagian besar tanah yang masih tersisa di Kabupaten Bekasi digunakan untuk tanah sawah dan fungsi tanah lainnya. Hal ini dapat dimengerti karena luas wilayah Kabupaten Bekasi yang mencapai enam kali luas Kota Bekasi sehingga dalam periode tertentu pembangunan tidak sepesat Kota Bekasi. Namun demikian tren data statistik menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan penggunaan tanah sawah dan fungsi tanah lainnya dalam satu dekade ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penggunaan tanah bangunan dan halaman dari tahun ke tahun di Kabupaten Bekasi. Penggunaan tanah kering tersebut sebagian besar digunakan untuk permukiman penduduk yang berdampak pada banyaknya bangunan perumahan, kantor dan industri di wilayah Kabupaten Bekasi.

Meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bekasi telah memberikan pengaruh terhadap meluasnya kawasan pemukiman di Kabupaten Bekasi. Menurut data Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, jumlah realisasi pembangunan rumah dan ruko tahun 2010 di Kabupaten Bekasi ada sebanyak 22.911 unit. Wilayah realisasi pembangunan paling banyak berada di Kecamatan Cikarang Utara, yaitu sejumlah 3.333 unit kemudian Tambun Selatan sebanyak 2.793 unit, Cikarang Selatan sebanyak 2.425 unit, Cibitung 2.243 unit, Tambun Utara 2.199 unit, Serang Baru sebanyak 1.912 unit, Babelan sebanyak 1.431 unit, Kedungwaringin sebanyak 1.320 unit, Setu sebanyak 1.229 unit, Karangbahagia sebanyak 967 unit, Tarumajaya sebanyak 765 unit, Cibarusah sebanyak 658 unit, Sukatani sebanyak 605 unit, Cikarang Barat sebanyak 553 unit, Cikarang Timur sebanyak 373 unit dan Cikarang Pusat sebanyak 105 unit.

Tabel 4.8. Pembangunan Rumah dan Ruko di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Rumah dan Ruko (unit)
2004	96.302
2005	115.501
2006	137.320
2007	n/a
2008	19.758
2009	37.225
2010	22.911
Total	429.017

Sumber: BPS, Kabupaten Bekasi dalam Angka, Data sekunder diolah

Kawasan pemukiman akan turut mengalami perkembangan seiring dengan adanya penambahan penduduk. Pertambahan penduduk di daerah pemukiman dapat terjadi karena adanya suburbanisasi penduduk dari pusat kota dan wilayah sekitarnya. Dari data penyebaran dan kepadatan penduduk terlihat bahwa lahan pemukiman di wilayah Kabupaten Bekasi yang seluas 127.388 Ha, terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Tambun Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Tambun Selatan dan Cikarang Barat.

4.2.1. Kependudukan Kabupaten Bekasi

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 adalah sebanyak 2.630.401 orang yang tersebar di 23 wilayah kecamatan Kabupaten Bekasi. Dari hasil sensus tersebut diketahui pula bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 417.008 orang (15,85%) dengan kepadatan penduduknya 9.675 jiwa/Km², Cikarang Utara sebanyak 230.563 orang (8,77%) kepadatan penduduk 5.325 jiwa/Km², Cikarang Barat sebanyak 211.578 orang (8,04%) kepadatan penduduk 3.941 jiwa/Km², Kecamatan Babelan sebanyak 209.564 orang (7,97%) kepadatan penduduk 3.295 jiwa/Km² dan Cibitung sebanyak 195.566 kepadatan penduduk 4.317 jiwa/Km².

Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi yang paling sedikit berada di Kecamatan Bojongmangu, yaitu sebesar 25.033 orang (0,95%) dengan kepadatan penduduk

417 jiwa/Km², Tambelang sebesar 35.376 orang (1,34%) kepadatan penduduk 933 jiwa/Km² dan Muaragembong sebesar 35.503 orang (1,35%) dengan kepadatan penduduk 253 jiwa/Km². Dari data-data ini dapat diketahui bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi masih di dominasi di Kecamatan Tambun Selatan, Cikarang Utara dan Cikarang Barat.

Tabel 4.9. Kabupaten Bekasi Menurut Kecamatan Tahun 2010

Kecamatan Kabupaten Bekasi	Luas Wilayah (Km ²)	Luas Wilayah (%)	Jumlah Penduduk (orang)	Jumlah Penduduk (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Jumlah Rumah Tangga
Setu	62.16	4.88	111,670	4.25	1,796	29,191
Serang Baru	63.80	5.01	103,587	3.94	1,624	28,888
Cikarang Pusat	47.60	3.74	56,756	2.16	1,192	15,955
Cikarang Selatan	51.74	4.06	143,030	5.44	2,764	45,949
Cibarusah	50.39	3.96	74,587	2.84	1,480	19,183
Bojongmangu	60.06	4.71	25,033	0.95	417	7,740
Cikarang Timur	51.31	4.03	91,326	3.47	1,780	24,433
Kedungwaringin	31.53	2.48	55,654	2.12	1,765	13,692
Cikarang Utara	43.30	3.40	230,563	8.77	5,325	69,505
Karangbahagia	46.10	3.62	90,654	3.45	1,966	22,042
Cibitung	45.30	3.56	195,566	7.43	4,317	52,146
Cikarang Barat	53.69	4.21	211,578	8.04	3,941	63,564
Tambun Selatan	43.10	3.38	417,008	15.85	9,675	108,787
Tambun Utara	34.42	2.70	137,099	5.21	3,983	33,491
Babelan	63.60	4.99	209,564	7.97	3,295	50,669
Tarumajaya	54.63	4.29	109,296	4.16	2,001	26,556
Tambelang	37.91	2.98	35,376	1.34	933	8,265
Sukawangi	67.19	5.27	43,119	1.64	642	10,428
Sukatani	37.52	2.95	70,299	2.67	1,874	16,969
Sukakarya	42.40	3.33	42,468	1.61	1,002	10,619
Pebayuran	96.34	7.56	92,821	3.53	963	22,807
Cabangbungin	49.70	3.90	47,844	1.82	963	11,600
Muaragembong	140.09	11.00	35,503	1.35	253	8,337
Kab.Bekasi (SP 2010)	1,273.88	100.00	2,630,401	100.00	2,065	700,816
Kab.Bekasi (SP2000)	1,273.88		1,668,494		1,310	366,027

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi dalam Angka 2011, Data sekunder diolah

Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 melaporkan populasi wilayah perkotaan/urban Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 967.740 orang sedangkan populasi wilayah perdesaan/rural Kabupaten Bekasi ada sebanyak 700.754 orang. Jumlah penduduk non migran ada sejumlah 1.249.635 orang dan migran masuk ada sejumlah 418.859 orang. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kabupaten Bekasi ada

sejumlah 1.668.494 orang dimana selama periode tahun 1990-2000 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 4.25% per tahun dan periode tahun 2000-2010 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 4.66%. Terlihat pada selama dua dekade pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi konstan meningkat dan terjadi penambahan penduduk di wilayah Kota Bekasi dari tahun ke tahun.

Jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 2.630.401 orang, dapat terlihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi kenaikan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi cukup tinggi walaupun laju pertumbuhan penduduknya sebesar 4,66% per tahun (periode 2000-2010). Keberadaan penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi menurut kecamatan tidak menyebar secara merata. Penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu 15,85% sedangkan paling sedikit di Kecamatan Bojongmangu 0,95%.

Dengan luas wilayah Kabupaten Bekasi sekitar 1.273,88 Km² yang didiami oleh 2.630.401 orang, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi adalah sebesar 2.065 jiwa/Km². Wilayah Kabupaten Bekasi yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan dimana kepadatannya mencapai 9,675 jiwa/Km². Sedangkan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Muaragembong dengan kepadatan 253 jiwa/Km².

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi per tahun selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 adalah sebesar 4,69%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Cikarang Selatan adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Bekasi yakni sebesar 9,46%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Cabungin yakni sebesar 0,19% diikuti Kecamatan Serang Baru sebesar 7,71%. Kecamatan Tambun Selatan walaupun menempati urutan pertama dari jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi namun dari sisi laju pertumbuhan penduduk berada pada urutan kedua belas sebesar 4,52%.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan populasi di wilayah Kabupaten Bekasi selama dua dekade terakhir.

Tabel 4.10. Populasi Kabupaten Bekasi Tahun 1990 - 2010

Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
1990	1,100,742	864	4,25	1990-2000
1991	1,168,498	917		
1992	1,228,011	964		
1993	1,289,857	1,013		
1994	1,354,095	1,063		
1995	1,389,972	1,091		
1996	1,503,753	1,180		
1997	1,544,900	1,213		
1998	1,613,195	1,266		
1999	1,685,175	1,323		
2000	1,668,494	1,310	4,66	2000-2010
2001	1,681,043	1,320		
2002	1,727,066	1,356		
2003	1,877,414	1,474		
2004	1,950,209	1,531		
2005	2,027,902	1,592		
2006	2,054,795	1,613		
2007	2,125,960	1,669		
2008	2,193,776	1,722		
2009	2,274,842	1,786		
2010	2,630,401	2,065		

Sumber: BPS, Kabupaten Bekasi dalam Angka, SP 2000, 2010, Data sekunder diolah

4.2.2. Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja pun turut meningkat. Berdasarkan data statistik BPS, jumlah angkatan kerja Kabupaten Bekasi tahun 1990 adalah sebesar 713,024 orang sedangkan pada tahun 2010 telah mencapai 1,257,416 orang dan tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Penduduk yang berumur 15 tahun keatas adalah mereka yang digolongkan sebagai usia kerja. Pada tahun 2010 kelompok usia ini berjumlah 1.790.897 orang atau 68,08% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bekasi. Sementara itu, pencari kerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja tercatat 29.682 orang. Mereka paling banyak kelompok wanita 15.563 orang atau 52,43%. Dari pencari kerja tersebut yang sudah mendapat penempatan berjumlah 4.644

orang atau 15,65%. Dari jumlah ini dibandingkan dengan tahun 2009, penempatan pencari kerja tahun 2010 mengalami peningkatan.

Pada tabel data dibawah ini terlihat dalam kurun waktu tahun 1990-2010 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bekasi mengalami fluktuasi peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah penduduknya. Terlihat adanya hubungan fungsional antara kenaikan jumlah penduduk dengan kenaikan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bekasi.

Tabel 4.11. Angkatan Kerja Kabupaten Bekasi Tahun 1990 - 2010

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja
1990	713,024
1991	756,669
1992	767,769
1993	1,278,733
1994	917,058
1995	1,088,236
1996	1,721,415
1997	462,604
1998	493,148
1999	467,579
2000	753,610
2001	710,317
2002	714,579
2003	775,626
2004	779,044
2005	798,380
2006	818,976
2007	834,784
2008	985,334
2009	1,017,208
2010	1,257,416

Sumber: BPS, Kab. Bekasi dalam Angka, Data sekunder diolah

Jika kita membandingkan jumlah angkatan kerja Kabupaten Bekasi tahun 2010 sebesar 1,257,416 orang dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2010, yaitu sejumlah 2,630,401 orang maka dapat diketahui bahwa 47,80% penduduk Kota Bekasi merupakan angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah tenaga-tenaga kerja yang bekerja di berbagai sektor perkonomian di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dari hasil Sensus Penduduk tahun 2000 diketahui bahwa di Kabupaten Bekasi jumlah angkatan kerja perkotaan ada sebanyak 453.710 orang dan angkatan kerja perdesaaan ada sebanyak 299.900 orang. Sektor ekonomi yang utama dan berkembang dengan pesat di Kabupaten Bekasi adalah sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Di sektor-sektor inilah terjadi banyak penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan. Data statistik BPS yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12. Banyaknya Pencari Kerja Yang Terdaftar di Kabupaten Bekasi

Tahun	Pencari Kerja (orang)	Penempatan Kerja (orang)
2006	16.849	2.030
2007	13.157	8.048
2008	38.738	2.514
2009	39.125	4.312
2010	29.682	4.644

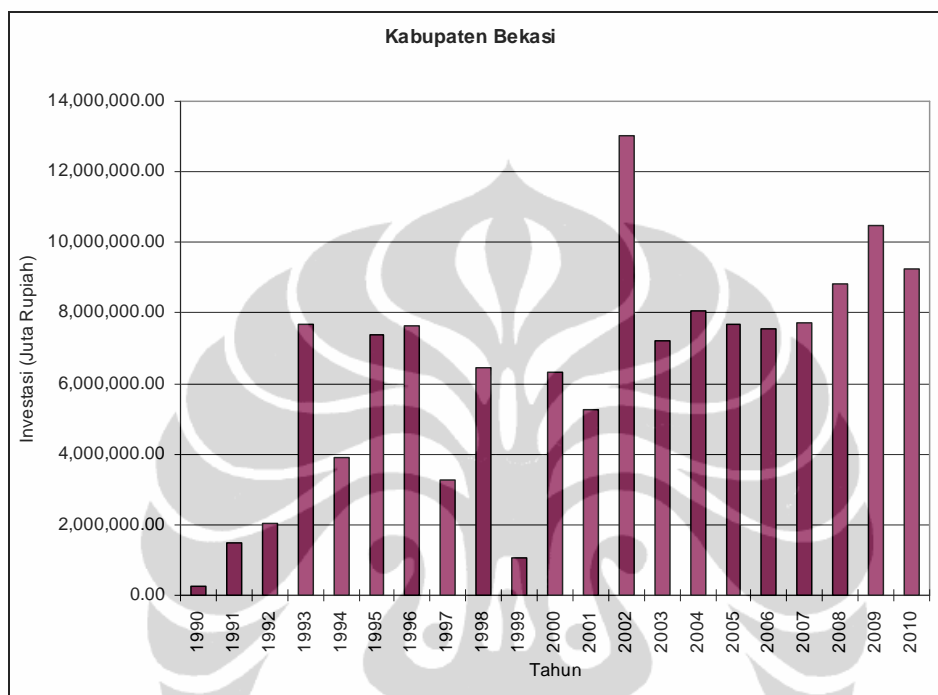
Sumber: BPS, Kabupaten Bekasi dalam Angka, Data sekunder diolah

Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, pada tahun 2010 jumlah pencari kerja terdaftar ada sejumlah 29.682 orang sedangkan tahun 2009 ada sejumlah 39.125 orang, ada peningkatan jumlah tenaga kerja pada periode tersebut. Sebagian besar pencari kerja tersebut adalah mereka yang berpendidikan SLTA, yaitu 12.163 orang dan Akademi/DIII sejumlah 1.666 orang dan Perguruan Tinggi sejumlah 3.159 orang. Namun kenyataannya jumlah mereka yang diterima bekerja hanya sekitar 4.644 orang, 1.953 orang diantaranya berpendidikan tamat SLTA, sebanyak 134 orang berpendidikan Akademi dan sebanyak 161 orang perguruan tinggi.

4.2.3. Investasi Kabupaten Bekasi

Diagram dibawah ini memperlihatkan kegiatan investasi yang terjadi di Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu tahun 1990 sampai 2010. Dalam kurun waktu tersebut investasi Kabupaten Bekasi terlihat mengalami peningkatan yang cukup berarti walaupun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 1990 nilai investasi di Kabupaten Bekasi sebesar 234,882.69 juta rupiah, di tahun 2010

nilai investasi Kabupaten Bekasi sebesar 9,266,438.26 juta rupiah. Dalam dua dekade telah terjadi peningkatan nilai investasi Kabupaten Bekasi yang signifikan jika dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 1990. Pertumbuhan investasi terlihat lambat karena terjadi fluktuasi investasi selama kurun waktu tersebut.



Gambar 4.7. Investasi Kabupaten Bekasi 1990-2010

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, BPS Jawa Barat, Data sekunder diolah

Fluktuasi nilai investasi terendah terjadi pada tahun 1999 dimana investasi di Kabupaten Bekasi menjadi sebesar 1,058,970.14 juta rupiah. Hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia. Secara rata-rata tren investasi Kabupaten Bekasi selama dua dekade mengalami peningkatan di tahun 2010 jika dibandingkan dari tahun 1990.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi dapat menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Bekasi. Jumlah TDP yang dikeluarkan akan berhubungan juga dengan jumlah tenaga kerja yang diserap perusahaan. Penerbitan TDP oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi pada periode tahun 2006-

2010 relatif menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui tahun 2009 TDP yang dikeluarkan di Kabupaten Bekasi mencapai 3.184, namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 2.811, yaitu sebanyak 11,71% dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2010 untuk sektor industri pengolahan, TDP yang dikeluarkan adalah sejumlah 126 sedangkan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sejumlah 182. Secara total dalam kurun waktu 2006-2010 ada sebanyak 12.231 TDP yang telah dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bekasi.

Tabel 4.13. Banyaknya Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang Diterbitkan di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Perusahaan
2006	1.619
2007	1.547
2008	3.070
2009	3.184
2010	2.811
Total	12.231

Sumber: BPS, Kabupaten Bekasi dalam Angka, Data sekunder diolah

4.2.4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Bekasi

Kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Bekasi dapat diketahui melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh Kabupaten Bekasi. PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu periode waktu tertentu. Dalam hal ini PDRB dapat dilihat dari dua sisi pendekatan, yaitu secara sektoral dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber pendapatan dan menurut komponen penggunaan. PDRB dari sisi sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Dalam Tabel 4.14. di bawah ini, jika dilihat trennya secara keseluruhan pada periode 1990-2010, PDRB Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan PDRB-nya. PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2010 adalah sebesar 54,989,410.00 juta rupiah, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat bahwa PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2010 mempunyai nilai yang tertinggi selama dua dekade terakhir. Adanya fluktuasi nilai PDRB dari tahun 1997-1999 dan ditahun 2009 adalah akibat dampak dari krisis ekonomi dan krisis keuangan global yang terjadi secara berkepanjangan silih berganti yang melanda Indonesia. Terlihat pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi mengalami pola yang berbeda. Kondisi ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi mengalami perlambatan walaupun tetap masih terjadi peningkatan PDRB yang signifikan dari tahun ke tahun.

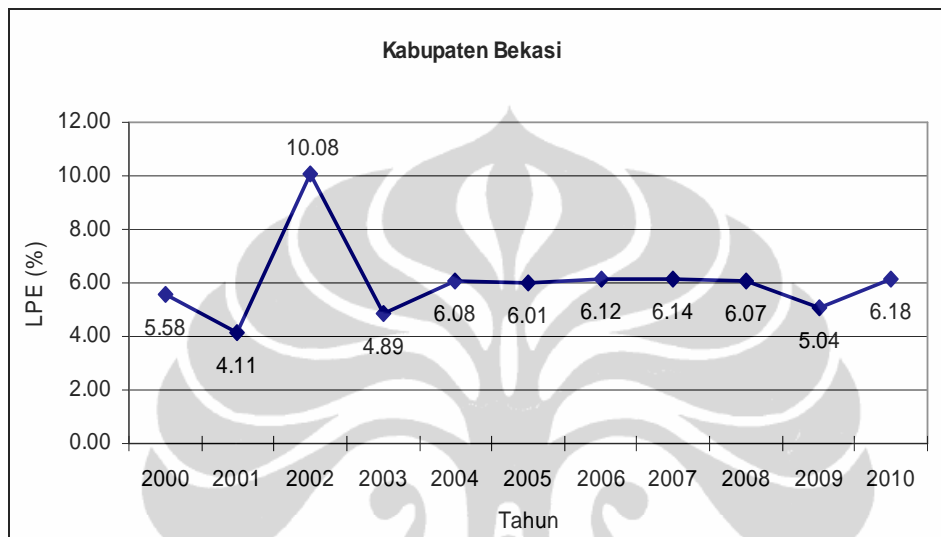
Tabel 4.14. PDRB Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Usaha 1990-2010

Tahun	PDRB Kabupaten Bekasi (Juta Rupiah)
1990	10,181,895.18
1991	11,453,886.23
1992	13,240,298.47
1993	15,370,826.87
1994	16,501,980.54
1995	18,856,813.15
1996	21,129,059.15
1997	21,823,418.21
1998	28,253,554.70
1999	28,914,687.88
2000	30,528,127.49
2001	31,783,599.91
2002	34,987,215.16
2003	36,696,913.71
2004	38,927,471.82
2005	41,267,788.74
2006	43,793,374.65
2007	46,481,291.50
2008	49,302,484.58
2009	51,789,567.15
2010	54,989,410.00

Sumber: BPS, PDRB Provinsi Jawa Barat ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota, Data sekunder diolah

Perlambatan perekonomian Kabupaten Bekasi sudah terlihat sejak krisis ekonomi tahun 1997 dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai

tahun 1999 kemudian mulai naik pada tahun 2000. Pada tahun 2000 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi sebesar 5,58%. Tahun 2001 – 2003 mengalami fluktuasi dari 4,11% naik ke 10,08% dan kembali turun menjadi 4,89% di tahun 2003. Pada tahun 2004 naik lagi menjadi 6,08% dan kemudian sampai tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi terlihat relatif stabil.



Gambar 4.8. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi 2000 – 2010

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi Dalam Angka, Data sekunder diolah

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi 2000-2010 menunjukkan tren yang stabil dimana terjadi fluktuasi tahun 2003 dan 2009, ini akibat adanya krisis keuangan global. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2010 adalah sebesar 6,18%, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,04% terjadi penurunan. Fluktuasi dan perlambatan perekonomian Kabupaten Bekasi lebih banyak disebabkan oleh dampak krisis ekonomi dan keuangan global.

BAB 5

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

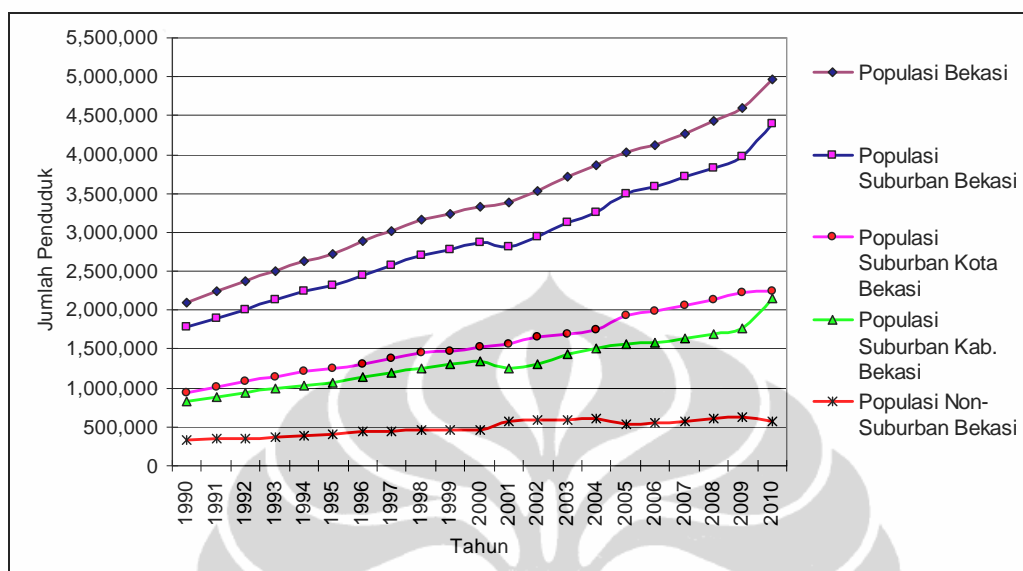
5.1. Analisis Deskriptif

Dari hasil analisis data profil masing-masing wilayah kecamatan dan karakteristik populasi Bekasi dari total 35 Kecamatan di wilayah Bekasi (12 Kecamatan Kota Bekasi dan 23 Kecamatan Kabupaten Bekasi) diidentifikasi ada 25 Kecamatan di wilayah Bekasi yang merupakan wilayah suburban (11 Kecamatan Kota Bekasi dan 14 Kecamatan Kabupaten Bekasi), yaitu tempat terjadinya suburbanisasi selama tahun 1990 hingga 2010. Kecamatan yang merupakan wilayah suburban di Kota Bekasi adalah Pondok Gede, Jati Sampurna, Pondok Melati, Jati Asih, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawa Lumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara. Sedangkan kecamatan wilayah suburban di Kabupaten Bekasi adalah Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cibarusah, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan dan Tarumajaya. Di wilayah suburban inilah proses suburbanisasi terjadi selama dua dekade.

Penduduk berperan penting dan merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya fenomena suburbanisasi di suatu wilayah. Adanya suburbanisasi penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari pusat kota ke subpusat kota telah menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan di wilayah suburban. Migrasi penduduk dari pusat kota ke sub-pusat kota yang bertujuan untuk tinggal menetap di wilayah suburban telah membentuk komunitas penduduk dan peningkatan populasi suburban. Peningkatan populasi di wilayah suburban dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa proses suburbanisasi sedang dan terus terjadi.

Data grafik pada gambar 5.1. di bawah ini merupakan informasi yang menunjukkan terjadinya proses suburbanisasi dan kondisi populasi di wilayah

Bekasi, yaitu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama dua dekade pada periode tahun 1990 hingga 2010.



Gambar 5.1. Populasi Bekasi 1990-2010

Sumber: BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi, Data sekunder diolah

Analisis grafik diatas menunjukkan berdasarkan wilayah, populasi Bekasi (Kota dan Kabupaten Bekasi) terbagi atas dua kelompok, yaitu populasi suburban dan populasi non-suburban. Jumlah penduduk di wilayah suburban Bekasi terlihat lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di wilayah non-suburban Bekasi. Pada wilayah suburban Bekasi peningkatan populasi suburban secara signifikan telah terjadi mulai tahun 1990 hingga 2010. Pada tahun 1990 populasi suburban Bekasi berjumlah 1.782.036 orang, tahun 2000 berjumlah 2.875.415 orang dan di tahun 2010 menjadi 4.387.816 orang. Hal ini direfleksikan oleh tren populasi suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang terus mengalami kenaikan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Selama dua dekade jumlah penduduk suburban di wilayah Bekasi telah mengalami peningkatan sebanyak 2,5 kali jumlah penduduk suburban pada tahun 1990. Peningkatan populasi suburban yang signifikan menunjukkan terjadinya proses suburbanisasi di wilayah suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama tahun 1990 hingga 2010.

Jika peningkatan jumlah penduduk di kedua wilayah suburban kita bandingkan, maka dapat dilihat bahwa jumlah populasi suburban Kota Bekasi lebih banyak dari pada jumlah populasi suburban Kabupaten Bekasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan lokasi pemukiman bagi penduduk urban (Jakarta) dan lokasi untuk kegiatan industri bagi perusahaan lebih cenderung di wilayah Kota Bekasi dari pada Kabupaten Bekasi. Kondisi ini membuat Kota Bekasi menjadi jauh lebih padat penduduknya dibandingkan Kabupaten Bekasi. Kepadatan penduduk ini juga dipengaruhi wilayah Kabupaten Bekasi yang jauh lebih luas dari Kota Bekasi, yaitu mencapai enam kali luas Kota Bekasi.

Grafik diatas menunjukkan bahwa di wilayah Bekasi jumlah populasi suburban jauh lebih besar dibandingkan jumlah populasi non-suburban, yaitu penduduk yang bermukim di wilayah yang bukan suburban, misalnya di daerah-daerah pedesaan. Dalam grafik tersebut juga terlihat jumlah penduduk di wilayah non-suburban Bekasi selama dua dekade terakhir tidak menunjukkan peningkatan yang berarti. Hal ini ditunjukkan oleh tren grafik populasi non-suburban Bekasi yang cenderung datar dengan fluktuasi yang sangat kecil dari tahun 1990 hingga 2010.

Kondisi kependudukan wilayah suburban Bekasi dapat dikatakan merefleksikan kondisi kependudukan seluruh wilayah Bekasi karena sebagian besar populasi berada di wilayah suburban. Dari data statistik diketahui keseluruhan populasi Bekasi mayoritas penduduknya tinggal dan menetap di kecamatan-kecamatan wilayah suburban Bekasi. Kepadatan penduduk di wilayah suburban Kota Bekasi tahun 2010 adalah 11.583 jiwa/Km², sedangkan di wilayah non-suburbannya adalah 5.628 jiwa/Km². Sementara di Kabupaten Bekasi, kepadatan penduduk di wilayah suburban tahun 2010 adalah 3.083 jiwa/Km², sedangkan di wilayah non-suburbannya adalah 837 jiwa/Km². Dari perbandingan ini dapat diketahui bahwa wilayah suburban Bekasi jauh lebih padat penduduknya dibandingkan wilayah non-suburban Bekasi.

Dari hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui jumlah penduduk Kota Bekasi adalah sebanyak 2.336.489 orang. Dengan luas wilayah 210,49 Km² yang didiami oleh

2.336.489 orang, kepadatan penduduk Kota Bekasi tahun 2010 mencapai 11.100 jiwa/Km². Penyebaran penduduk di Kota Bekasi belum merata karena tempat bermukim penduduk masih didominasi di empat wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 310.198 orang (13,28%), Bekasi Barat sebanyak 270.569 orang (11,58%), Bekasi Timur sebanyak 248.046 orang (10,62%) dan Kecamatan Pondok Gede sebanyak 246.413 orang (10,55%). Sementara Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 jumlah penduduknya adalah 2.630.401 orang dengan jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tambun Selatan, yaitu sebanyak 417.008 orang (15,85%), Cikarang Utara sebanyak 230.563 orang (8,77%), Cikarang Barat sebanyak 211.578 orang (8,04%), Kecamatan Babelan sebanyak 209.564 orang (7,97%) dan Cibitung sebanyak 195.566 (7,43%). Dengan luas wilayah Kabupaten Bekasi sekitar 1.273,88 Km² yang didiami oleh 2.630.401 orang, kepadatan penduduk Kabupaten Bekasi tahun 2010 mencapai 2.065 jiwa/Km². Distribusi penduduk menurut kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi juga belum merata, penduduk paling banyak berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi pada periode 1990-2000 adalah sebesar 5,18% per tahun sedangkan periode 2000-2010 sebesar 3,45% per tahun. Sementara laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi pada periode 1990-2000 adalah sebesar 4,25% per tahun dan periode 2000-2010 sebesar 4,66% per tahun. Terlihat di Kota Bekasi selama dua dekade walaupun terjadi peningkatan dalam hal jumlah penduduk namun laju pertumbuhan penduduknya terlihat turun sebesar 1,73%. Berbeda dengan Kabupaten Bekasi laju pertumbuhan penduduknya naik sebesar 0,41%. Kondisi ini mengindikasikan Kota Bekasi saat ini sudah padat penduduknya sedangkan Kabupaten Bekasi masih belum padat.

Jika dianalisis dari sisi datangnya penduduk urban ke wilayah suburban, maka proses peningkatan jumlah penduduk dapat terlihat dari adanya migrasi penduduk dari pusat kota Jakarta ke subpusat kota, yaitu wilayah suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Jumlah penduduk Propinsi DKI Jakarta pada Sensus Penduduk Tahun 1990 ada sebanyak 8.259.300 orang, jika dibandingkan dengan hasil

Sensus Penduduk 2000, yaitu sejumlah 8.347.083 orang, maka laju pertumbuhan penduduk Propinsi DKI Jakarta dalam sepuluh tahun (periode tahun 1990-2000) sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,11% per tahun. Pada tahun 2010 jumlah penduduk DKI Jakarta sudah menjadi sebanyak 9.588.198 orang. Jika kita bandingkan dengan jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2000 maka laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta periode 2000-2010 adalah sebesar 1,40% per tahun. Walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk dalam periode ini namun laju pertumbuhannya masih terlihat kecil. Selama dua dekade (1990-2010), secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta sebesar 0,75% per tahun, prosentase ini untuk kurun waktu 20 tahun termasuk kecil.

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta periode 1990-2000 relatif kecil, yaitu sebesar 0,11% per tahun. Salah satu faktor penyebabnya adalah migrasi neto yang negative dan hal ini hampir tidak terlihat dalam kegiatan sehari-hari karena banyaknya penduduk bodetabek yang beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta. Penduduk bodetabek yang beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta ini disebut masyarakat komuter atau penglaju atau ulang-alik. Hasil Survei Migrasi Jabotabek 2001 yang dilaksanakan BPS Provinsi DKI Jakarta pada pertengahan tahun 2001 menunjukkan bahwa penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang beraktivitas (bekerja, sekolah, dan kursus) di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 1.017.339 orang. Sebanyak 1.012.435 orang berumur 10 tahun ke atas dan selebihnya berusia antara 5-9 tahun.

Beberapa argumen menurunnya laju pertumbuhan penduduk Jakarta, antara lain sebagai akibat dari keberhasilan program keluarga berencana dan menurunnya jumlah penduduk urban yang tinggal menetap (berdomisili) di Jakarta. Dengan dukungan infrastruktur dan sarana transportasi yang semakin membaik selama dua dekade, para penduduk urban meninggalkan Jakarta dan menuju pemukiman disekitar pinggiran Jakarta (wilayah suburban). Rendahnya laju pertumbuhan penduduk Jakarta juga disebabkan karena rendahnya tingkat fertilitas namun terutama disebabkan lebih banyak penduduk Provinsi DKI Jakarta yang bermigrasi keluar dibanding migrasi penduduk yang masuk.

**Tabel 5.1. Arus Migrasi Provinsi DKI Jakarta 1975 – 2000
(ribuan orang)**

Periode	Migrasi Masuk	Migrasi Keluar	Migrasi Neto
1975 - 1980	760,1	382,3	377,8
1985 - 1990	819,6	993,4	-173,8
1990 - 1995	592,6	823,0	-230,4
1995 - 2000	702,2	850,4	-148,2

Sumber: Bappeda DKI Jakarta

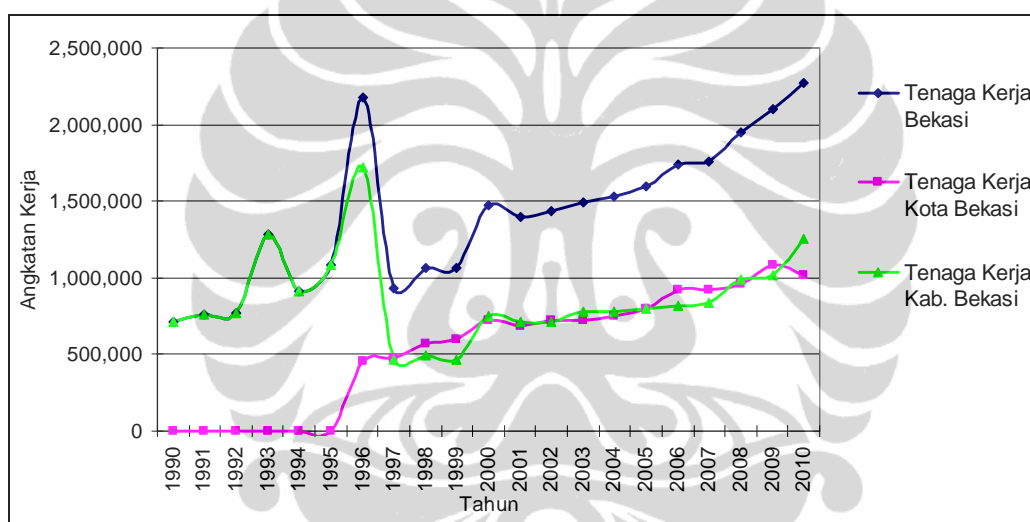
Tabel diatas menunjukkan bahwa sejak periode tahun 1985-1990 telah terjadi perubahan pada arus migrasi di Provinsi DKI Jakarta, yang tadinya arus migrasi masuknya lebih besar dibanding arus migrasi keluaranya, berubah menjadi arus migrasi keluaranya lebih besar dibanding migrasi masuknya. Terlihat pada periode sebelumnya, yaitu 1975-1980 jumlah migrasi penduduk masuk (760,1 ribu orang) lebih besar dari jumlah migrasi penduduk keluar (382,3 ribu orang) namun setelah periode tersebut terjadi sebaliknya. Kondisi ini berlangsung terus selama 15 tahun sampai periode 1995-2000. Migrasi keluar merupakan fenomena suburbanisasi penduduk yang terjadi dari pusat kota Jakarta ke subpusat kota, yaitu daerah pinggiran di wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).

Alasan utama perpindahan penduduk urban dari Jakarta ke wilayah Bodetabek adalah karena masalah perumahan dan kenyamanan lingkungan. Perpindahan penduduk ini juga didukung karena berkembangnya sarana dan prasarana perumahan di wilayah Bodetabek yang memadai dan tersedianya sarana dan prasarana angkutan umum yang cukup banyak dan beragam serta infrastruktur jaringan jalan, terutama jalan tol yang menjadi akses bagi kegiatan mobilitas (komuter) penduduk dari subpusat kota ke pusat kota begitu juga sebaiknya.

Dari analisa data penelitian yang diperoleh, adanya peningkatan jumlah penduduk di wilayah Bekasi ternyata sejalan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Kondisi ini mencoba menunjukkan bahwa suburbanisasi penduduk yang terjadi di wilayah suburban Bekasi telah mendorong terjadinya suburbanisasi tenaga kerja di wilayah Bekasi. Terciptanya berbagai lapangan pekerjaan di wilayah Bekasi memberi dampak pada tumbuh dan

meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di wilayah tersebut. Hal ini mendorong terjadinya suburbanisasi tenaga kerja ke wilayah Bekasi. Tenaga kerja yang datang dan bekerja di wilayah Bekasi kemudian akan mencari tempat bermukim yang dekat dengan lokasi pekerjaannya. Peningkatan jumlah tenaga kerja di wilayah Bekasi dari tahun ke tahun selama dua dekade menunjukkan adanya proses suburbanisasi yang terus terjadi di wilayah Bekasi.

Data pada gambar 5.2 di bawah ini merupakan informasi yang menunjukkan kondisi ketenagakerjaan ditinjau dari jumlah angkatan kerja yang terdapat di wilayah Bekasi, yaitu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi tahun 1990-2010.



Gambar 5.2. Tenaga Kerja Bekasi 1990-2010

Sumber: BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi, Data sekunder diolah

Data ketenagakerjaan tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah angkatan kerja di Bekasi dari tahun 1990 sampai 2010 terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga jumlah angkatan kerja pada masing-masing wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi relatif mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi ada sebanyak 723.439 orang, tahun 2010 telah mencapai 1.015.941 orang. Dalam kurun waktu satu dekade telah terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 40,43%. Pada tahun 1990 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bekasi ada sebanyak 713.024 orang, kemudian pada tahun 2010 menjadi 1.257.416 orang.

Dalam dua dekade terjadi peningkatan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi sebesar 76.35%. Tingginya angka prosentase tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja di wilayah Bekasi selama periode tahun 1990 hingga 2010 terlihat signifikan. Jika jumlah tenaga kerja kedua wilayah dibandingkan, secara rata-rata terlihat jumlah tenaga kerja di kedua wilayah hampir seimbang walaupun jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bekasi tahun 2010 terlihat lebih banyak di bandingkan jumlah tenaga kerja Kota Bekasi. Namun mempertimbangkan luas wilayah Kabupaten Bekasi yang lebih besar dari pada wilayah Kota Bekasi, seharusnya akan tersedia lebih banyak lapangan kerja dan tenaga kerja di Kabupaten Bekasi.

Dalam grafik diatas terlihat mulai tahun 1990 sampai 2000 terjadi fluktuasi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bekasi dimana penurunan jumlah angkatan kerja paling ekstrim terjadi di tahun 1997, yaitu dari 1.721.415 orang tahun 1996 menjadi 462.604 orang di tahun 1997, penurunan ini berfluktuasi hingga tahun 1999. Kondisi ini disebabkan karena pada saat itu terjadi berbagai krisis ekonomi, politik dan sosial di Indonesia, yaitu mulai dari krisis finansial Asia, krisis moneter perbankan, krisis ekonomi global hingga krisis politik yang dalam jangka panjang berdampak pada hilangnya pekerjaan dan berkurangnya lapangan kerja di Kabupaten Bekasi bahkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Data tenaga kerja Kota Bekasi baru mulai terlihat pada tahun 1996 hal ini dikarenakan sebelum tahun tersebut Kota Bekasi masih merupakan kota administratif bagian dari Kabupaten Bekasi. Sehingga jumlah tenaganya merupakan bagian dari jumlah tenaga kerja Kabupaten Bekasi. Setelah adanya pemekaran, pada tahun 1996 Kota Administratif Bekasi ditingkatkan statusnya wilayahnya menjadi Kotamadya dan kemudian pada tahun 1997 terbentuklah Kota Bekasi dengan wilayah administrasi yang terpisah dari Kabupaten Bekasi.

Mobilitas penduduk non-permanen dalam bentuk komuter antara Bekasi dan Jakarta dapat menunjukkan terjadinya proses suburbanisasi di wilayah Bekasi. Dalam fenomena komuter, penduduk biasanya secara rutin melakukan perjalanan

pergi dan pulang melintasi batas Kota atau Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu sehari. Kegiatan utama yang sering mereka lakukan adalah bekerja dan sekolah atau kegiatan lain yang menyita waktu terbanyak dibandingkan kegiatan lainnya.

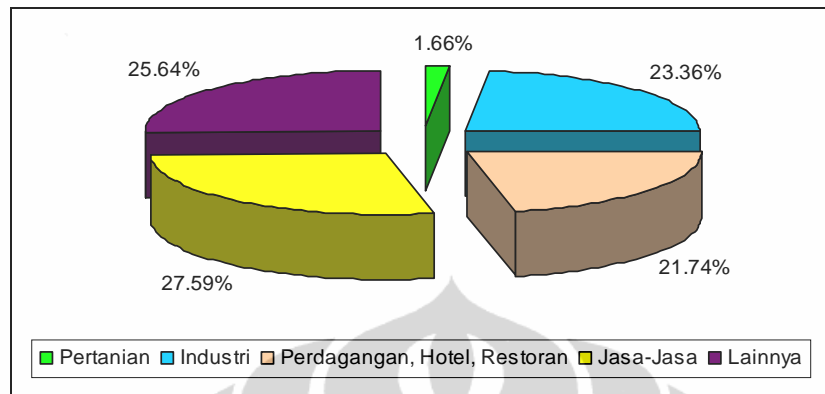
Tabel 5.2. Prosentase Tempat Tinggal dan Tempat Bekerja Penduduk Usia Kerja Tahun 2010

Tempat Tinggal	Tempat Bekerja						Total
	DKI Jakarta	Bogor	Tangerang	Bekasi	Depok	Luar Jabotadebek	
DKI Jakarta	4,471,372 95.3%	26,006 0.6%	78,357 1.7%	60,328 1.3%	15,084 0.3%	38,614 0.8%	4,689,761 100.0%
Bogor	164,546 8.0%	1,793,919 86.7%	27,158 1.3%	19,620 0.9%	24,435 1.2%	39,394 1.9%	2,069,072 100.0%
Tangerang	274,318 13.1%	8,641 0.4%	1,741,342 83.4%	5,197 0.2%	700 0.0%	58,248 2.8%	2,088,446 100.0%
Bekasi	315,115 15.5%	13,054 0.6%	11,660 0.6%	1,656,673 81.3%	4,778 0.2%	35,413 1.7%	2,036,693 100.0%
Depok	258,320 36.1%	34,751 4.9%	13,889 1.9%	3,787 0.5%	396,982 55.5%	7,162 1.0%	714,891 100.0%
Luar Jabotadebek	699,770 0.7%	55,995 0.1%	106,903 0.1%	96,776 0.1%	33,663 0.0%	95,615,797 99.0%	96,608,904 100.0%
Total %	6,183,441 5.7%	1,932,366 1.8%	1,979,309 1.8%	1,842,381 1.7%	475,642 0.4%	95,794,628 88.5%	108,207,767 100.0%

Sumber: BPS Pusat, Data Sakernas 2010 Diolah

Tabel diatas dapat menunjukkan terjadinya suburbanisasi dan mobilitas yang dilakukan penduduk usia kerja, yaitu kegiatan bekerja para tenaga kerja didalam dan diluar wilayah tempat tinggalnya. Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2010 dari seluruh jumlah angkatan kerja Bekasi, yaitu untuk kategori tenaga kerja yang bekerja ada sebesar 15,5% penduduk usia kerja yang tempat tinggalnya di wilayah Bekasi namun bekerjanya di Jakarta. Para pekerja ini berulang-alik dari tempat tinggalnya di Bekasi ke tempat kerjanya di Jakarta. Biasanya mereka berangkat pada pagi hari ke tempat kerja dan kembali ke rumahnya pada sore hari, kegiatan ini dilakukan secara terus menerus. Sementara itu terlihat ada sebesar 81,3% penduduk usia kerja yang bertempat tinggal di wilayah Bekasi dan juga bekerja di wilayah Bekasi. Sisanya sebesar 3,2% bekerja di wilayah lain, seperti Bogor, Tangerang, Depok dan di luar wilayah Jabotadebek.

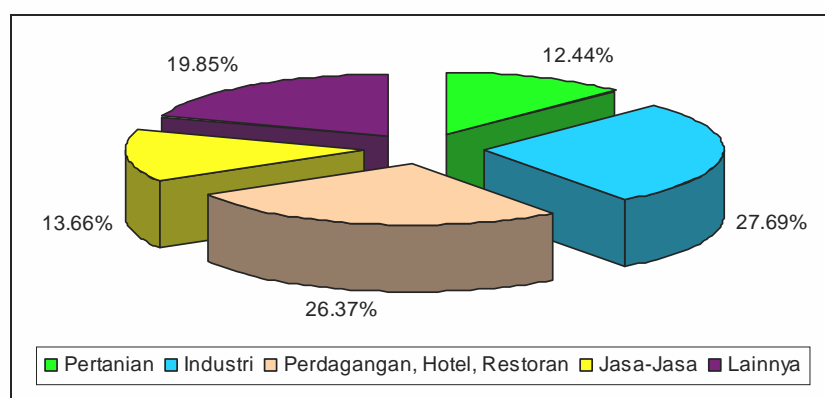
Diagram dibawah ini menunjukkan tenaga kerja Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang bekerja menurut lapangan kerja utama periode tahun 2000-2010.



Gambar 5.3. Tenaga Kerja Kota Bekasi Menurut Lapangan Kerja Utama 2000-2010

Sumber: BPS Jawa Barat, Jawa Barat dalam Angka, Data sekunder diolah

Data diagram diatas menunjukkan dalam jangka waktu sepuluh tahun dari jumlah seluruh tenaga kerja yang ada di Kota Bekasi paling banyak bekerja di sektor jasa-jasa (27,59%), terbanyak kedua bekerja di sektor lainnya (25,64%), kemudian di sektor industri (23,36%), sektor perdagangan, hotel, restoran (21,74%) dan terakhir hanya sedikit tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian (1,66%). Yang dimaksud sektor lainnya adalah gabungan sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas, air minum, konstruksi, angkutan dan komunikasi, keuangan dan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi tenaga kerja yang bekerja di Kota Bekasi adalah di sektor jasa dan sektor industri.



Gambar 5.4. Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Kerja Utama 2000 - 2010

(Sumber: BPS Jawa Barat, Jawa Barat dalam Angka, Data sekunder diolah)

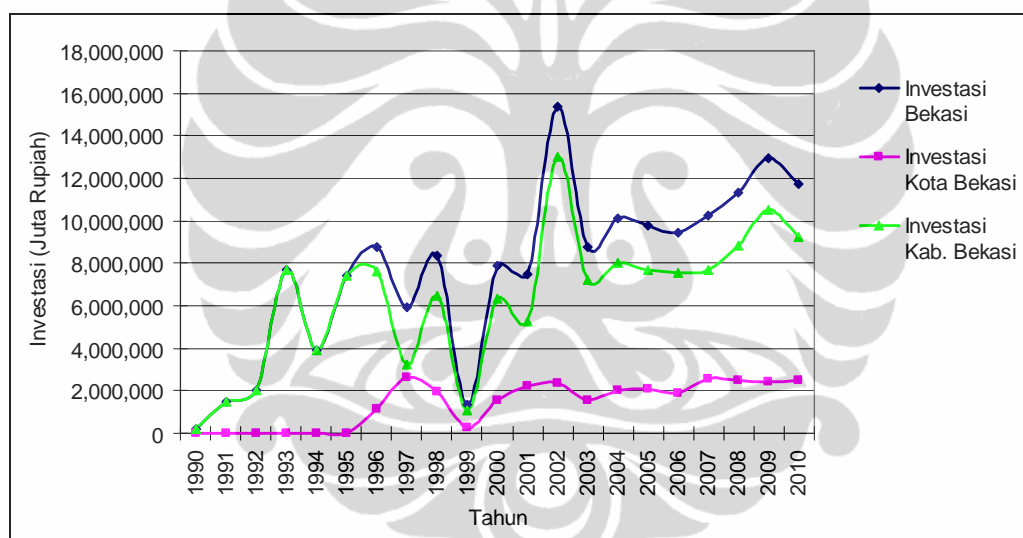
Untuk Kabupaten Bekasi, melalui data diagram yang ditunjukkan diatas diketahui dalam rentang waktu sepuluh tahun dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Bekasi paling banyak bekerja di sektor industri (27,69%), terbanyak kedua bekerja di sektor perdagangan, hotel, restoran (26,37%), kemudian di sektor lainnya (19,85% merupakan sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas, air minum, konstruksi, angkutan dan komunikasi, keuangan dan lainnya), lalu sektor jasa-jasa (13,66%), dan terakhir di sektor pertanian (12,44%). Kalau di Kota Bekasi konsentrasi tenaga kerjanya bekerja pada sektor jasa dan sektor industri, maka di Kabupaten Bekasi konsentrasi tenaga kerjanya bekerja di sektor industri dan sektor perdagangan, hotel, restoran. Persamaannya banyak tenaga kerja di Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi bekerja di sektor industri. Hal ini mengindikasikan bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan industri yang beroperasi di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suburbanisasi, yaitu suburbanisasi manufaktur. Dalam rangka investasi dengan mempertimbangkan biaya produksi dan margin keuntungan yang diperoleh perusahaan antara berlokasi di pusat kota dan subpusat kota, telah mendorong terjadi suburbanisasi manufaktur dari pusat kota ke subpusat kota (wilayah suburban). Kondisi ini berdampak pada tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru di wilayah suburban sehingga terjadi kegiatan investasi perusahaan yang meliputi konstruksi perumahan, pembelian mesin-mesin, pembangunan pabrik-pabrik dan kantor serta tambahan inventori barang perusahaan. Peningkatan investasi di wilayah suburban dari tahun ke tahun menunjukkan terjadinya suburbanisasi manufaktur di wilayah tersebut.

Migrasi perusahaan dari pusat kota Jakarta ke subpusat kota wilayah Bekasi kemudian mendirikan perusahaan atau pabrik di wilayah suburban telah menciptakan komunitas industrial dalam bentuk aglomerasi kawasan industri di wilayah suburban. Fakta ini dapat dilihat dari berkembangnya industri manufaktur dan kawasan industri di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama ini. Beberapa industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, antara lain kawasan

industri Jababeka, Lippo Citty Development, Hyundai Inti Development, Megapolis Manunggal Industrial Estate, Greenland International Industrial Center (GIIC), East Jakarta Industrial Park (EJIP), Delta Silicon, MM2100 Industrial Town, Gobel Dharma Nusantara, Kota Deltamas dan lain-lain. Kawasan-kawasan industri tersebut kini digabung menjadi sebuah Zona Ekonomi Internasional (ZONI) yang memiliki fasilitas khusus di bidang perpajakan, infrastruktur, keamanan dan fiskal.

Data pada gambar 5.3. di bawah ini merupakan informasi yang menunjukkan kondisi investasi wilayah Bekasi, yaitu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi pada periode tahun 1990 hingga 2010.



Gambar 5.5. Investasi Bekasi 1990-2010

Sumber: BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi, BPS Provinsi Jawa Barat, Data sekunder diolah

Analisa data investasi menunjukkan bahwa tren investasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama dua dekade terlihat sangat berfluktuasi dimana peningkatan investasi relatif bergerak lambat dari tahun ke tahun. Pada periode 1990-2000 nilai investasi tertinggi di Kota Bekasi terjadi di tahun 1997, sedangkan di Kabupaten Bekasi nilai investasi tertinggi terjadi pada tahun 1996. Namun setelah berfluktuasi tahun 1998, di tahun 1999 investasi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sama-sama mengalami penurunan yang ekstrim mencapai titik

terendah. Hal ini terjadi karena adanya berbagai krisis ekonomi, keuangan dan politik yang melanda Indonesia pada tahun tersebut.

Periode tahun 2000-2010, terlihat terjadi kenaikan investasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi walaupun masih tetap terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini sejalan dengan pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis ekonomi yang terjadi secara berkepanjangan. Tahun 2002 nilai investasi di Kabupaten Bekasi mencapai titik tertinggi selama dua dekade terakhir, nilai investasi di Kota Bekasi juga turut mengalami peningkatan pada tahun tersebut. Pada periode ini Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi mengalami fluktuasi peningkatan investasi yang bergerak lambat dan mencapai puncaknya di tahun 2009. Namun setelah itu kembali mengalami penurunan di tahun 2010. Penurunan ini terjadi akibat krisis ekonomi global yang kembali melanda Indonesia pada pertengahan tahun 2009. Dalam grafik diatas, data investasi Kota Bekasi baru mulai terlihat pada tahun 1996, hal ini dikarenakan sebelum tahun tersebut Kota Bekasi masih merupakan kota administratif bagian dari Kabupaten Bekasi.

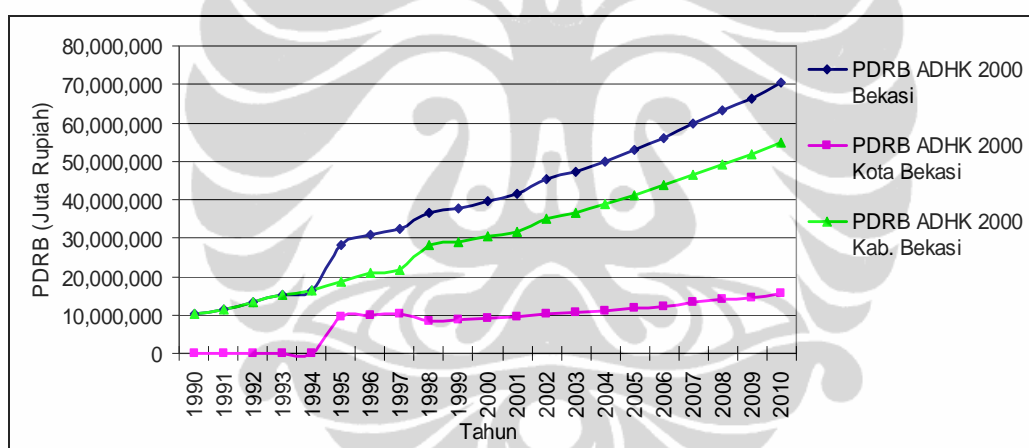
Secara keseluruhan selama periode tahun 1990-2010 tren investasi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi pergerakannya terlihat sama-sama mengalami fluktuasi, namun jika dilihat dalam wilayah yang terpisah terlihat rata-rata nilai investasi Kabupaten Bekasi per tahunnya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai investasi Kota Bekasi pada periode yang sama. Kondisi ini dapat ditelusui dengan membandingkan data PDRB Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menurut sektor lapangan usaha di setiap periode tahunnya. Menurut PDRB lapangan usaha tahun 2009, prosentase sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 78,50% dibandingkan sektor industri pengolahan Kota Bekasi yang sebesar 43,39%. Pada tahun 2009 jumlah industri besar-menengah-kecil di Kota Bekasi ada sebanyak 221 industri, sedangkan di Kabupaten Bekasi ada sebanyak 788 industri yang pada tahun 2010 kemudian meningkat jumlahnya menjadi 813 industri. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan investasi dengan nilai investasi tertinggi lebih banyak dilakukan di Kabupaten Bekasi dari pada di Kota Bekasi.

Secara total wilayah terlihat grafik investasi Bekasi mengikuti pola investasi yang sama dengan kondisi investasi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi baik dalam hal peningkatan maupun penurunan investasinya selama tahun 1990-2010. Secara makro dampak investasi di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi bukan hanya menciptakan output bagi masing-masing wilayah saja, tetapi investasi ini akan memunculkan output-output dan kontribusi PDRB baru diantara keduanya. Hal ini dimungkinkan karena adanya saling keterkaitan ekonomi antara daerah yang satu dengan lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan, kegiatan investasi di wilayah Bekasi akan berpengaruh terhadap penciptaan output bagi daerah-daerah diluar wilayah Bekasi.

Iklim investasi yang baik memberikan kesempatan dan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Investasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Menyediakan lapangan kerja penting untuk menciptakan produktivitas perekonomian yang tinggi. Daya tarik-menarik secara bersamaan antara perusahaan dan tenaga kerja mengindikasikan bahwa adanya suburbanisasi penduduk telah mendorong terjadinya suburbanisasi manufaktur dan suburbanisasi manufaktur mendorong adanya suburbanisasi tenaga kerja dimana suburbanisasi manufaktur dan suburbanisasi tenaga kerja tersebut mengakibatkan terjadinya kegiatan investasi di wilayah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional dan mempunyai implikasi kebijakan yang cukup luas. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Pertumbuhan yang mantap (*steady growth*) harus memenuhi syarat-syarat keseimbangan, yaitu adanya kesamaan antara tingkat pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan modal dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja.

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk melihat tingkat perkembangan dan struktur perekonomian suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat diturunkan beberapa indikator lain seperti laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral dan distribusi perekonomian. Dengan memperhatikan dan menganalisis data PDRB, pemerintah daerah dapat memulai, melanjutkan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan pembangunan yang tepat sehingga terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Data dalam gambar 5.4. dibawah ini adalah informasi yang menunjukkan kondisi PDRB di wilayah Bekasi, yaitu di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Data PDRB yang digunakan adalah data PDRB Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan tahun dasar 2000 menurut penggunaan untuk periode tahun 1990 sampai 2010.



Gambar 5.6. PDRB Bekasi 1990-2010

Sumber: BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi, BPS Provinsi Jawa Barat, Data sekunder diolah

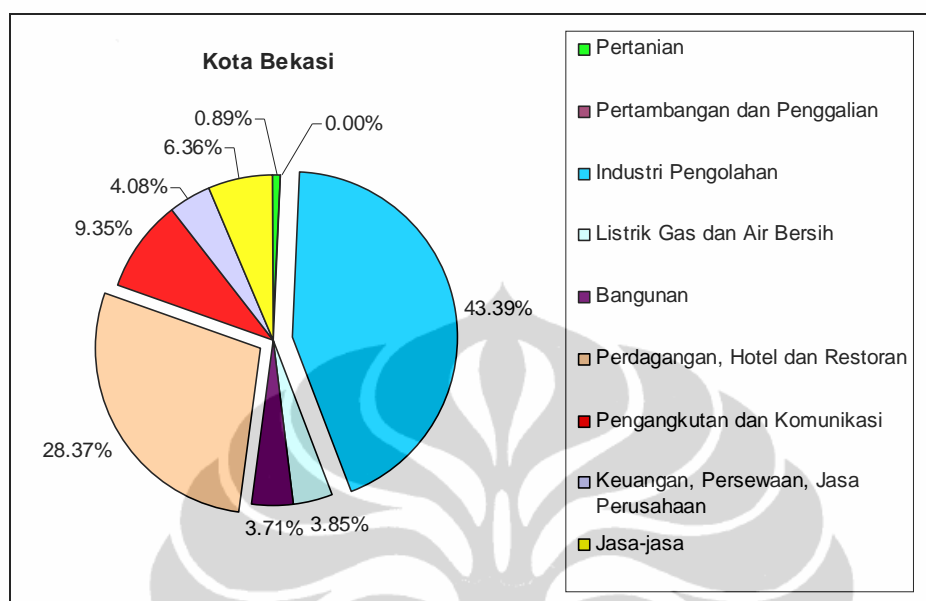
Secara keseluruhan selama periode 1990 - 2010 terlihat grafik PDRB Kota Bekasi dan PDRB Kabupaten Bekasi memiliki tren yang konsisten menaik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama dua dekade terus terjadi peningkatan PDRB walaupun terlihat sangat lambat. Dari data BPS, PDRB Kota Bekasi pada tahun 1996 adalah sebesar 9.852.958,62 juta rupiah, pada tahun 2010 PDRB Kota Bekasi telah mencapai sekitar 15.476.000,00 juta rupiah, selama 14 tahun terlihat terjadi kenaikan PDRB Kota Bekasi walaupun lambat pergerakannya. Rata-rata kenaikan PDRB Kota Bekasi selama

14 tahun tersebut adalah sebesar 7,14% per tahun (401.646 juta rupiah). Bila data PDRB tahun 1996 dibandingkan dengan data PDRB tahun 2010 terlihat rasio kenaikan PDRB adalah sebesar dua kali dalam kurun waktu 14 tahun. Terjadi sedikit penurunan PDRB pada tahun 1998 dan 1999 dikarenakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun-tahun tersebut. Begitu pula dengan PDRB Kabupaten Bekasi pada tahun 1990 adalah sebesar 10.181.895,18 juta rupiah, kemudian pada tahun 2010 telah mencapai 54.989.410,00 juta rupiah, meski terlihat lambat namun selama dua dekade terlihat kenaikan PDRB Kabupaten Bekasi yang cukup signifikan. Rata-rata kenaikan PDRB Kabupaten Bekasi selama dua dekade tersebut adalah sebesar 5% per tahun (2.240.376 juta rupiah). Jika dibandingkan dengan data PDRB tahun 1990 telah terjadi kenaikan PDRB sebesar lima kalinya dalam waktu dua dekade. Terjadi juga penurunan PDRB Kabupaten Bekasi pada tahun 1998 dan 1999, hal ini juga disebabkan karena pengaruh krisis ekonomi yang melanda di Indonesia.

Dari masing-masing grafik PDRB tersebut, terlihat nilai PDRB Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun peningkatan PDRB Kabupaten Bekasi terlihat jauh lebih tinggi daripada PDRB Kota Bekasi di setiap tahunnya. Jika kita kaitkan dengan data investasi pada pembahasan sebelumnya dimana investasi beberapa sektor perekonomian di Kabupaten Bekasi lebih tinggi dibandingkan investasi di Kota Bekasi, hal ini menjadi terlihat wajar karena salah satu komponen pembentuk PDRB adalah share dari investasi yang dilakukan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan selama tahun 1990 hingga 2010 terlihat grafik PDRB Bekasi konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun mengikuti pola yang sama dengan kondisi PDRB Kota Bekasi dan PDRB Kabupaten Bekasi baik dalam hal peningkatan maupun penurunannya. Dalam grafik diatas, data PDRB Kota Bekasi baru mulai terlihat pada tahun 1996 karena sebelum tahun tersebut Kota Bekasi masih merupakan kota administratif bagian dari Kabupaten Bekasi.

Diagram dibawah ini merupakan PDRB Kota Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009. Data PDRB ini menggambarkan

struktur perekonomian Kota Bekasi dimana secara sektoral dapat dilihat kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi.



Gambar 5.7. PDRB Kota Bekasi ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha 2009

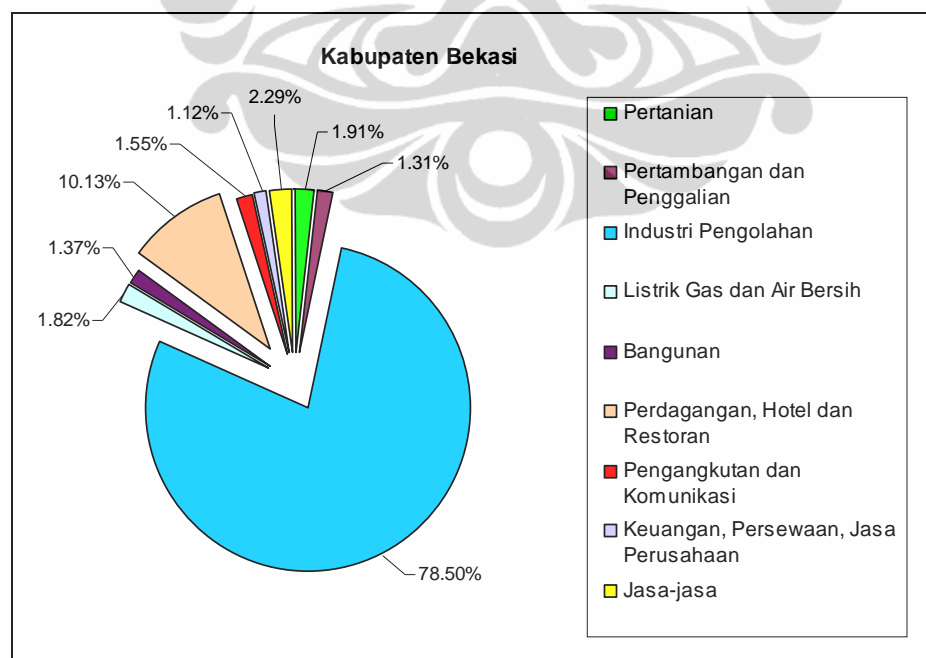
Sumber: BPS Kota Bekasi, Kota Bekasi Dalam Angka 2010, Data sekunder diolah

Dari diagram di atas diketahui bahwa dua sektor dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan pendapatan Kota Bekasi adalah sektor industri pengolahan sebesar 43,39% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,37%. Sektor berikutnya adalah pengangkutan dan komunikasi (9,35%) dan sektor jasa-jasa (6,36%). Sedangkan sektor-sektor lain (12,53%) yang kontribusinya sekitar 3% - 4% adalah sektor keuangan, listrik gas dan air bersih, bangunan dan pertanian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi terutama didukung oleh sektor perindustrian dan sektor perdagangan.

Sebagai wilayah perkotaan, sektor sekunder dan tersier merupakan sektor yang menjadi penopang kegiatan perekonomian Kota Bekasi. Sektor industri masih merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi. Keberadaan kawasan-kawasan industri mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi dengan menempatkan industri pengolahan sebagai sektor yang utama, diikuti sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran. Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar kedua yang

berkontribusi terhadap perekonomian Kota Bekasi. Kegiatan perdagangan Kota Bekasi pada awalnya hanya berada di sepanjang jalan Ir. H. Juanda yang membujur sepanjang 3 Km dari alun-alun kota hingga terminal Kota Bekasi. Di jalan ini terdapat berbagai pusat pertokoan yang dibangun sejak tahun 1978. Kemudian sejak tahun 1993, kawasan lain sepanjang jalan Ahmad Yani berkembang menjadi kawasan perdagangan seiring dengan munculnya beberapa mal serta sentra niaga. Pertumbuhan kawasan perdagangan terus berkembang hingga jalan K.H. Noer Ali (Kalimalang), Kranji dan Harapan Indah. Beberapa pusat perbelanjaan yang tumbuh di Kota Bekasi, antara lain Mal Metropolitan, Mega Bekasi Hypermall, Bekasi Square, Plaza Pondok Gede, Grand Mal, Bekasi Cyber Park, Bekasi Trade Centre, Carrefour, Giant, Makro dan Hypermart.

Gambar berikut ini merupakan PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha Tahun 2009. Sebagai wilayah yang sedang berkembang sektor sekunder dan tersier merupakan sektor yang sangat berperan bagi perekonomian Kabupaten Bekasi. Struktur perekonomian Kabupaten Bekasi secara sektoral ditunjukkan pada diagram berikut ini:



Gambar 5.8. PDRB Kabupaten Bekasi ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha 2009

Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi dalam Angka 2011, Data sekunder diolah

Dari data diagram diatas diketahui dua sektor dominan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan pendapatan Kabupaten Bekasi adalah sektor industri pengolahan sebesar 78,50% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,13%. Sektor berikutnya yang tidak begitu dominan adalah sektor jasa-jasa sebesar 2,29% dan pertanian sebesar 1,91%. Sedangkan sektor-sektor lain (7,17%) yang kontribusinya sekitar 1% - 2% adalah sektor listrik gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, bangunan, pertambangan dan penggalian serta keuangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi terutama ditopang oleh sektor perindustrian dan sektor perdagangan.

Sektor industri merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Bekasi. Dari data statistik BPS, jumlah industri besar dan menengah yang ada di Kabupaten Bekasi tahun 2010 adalah 813 perusahaan dimana jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 281.230 orang. Penyerapan tenaga kerja ini meningkat 22,78% dibandingkan tahun 2009, yaitu sebanyak 229.060 orang. Perusahaan industri yang paling banyak adalah kelompok industri yang menghasilkan barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya, yaitu sebanyak 386 perusahaan. Kelompok industri inilah yang menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu sejumlah 163.246 orang atau 58,05%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dimungkinkan oleh adanya penambahan yang terus-menerus dari faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Investasi pada suatu tahun tertentu akan menambah jumlah barang-barang modal pada tahun berikutnya. Penelitian, pengembangan dan investasi akan menimbulkan inovasi dan perkembangan teknologi yang memberi dampak pada efisiensi produksi. Sedangkan penambahan penduduk dan pendidikan akan menambah jumlah tenaga kerja dan mempertinggi keahlian serta kualitasnya. Pertambahan dalam jumlah dan mutu faktor-faktor produksi yang berlaku dari tahun ke tahun memungkinkan suatu perekonomian untuk terus-menerus mempertinggi kemampuannya mengeluarkan barang-barang dan jasa-jasa yang tentunya akan mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi regional.

5.2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial dilakukan dalam pengolahan data dengan menggunakan metode ekonometrika, yaitu teknik dan metode yang terdapat dalam matematika statistik untuk mengolah dan menganalisis data-data ekonomi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel independen suburbanisasi (populasi suburban, tenaga kerja, investasi) terhadap variabel dependen PDRB Bekasi. Proses pengolahan data dan hasil analisis regresi dilakukan mengikuti tahapan-tahapan berikut ini:

1. Pernyataan Teori atau Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap PDRB Bekasi melalui variabel populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama periode tahun 1990 hingga 2010. Pernyataan teori atau hipotesis dari penelitian ini adalah fenomena suburbanisasi yang teridentifikasi melalui variabel populasi suburban, tenaga kerja dan investasi berpengaruh positif terhadap kondisi PDRB Bekasi.

2. Pembentukan Model Ekonometrika

Untuk menentukan pengaruh dan menguji hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen digunakan persamaan regresi linier berganda sebagai model estimasi dengan memasukkan faktor error (ϵ) kedalamnya (Sudjana, 1996:348). Melalui formulasi persamaan matematika ekonomi maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

dimana:

- Y = PDRB Bekasi (Variabel Dependen)
- X_1, X_2, X_3 = Populasi Suburban, Tenaga Kerja, Investasi (Variabel Independen)
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Parameter Variabel Independen X_1, X_2, X_3
- β_0 = Constanta
- ϵ = Error

3. Pengumpulan dan Perolehan Data

Untuk mengestimasi persamaan regresi diatas dan untuk memperoleh angka numerik constanta dan parameter variabel independen, diperlukan informasi data Y dan X. Data penelitian yang terdapat dalam Tabel Data Penelitian (Lampiran 1) yang diperoleh dan dikumpulkan dari BPS merupakan sumber data sekunder yang digunakan untuk mengestimasi persamaan regresi diatas. Data-data ini merupakan data kuantitatif dari variabel PDRB Bekasi, populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah Bekasi yang mencakup Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

4. Estimasi Parameter Model Ekonometrika

Dalam pengujian ini akan diketahui besar hubungan atau seberapa jauh variabel populasi suburban, tenaga kerja dan investasi berpengaruh terhadap PDRB Bekasi. Untuk itu akan dilakukan uji regresi dengan variabel dependen adalah PDRB Bekasi dan variabel independen adalah populasi suburban, tenaga kerja dan investasi. Oleh karena ada lebih dari satu variabel independen, maka uji regresi tersebut memakai uji regresi linier berganda. Uji regresi dilakukan dengan menggunakan program analisis ekonometrika dan statistika Eviews.

Analisis Regresi :

Dari hasil regresi output model PDRB Bekasi, yaitu antara variabel independen populasi suburban, tenaga kerja dan investasi terhadap variabel dependen PDRB Bekasi menunjukkan nilai t-statistic untuk koefisien variabel populasi suburban sebesar 2,517002 dan investasi sebesar 9,898423 adalah signifikan. Namun nilai t-statistic variabel tenaga kerja terlihat tidak signifikan, yaitu sebesar -1,193199 dan memberikan pengaruh negatif terhadap variabel PDRB. Hal ini ditunjukkan pula dari nilai koefisien probabilitas tenaga kerja sebesar 0,24002 dimana nilai ini lebih besar dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja mempunyai korelasi yang tidak signifikan dengan variabel dependen PDRB Bekasi (Lampiran 2).

Hasil output uji multikolinieritas menunjukkan terjadi korelasi yang kuat antara variabel tenaga kerja dan populasi suburban dengan koefisien korelasi sebesar

0,825154 dimana arah hubungannya positif. Diduga ada hubungan linier yang cukup kuat antara kedua variabel tersebut, hal mengindikasikan adanya gejala multikolinieritas dalam model. Hal ini dapat terjadi kemungkinan karena variabel tenaga kerja merupakan bagian dari populasi (Lampiran 4).

Variabel tenaga kerja yang berpengaruh negatif terhadap PDRB, tidak signifikannya korelasi variable independen tenaga kerja dengan variable dependen PDRB dan adanya multikolinieritas antara variable tenaga kerja dengan populasi suburban akan mengakibatkan estimator yang dihasilkan belum bersifat BLUE sehingga model tersebut belum dapat dipergunakan untuk meramalkan nilai dari variable dependen PDRB dengan mendasarkan pada nilai variable independen populasi suburban, tenaga kerja dan investasi. Untuk itu diputuskan untuk mengeluarkan variabel independen tenaga kerja dari model regresi, sehingga model persamaan regresinya menjadi sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

dimana:

Y	=	PDRB Bekasi (Variabel Dependen)
X ₁ , X ₂	=	Populasi Suburban, Investasi (Variabel Independen)
β ₁ , β ₂	=	Parameter Variabel Independen X ₁ , X ₂
β ₀	=	Constanta
ε	=	Error

Untuk model persamaan regresi diatas, hasil output Eviews menunjukkan nilai t-statistic untuk koefisien variabel populasi suburban sebesar 2,226661 dan investasi sebesar 10,95514 adalah signifikan. Dapat dikatakan populasi suburban dan investasi signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi. Tingkat signifikansi koefisien korelasi diukur dari nilai probabilitasnya dimana nilai probabilitas variabel populasi suburban adalah sebesar 0.0318 dan investasi sebesar 0,0000. Terlihat bahwa nilai probabilitas kedua variabel ini berada dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan dengan variabel dependen (PDRB).

Nilai R-squared adalah 0,779778. R-squared merupakan koefisien determinasi, hal ini berarti 77,98% dari variasi PDRB Bekasi bisa dijelaskan oleh variabel populasi suburban dan investasi. Sedangkan sisanya 22,02% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. R-squared berkisar pada angka 0 sampai 1, semakin kecil angka R-squared, semakin lemah pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F-statistic dengan nilai F tabel. Dari hasil output regresi diperoleh nilai F-statistic sebesar 69,04702 dan nilai Probabilitas (F-statistic) adalah sebesar 0,00000. Nilai F tabel dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% (derajat kepercayaan 95%) adalah $F_{0,05;2;39} = 3,24$. Terlihat bahwa nilai F-statistic > F tabel ($69,04702 > 3,24$), nilai probabilitas (F-statistic)-nya juga terlihat jauh lebih kecil dari 0,05. Hasil uji F ini menunjukkan bahwa variabel populasi suburban dan investasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB Bekasi. Hal ini berarti model regresi bisa di pakai untuk memprediksi PDRB Bekasi.

Analisis Residual :

Analisis residual terkait dengan uji heteroskedastisitas, yaitu untuk melihat residual memiliki varian yang konstan dan residual suatu observasi tidak saling berhubungan dengan residual observasi lainnya. Dalam analisis ini, untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas digunakan metode Uji White Heteroskedasticity. Hasil output analisis residual ditunjukkan oleh Tabel Uji White Heteroskedasticity (Lampiran 3).

Dari output Tabel Uji White Heteroskedasticity, dengan membandingkan nilai Obs*R-squared terhadap nilai chi square pada taraf nyata sebesar 0,05 dengan degree of freedom sebesar 5 maka didapat nilai perbandingan $11,004 < 11,070$. Hal ini mengindikasikan bahwa model estimasi tidak mengandung heteroskedastisitas. Demikian pula jika kita membandingkan probabilitasnya dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh perbandingan dimana $0,0513 > 0,0500$. Nilai

probabilitas lebih besar dari nilai α , sehingga dapat disimpulkan pula bahwa model tersebut tidak mengandung heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah suatu model regresi linier ada korelasi antara variabel pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (periode sebelumnya). Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai statistik koefisien Durbin-Watson (DW). Hasil output regresi menunjukkan nilai koefisien DW adalah sebesar 1,61. Nilai koefisien ini dalam tabel DW berada dikisaran 1,54 hingga 2,46 dimana hal ini berarti bahwa data yang digunakan tidak ada autokorelasinya, residual didistribusikan secara random. Diperkirakan tidak ada variabel yang mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain, hal ini mengindikasikan tidak adanya multikolinieritas (Lampiran 2).

Analisis Correlation :

Analisis correlation terkait dengan uji asosiasi, yaitu untuk mengetahui kuat hubungan dan signifikansi antara dua variabel dapat diketahui melalui nilai koefisien korelasi. Melalui uji korelasi besarnya nilai koefisien korelasi antara variabel independen populasi suburban dan investasi dengan variabel dependen PDRB Bekasi apabila diurutkan dari yang terbesar ke terkecil adalah populasi suburban sebesar 0,985455 dan investasi sebesar 0,786867. Terlihat nilai korelasi antara populasi suburban dengan PDRB Bekasi mempunyai nilai terbesar, yaitu 0,985455. Angka ini menunjukkan kuatnya korelasi antara populasi suburban dengan PDRB Bekasi dan dapat menunjukkan bahwa variabel populasi suburban yang paling signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi dibandingkan variabel independen lainnya. Tanda + menunjukkan bahwa semakin meningkat populasi suburban akan mengakibatkan PDRB Bekasi semakin meningkat pula. Variabel investasi juga mempunyai korelasi yang kuat terhadap PDRB Bekasi (diatas 0,5). Hasil analisis correlation ini menunjukkan bahwa semua variabel independen, yaitu populasi suburban dan investasi mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel dependen PDRB Bekasi (Lampiran 4).

Analisis Normalitas :

Salah satu asumsi dalam analisis statistik adalah data berdistribusi normal. Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas model dilakukan melalui uji statistik Jarque-Bera Normality Test. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal. Hasil output uji normalitas menggunakan aplikasi Eviews yang ditunjukkan oleh Tabel Uji Normalitas Jarque-Bera (Lampiran 4).

Uji normalitas dilakukan dengan melihat hasil nilai koefisien Jarque-Bera dan nilai probabilitas. Untuk nilai Jarque-Bera, ketentuan pengujiannya adalah jika nilai koefisien Jarque-Bera < 2 maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai koefisien Jarque-Bera > 2 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil output uji normalitas menunjukkan nilai koefisien Jarque-Bera dari masing-masing variabel adalah PDRB Kota (0,935479), PDRB Kabupaten (1,368738), populasi Kota (1,243754), populasi Kabupaten (1,084858), investasi Kota (2,715551) dan investasi Kabupaten (0,332843). Terlihat koefisien Jarque-Bera variabel dependen dan independen adalah < 2 (kecuali investasi Kota), dapat dikatakan bahwa data variabel PDRB, populasi suburban dan investasi berdistribusi normal.

Untuk nilai probabilitas ketentuan pengujiannya, jika probabilitas (p-value) $> 0,05$ maka data berdistribusi normal, sebaliknya jika probabilitas (p-value) $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal. Hasil output uji normalitas menunjukkan nilai koefisien probabilitas masing-masing variabel adalah PDRB Kota (0,626417), PDRB Kabupaten (0,504409), Populasi Kota (0,536936), Populasi Kabupaten (0,581335), investasi Kota (0,257232) dan investasi Kabupaten (0,846689). Terlihat koefisien probabilitas variabel dependen dan independen adalah $> 0,05$ dapat dikatakan bahwa data variabel PDRB, populasi suburban dan investasi berdistribusi normal.

5. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah nilai koefisien parameter yang dihasilkan sesuai dengan nilai yang diharapkan oleh teori ekonomi maka perlu dilakukan proses verifikasi

angka statistik dan teori ekonomi melalui uji hipotesis. Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi koefisien regresi variabel dalam model.

♦ **Populasi Suburban**

Hipotesis untuk kasus ini - Uji koefisien regresi variabel populasi suburban

$H_0 : \beta_1 = 0$ menyatakan koefisien regresi tidak signifikan

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ menyatakan koefisien regresi signifikan

Pengambilan Keputusan berdasarkan Nilai Probabilitas :

Jika Probabilitas $> 0,05$ berarti H_0 diterima

Jika Probabilitas $< 0,05$ berarti H_0 ditolak

Keputusan :

Dari hasil output regresi untuk variabel populasi suburban diketahui nilai probabilitasnya adalah 0,0318. Angka ini $< 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak yang berarti koefisien regresi signifikan, dapat dikatakan bahwa populasi suburban benar-benar berpengaruh terhadap PDRB Bekasi.

Pengambilan Keputusan berdasarkan Uji t :

Jika statistik t-hitung $< t$ -tabel berarti H_0 diterima

Jika statistik t-hitung $> t$ -tabel berarti H_0 ditolak

Dari output regresi diketahui t-hitung variabel populasi suburban adalah 2,227

Prosedur untuk mencari nilai t-tabel adalah :

Tingkat signifikansi (α) = 0,05 (5%) untuk uji dua sisi $\alpha/2 = 0,025$.

Uji dilakukan dua sisi karena ingin mengetahui signifikan tidaknya koefisien regresi, bukan untuk mencari lebih kecil atau lebih besar.

Derajat kebebasan (df) = $n - 2 = 42 - 2 = 40$

Maka untuk t-tabel dua sisi di dapat $t_{(0,025;40)} = 2,021$

Keputusan :

Oleh karena $2,227 > 2,021$ atau t-hitung $> t$ -tabel , maka H_0 di tolak yang berarti koefisien regresi signifikan, dapat dikatakan bahwa populasi suburban benar-benar berpengaruh terhadap PDRB Bekasi.

♦ **Investasi**

Hipotesis untuk kasus ini - Uji koefisien regresi variabel investasi

$H_0 : \beta_3 = 0$ menyatakan koefisien regresi tidak signifikan

$H_1 : \beta_3 \neq 0$ menyatakan koefisien regresi signifikan

Pengambilan Keputusan berdasarkan Nilai Probabilitas :

Jika Probabilitas $> 0,05$ berarti H_0 di terima

Jika Probabilitas $< 0,05$ berarti H_0 di tolak

Keputusan :

Dari hasil output regresi untuk variabel investasi diketahui nilai probabilitasnya 0,000. Angka ini $< 0,05$ dengan demikian H_0 di tolak yang berarti koefisien regresi signifikan, dapat dikatakan bahwa investasi benar-benar berpengaruh terhadap PDRB Bekasi.

Pengambilan Keputusan berdasarkan Uji t :

Jika statistik t-hitung $< t$ -tabel berarti H_0 diterima

Jika statistik t-hitung $> t$ -tabel berarti H_0 ditolak

Dari output regresi diketahui t-hitung variabel investasi adalah 10,955.

Prosedur untuk mencari t-tabel adalah sebagai berikut :

Tingkat signifikansi (α) = 0,05 (5%) untuk uji dua sisi $\alpha/2 = 0,025$.

Uji dilakukan dua sisi karena ingin mengetahui signifikan tidaknya koefisien regresi, bukan untuk mencari lebih kecil atau lebih besar.

Derajat kebebasan (df) = $n - 2 = 42 - 2 = 40$

Maka untuk t-tabel dua sisi di dapat $t_{(0,025;40)} = 2,021$

Keputusan :

Oleh karena $10,955 > 2,021$ atau t-hitung $> t$ -tabel , maka H_0 di tolak yang berarti koefisien regresi signifikan, dapat dikatakan bahwa investasi benar-benar berpengaruh terhadap PDRB Bekasi.

Analisis regresi digunakan sebagai alat untuk memperoleh nilai konstanta dan nilai parameter variabel independen. Berdasarkan hasil analisis regresi didapat nilai konstanta β_0 dan nilai parameter variabel independen $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ sehingga model persamaan regresinya adalah:

$$\text{PDRB BEKASI} = -5.323.341 + 6,667 \text{ POP SUB} + 3,907 \text{ INV}$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan beberapa hal berikut ini:

- Konstanta sebesar -5.323.341 menyatakan bahwa jika tidak ada populasi suburban dan tidak ada investasi di Bekasi, maka PDRB Bekasi adalah sebesar -5.323.341 juta rupiah.
- Koefisien regresi populasi suburban sebesar 6,667 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 orang populasi suburban, akan menaikkan PDRB Bekasi sebesar 6,667 juta rupiah. Dapat juga dikatakan apabila populasi suburban bertambah sebesar 1000 unit, maka PDRB Bekasi akan naik sebesar 6.667 juta rupiah.
- Koefisien regresi investasi sebesar 3,907 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) 1 unit investasi, akan meningkatkan nilai PDRB Bekasi sebesar 3,907 juta rupiah. Dapat juga dikatakan apabila investasi bertambah sebesar 1000 unit, maka PDRB Bekasi akan bertambah menjadi sebesar 3.907 juta rupiah.

5.3. Hasil Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fenomena suburbanisasi terhadap PDRB Bekasi melalui faktor populasi suburban, tenaga kerja dan investasi. Dalam kasus ini ingin diketahui apakah ketiga faktor suburbanisasi, yaitu populasi suburban, tenaga kerja dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi dan berapa besar pengaruh yang disumbangkan oleh ketiga faktor tersebut terhadap PDRB Bekasi serta faktor mana diantara ketiga faktor tersebut yang paling signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi.

Hasil analisis regresi menunjukkan nilai koefisien determinasi R-squared adalah 0,779778. Hal ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor fenomena suburbanisasi populasi suburban dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi. Nilai R-squared yang mendekati 1 memiliki arti terdapat hubungan positif dan kuat antara populasi suburban dan investasi dengan PDRB Bekasi. Nilai R-

squared sebesar 0,779778 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang disumbangkan oleh faktor populasi suburban dan investasi terhadap PDRB Bekasi adalah sebesar 77,98% sedangkan sisanya sebesar 22,02% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Hal ini didukung pula dari hasil Uji F yang menyimpulkan bahwa variabel populasi suburban dan investasi secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap PDRB Bekasi dimana hal ini berarti model regresi bisa dipakai untuk memprediksi PDRB Bekasi. Analisis ini menyimpulkan bahwa populasi suburban dan investasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi.

Populasi suburban dan investasi merupakan faktor fenomena suburbanisasi, dari hasil analisis correlation jika dilihat dari besarnya nilai korelasi masing-masing faktor suburbanisasi tersebut terhadap PDRB Bekasi diketahui bahwa nilai korelasi terbesar ada pada faktor populasi suburban, yaitu sebesar 0,985455. Sedangkan investasi nilai korelasi sebesar 0,786867. Hal ini menyimpulkan bahwa dari faktor-faktor suburbanisasi yang diteliti, populasi suburban merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi PDRB Bekasi dibandingkan investasi. Namun investasi juga mempunyai hubungan yang kuat dengan PDRB Bekasi, hal ini ditunjukkan oleh kontribusi nilai korelasinya yang signifikan. Lebih dominannya pengaruh populasi suburban terhadap PDRB Bekasi juga ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi populasi suburban (6,667226) yang terlihat paling tinggi dibandingkan koefisien regresi investasi (3,907223) ini berarti populasi suburban memberi pengaruh yang lebih besar terhadap PDRB Bekasi.

Hasil analisis regresi menunjukkan populasi suburban signifikan berpengaruh terhadap terhadap PDRB Bekasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic dan p-value dari variabel populasi suburban masing-masing sebesar 2,226661 dan 0,0318. Dari uji hipotesis, koefisien regresi populasi suburban juga terlihat benar-benar berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi. Menurut Sukirno (1981:333) dorongan yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu

ekonomi tergantung kepada pendapatan penduduk dan jumlah penduduk. Apabila penduduk bertambah dengan sendirinya luas pasar akan bertambah pula. Karena peranannya ini maka perkembangan penduduk akan menimbulkan dorongan kepada pertambahan dalam produksi dan tingkat kegiatan ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith (2006:345) populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomis (*economies scale*) dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya-biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang tingkat output atau produksi agregat (PDRB) yang lebih tinggi lagi. Kondisi jumlah penduduk yang semakin besar akan berdampak pada peningkatan permintaan agregat dimana total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi (PDRB) akan lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan semakin luasnya pasar domestik maka akan semakin banyak tenaga produktif yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan agregat, kondisi ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak positif pada peningkatan PDRB.

Analisis data deskriptif menunjukkan pada wilayah suburban Bekasi peningkatan populasi suburban secara signifikan telah terjadi mulai tahun 1990 hingga 2010. Jumlah penduduk di wilayah suburban Bekasi lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di wilayah non-suburban Bekasi. Pada tahun 1990 populasi suburban Bekasi berjumlah 1.782.036 orang, tahun 2000 berjumlah 2.875.415 orang dan di tahun 2010 menjadi 4.387.816 orang. Populasi suburban yang besar merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan.

Peningkatan populasi wilayah suburban signifikan meningkatkan konsumsi penduduknya selama dua dekade. Hal ini dapat dikondisikan dengan kuantitas dan nilai konsumsi rumah tangga populasi suburban Bekasi yang tinggi dari tahun ke

tahun untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya. Menurut BPS pengeluaran sektor rumah tangga dipakai untuk konsumsi akhir, baik barang dan jasa yang habis dipakai dalam tempo setahun atau kurang (durable goods) maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun/barang tahan lama (non-durable goods), contohnya, makanan, pakaian, rumah, mobil, peralatan rumah tangga, rekreasi dan lain sebagainya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran atas rumah yang ditempati, seperti sewa rumah, perbaikan ringan, rekening listrik, air telepon dan pengeluaran lainnya.

Dapat dibayangkan dengan sekian banyak jumlah penduduk suburban yang terus meningkat dari tahun ke tahun akibat proses suburbanisasi selama dua dekade hingga saat ini telah meningkatkan konsumsi dan pengeluaran rumah tangga populasi suburban secara signifikan. Pengeluaran penduduk suburban untuk kebutuhan primer, seperti rumah akibat suburbanisasi penduduk dari pusat kota ke wilayah suburban Bekasi merupakan kegiatan konsumsi masyarakat yang signifikan berkontribusi terhadap PDRB Bekasi. Permintaan unit rumah yang akan dibangun terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Ini dapat terlihat dari jumlah Ijin Membangun Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Bangunan Kota Bekasi. Banyaknya IMB yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Bekasi dari tahun 2000 sampai 2009 adalah sejumlah 72.071. IMB yang dikeluarkan selama tahun tersebut berfluktuasi jumlahnya mengikuti permintaan masyarakat dan investasi yang dilakukan pengembang properti. Sementara meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Bekasi telah memberikan pengaruh terhadap meluasnya kawasan pemukiman di Kabupaten Bekasi. Menurut data Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi, jumlah realisasi pembangunan rumah dan ruko selama tahun 2004 hingga 2010 di Kabupaten Bekasi ada sebanyak 429.017 unit.

Menurut BPS, penghitungan PDRB melalui metode pengeluaran (PDRB menurut penggunaan) salah satu komponennya adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini berarti dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga penduduk suburban Bekasi berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Bekasi. Data PDRB Kota Bekasi dan

Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Usaha 2009 menunjukkan sektor kedua yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kegiatan sektor-sektor ini mencakup penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik perorangan ataupun rumah tangga, misalnya kegiatan penjualan barang baru atau bekas oleh pedagang besar atau pedagang eceran, kegiatan penyediaan akomodasi untuk penginapan dan kegiatan usaha penyediaan makanan dan minuman jadi yang umumnya dikonsumsi di tempat penjualan.

Menurut BPS, untuk sektor restoran nilai output diperoleh dengan cara mengalikan pengeluaran makanan dan minuman per kapita selama setahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sektor lain yang juga merupakan bagian dari konsumsi populasi suburban yang berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB Bekasi adalah sektor pengangkutan dan komunikasi, yaitu kegiatan pengangkutan penumpang (komuter) dan barang (logistik) dengan menggunakan sarana transportasi dan komunikasi penduduk. Terkait dengan kegiatan konsumsi ini, hasil analisis deskriptif menunjukkan peningkatan populasi suburban Bekasi ternyata paralel dengan peningkatan PDRB Bekasi dan signifikan terjadi dari tahun ke tahun selama tahun 1990 hingga 2010. Kondisi ini mencoba menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi suburban Bekasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Bekasi.

Hasil analisis regresi menunjukkan variabel investasi signifikan berpengaruh terhadap PDRB Bekasi. Hal ini diketahui dari nilai t-statistic variabel investasi sebesar 10,95514 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000. Dari uji hipotesis, koefisien regresi variabel investasi juga terlihat signifikan yang berarti investasi benar-benar berpengaruh positif terhadap PDRB Bekasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan tren investasi Bekasi selama dua dekade (1990-2010) terlihat sangat berfluktuasi dimana peningkatan investasi relatif bergerak lambat dari tahun ke tahun. Fluktuasi terjadi karena adanya berbagai krisis politik, ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia selama periode tersebut. Namun secara

keseluruhan investasi Bekasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun terlihat lambat.

Menurut Sukirno (1981:183), investasi, yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal. Stok barang modal (*capital goods*) digunakan dalam proses produksi, yang secara agregat akan membentuk pendapatan nasional atau regional (PDRB). Dari hasil analisis deskriptif diketahui, dilihat secara keseluruhan selama periode yang sama (1990-2010) PDRB Bekasi mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun walaupun terlihat sangat lambat. Dalam periode yang sama (1990-2010) selama dua dekade terlihat peningkatan investasi Bekasi paralel dengan peningkatan PDRB Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi Bekasi berkontribusi terhadap peningkatan PDRB Bekasi.

Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan. Menurut Dornbusch et al (2008:28) Investasi berarti penambahan stok modal fisik. Investasi meliputi konstruksi perumahan, pembelian mesin-mesin, pembangunan pabrik-pabrik dan kantor serta tambahan inventori barang perusahaan. Fakta investasi ini dapat dilihat dari berkembangnya industri manufaktur dan kawasan industri di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi selama ini. Beberapa industri manufaktur yang terdapat di Bekasi, antara lain kawasan industri Jababeka, Lippo City Development, Hyundai Inti Development, Megapolis Manunggal Industrial Estate, Greenland International Industrial Center (GIIC), East Jakarta Industrial Park (EJIP), Delta Silicon, MM2100 Industrial Town, Gobel Dharma Nusantara, Kota Deltamas dan lainnya.

Hal lain adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki perusahaan menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan investasi sekaligus

juga merupakan potensi pajak bagi pemerintah daerah. Secara total dalam kurun waktu 1999-2009 ada sebanyak 28.360 SIUP yang telah dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi juga dapat menunjukkan jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan investasi di Kabupaten Bekasi. Secara total dalam kurun waktu 2006-2010 ada sebanyak 12.231 TDP yang telah dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bekasi.

Kegiatan pembangunan pabrik-pabrik dan kantor, pembelian mesin-mesin, tanah, gedung-gedung serta penambahan persediaan barang perusahaan di wilayah Bekasi oleh para pengusaha atau investor merupakan kegiatan investasi yang padat modal. Kegiatan investasi yang lebih padat modal dari pada padat karya di wilayah Bekasi merefleksikan investasi lebih berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi dari pada tenaga kerja. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi dimana uji hipotesis menunjukkan koefisien regresi investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi, sedangkan koefisien regresi tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa dari ketiga faktor suburbanisasi yang diteliti, yaitu populasi suburban, tenaga kerja dan investasi ternyata faktor tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Bekasi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-statistic dan p-value dari variabel tenaga kerja masing-masing sebesar -1,193199 dan 0,24002. Dari hasil uji hipotesis, koefisien regresi variabel tenaga kerja juga terlihat tidak signifikan berpengaruh terhadap PDRB Bekasi. Hasil analisis correlation juga menunjukkan adanya multikolinieritas antara variabel tenaga kerja dengan populasi suburban dimana koefisien korelasinya mencapai sebesar 0,825154 dan arah hubungannya positif. Hal ini akan membuat estimator yang dihasilkan belum bersifat BLUE sehingga diputuskan untuk mengeluarkan variabel tenaga kerja dari model regresi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan karena secara teori tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap

pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2006) kenaikan angkatan kerja, secara tradisional dianggap sebagai sebagai salah satu faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi (PDRB). Mankiw (2003) menjelaskan bahwa output barang dan jasa suatu perekonomian (PDRB) bergantung pada jumlah input dari faktor-faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja.

Analisis hal yang membuat tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi kemungkinannya adalah karena tenaga kerja merupakan bagian dari populasi. Hal ini terlihat dari korelasi yang cukup kuat antara variabel tenaga kerja dengan populasi suburban dimana arah hubungannya juga positif. Menurut BPS, tenaga kerja merupakan angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan penduduk yang termasuk dalam pengangguran, meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (BPS). Dari definisi angkatan kerja ini dapat diketahui bahwa tenaga kerja merupakan bagian dari populasi. Menurut Sukirno (1981:332) salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu tingkat pertambahan dari pendapatan nasional atau PDRB adalah jumlah dan mutu dari penduduk. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan pertambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Peningkatan produksi di berbagai sektor perekonomian secara langsung akan mempengaruhi PDRB. Pada tahun 2010 kelompok penduduk usia kerja di Kabupaten Bekasi berjumlah 1.790.897 orang, yaitu sekitar 68,08% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bekasi. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk Kabupaten Bekasi adalah angkatan kerja.

Jika dianalisis dari sektor ketenagakerjaan, di Kota Bekasi selama sepuluh tahun terakhir (2000-2010) sektor yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar adalah sektor jasa-jasa (27,59%) kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,74%) dan sektor industri (23,36%). Sedangkan di Kabupaten Bekasi untuk periode yang sama, sektor yang memiliki jumlah tenaga kerja terbesar adalah sektor Industri (27,69%), kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran

(26,37%) dan sektor jasa-jasa (13,66%). Jika hal ini dihubungkan dengan PDRB Kota Bekasi Menurut Lapangan Usaha 2009, diketahui sektor yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan Kota Bekasi adalah sektor industri pengolahan sebesar 43,39% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 28,37%.

Sementara untuk PDRB Kabupaten Bekasi Menurut Lapangan Usaha 2009, sektor yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan Kabupaten Bekasi adalah sektor industri pengolahan sebesar 78,50% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 10,13%. Di Kota Bekasi kontribusi PDRB yang terbesar adalah dari sektor industri sementara jumlah tenaga kerja terbesar yang digunakan untuk proses produksi adalah di sektor jasa-jasa. Terlihat ada ketidaksesuaian antara data jumlah pekerja terbesar yang melakukan produksi output dengan sektor terbesar yang berkontribusi terhadap PDRB Kota Bekasi. Sektor-sektor ini mencerminkan profil tenaga kerja perkotaan, seperti sektor perekonomian yang berkembang di Kota Jakarta. Umumnya sektor perekonomian yang paling berkembang di daerah perkotaan adalah sektor sekunder dan tersier. Hal yang kurang jelas dari data angkatan kerja BPS bukan hanya jumlah angkatan kerja melainkan juga profil angkatan kerja, yaitu dimana mereka bekerja.

Model persamaan regresi yang diformulasikan dari hasil penelitian ini adalah $PDRB\ BEKASI = -5.323.341 + 6,667\ POP\ SUB + 3,907\ INV$. Dari hasil verifikasi melalui uji signifikansi koefisien regresi secara parsial (uji t) diketahui bahwa populasi suburban dan investasi benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB Bekasi. Dari hasil uji signifikansi model, yaitu uji F diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama populasi suburban dan investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB Bekasi.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa kesimpulan yang diperoleh adalah:

Fenomena suburbanisasi berupa pertumbuhan populasi suburban, tenaga kerja dan investasi di wilayah suburban Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap fluktuasi dan pertumbuhan PDRB Bekasi selama periode tahun 1990-2010 (*ceteris paribus*). Namun secara independen, tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Bekasi. Dari ketiga faktor suburbanisasi yang diteliti, populasi suburban merupakan faktor yang paling signifikan mempengaruhi PDRB Bekasi.

Selama dua dekade proses suburbanisasi telah menciptakan mobilitas orang dan barang dimana hal ini telah mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk suburban, peningkatan jumlah tenaga kerja, peningkatan kegiatan investasi serta berkembangnya kawasan pemukiman dan kawasan industri di wilayah Bekasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa suburbanisasi di Bekasi terutama terjadi akibat adanya perpindahan penduduk, meluasnya kawasan pemukiman dan perkembangan industri di wilayah suburban Bekasi.

Ditinjau dari sisi permintaan output, peningkatan populasi suburban, yaitu para urbanit yang pindah dari pusat Kota Jakarta ke wilayah suburban Bekasi telah meningkatkan daya beli dan konsumsi penduduk suburban Bekasi. Selama dua dekade proses suburbanisasi, belanja konsumsi penduduk suburban terus mengalami peningkatan khususnya untuk konsumsi kebutuhan primer dan sekunder penduduk. Besarnya belanja konsumsi penduduk suburban telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Bekasi. Ini menunjukkan bahwa suburbanisasi penduduk mempunyai peranan yang penting.

Investasi yang terjadi selama periode suburbanisasi (1990-2010) memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional Bekasi. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap struktur perekonomian Bekasi dimana nilai dan kegiatan investasi lebih besar dilakukan pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini membuat pertumbuhan dan share dari kedua sektor ekonomi tersebut menjadi yang paling besar kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

Suburbanisasi selama dua dekade telah memberi dampak pada pembangunan di wilayah Bekasi. Beberapa contoh pembangunan fisik yang dilakukan di Bekasi, antara lain pembangunan berbagai jenis perumahan dan fasilitasnya oleh para pengembang, pembangunan infrastruktur jalan oleh pemerintah dan penyediaan sarana dan prasarana transportasi oleh pihak swasta dan pemerintah. Wilayah yang awalnya merupakan wilayah rural telah mengalami perubahan menjadi suburban sedangkan wilayah yang tadinya merupakan wilayah suburban berubah menjadi urban. Pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama dua dekade di Bekasi telah menjadikan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menjadi kawasan sentra industri dan kawasan tempat tinggal kaum urban.

Kota Jakarta juga diuntungkan dengan terjadinya suburbanisasi di Bekasi. Masalah kependudukan Kota Jakarta, yaitu kepadatan penduduknya yang sangat tinggi secara tidak langsung teratasi dengan adanya suburbanisasi. Terjadinya suburbanisasi secara massive ke wilayah pinggiran Jakarta berdampak positif pada penurunan jumlah penduduk Kota Jakarta. Hal ini juga menjadi solusi bagi permasalahan sosial-ekonomi penduduk dan pemerintah Ibu Kota Jakarta.

Temuan-temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suburbanisasi yang terjadi di wilayah sub-pusat kota dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan bagi pembangunan wilayah dan perekonomian wilayah sub-pusat kota sekaligus membantu menyelesaikan permasalahan kependudukan pusat kota. Dapat dikatakan bahwa fenomena suburbanisasi berdampak positif bagi wilayah sub-pusat kota dan pusat kota.

6.2. Saran

Terkait dengan masalah kependudukan, pengelolaan kota dan kelestarian lingkungan proses suburbanisasi memerlukan intervensi pemerintah. Ekternalitas negatif suburbanisasi dapat mengganggu kehidupan penduduk dan mengancam kelestarian lingkungan di wilayah Bekasi. Suburbanisasi yang tidak terkendali akan mengakibatkan penyebaran penduduk di wilayah Bekasi menjadi tidak merata. Tempat beraktivitas dan bermukim penduduk akan didominasi hanya di beberapa wilayah kecamatan tertentu saja sehingga akan terjadi peningkatan kepadatan penduduk di kecamatan tersebut. Kondisi ini juga akan berdampak pada tidak meratanya pembangunan di wilayah Bekasi. Untuk itu diperlukan penataan dan pengelolaan wilayah yang terencana dan terintegrasi. Kota yang pembangunannya tidak ditata dengan baik pasti akan menyebabkan permasalahan dikemudian hari.

Suburbanisasi dapat dikendalikan prosesnya melalui fasilitasi dan regulasi pemerintah dalam berbagai bentuk kebijakan kependudukan, kebijakan tata guna lahan dan kebijakan lingkungan. Misalnya, untuk kecamatan yang kepadatan dan jumlah penduduknya sudah tidak sesuai lagi dengan luas wilayahnya, proses suburbanisasi bisa dialihkan ke kecamatan wilayah suburban lain yang masih jarang penduduknya sehingga tidak terjadi pemusatan pertumbuhan penduduk. Sosialisasi dan penegakkan hukum terhadap implementasi kebijakan pengelolaan kota dan wilayah serta kebijakan lingkungan harus ditingkatkan dan konsisten dilakukan agar tumbuh kesadaran dikalangan masyarakat dan para pelaku usaha ternasuk pemerintah. Hal ini penting dilakukan agar permasalahan penduduk suburban, yaitu para urbanit yang pindah dari pusat Kota Jakarta ke wilayah suburban Bekasi tidak kembali terjadi di Bekasi pada masa yang akan datang.

Pemerintah Bekasi perlu terus meningkatkan pelayanan publik terhadap penduduk Bekasi. Peningkatan pelayanan publik yang utama dibutuhkan adalah penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik bagi penduduk suburban. Akibat pertumbuhan penduduk suburban yang pesat dan pembangunan wilayah Bekasi yang semakin

meluas selama dua dekade, keberadaan komuter menjadi meningkat baik jumlah maupun frekwensi komutangnya sehingga membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Bekasi dengan pusat kota.

Pengembangan dan penggunaan teknologi transportasi diharapkan dapat menyediakan kegiatan komuter dengan biaya yang murah, perjalanan yang cepat, aman dan nyaman serta akses yang mudah sehingga mendukung kegiatan perjalanan pergi dan pulang komuter. Penyediaan transportasi masal yang dapat mengangkut penduduk dalam skala besar, pemeliharaan dan pembangunan jalan-jalan baru, pembangunan sistem dan pengawasan lalu lintas jalan yang terintegrasi serta pengendalian jumlah kendaraan bermotor di wilayah Bekasi dapat menjadi solusi bagi permasalahan ini. Selain berbagai pajak dan pendapatan, benefit lain dalam multiplier effect akan diperoleh pemerintah Bekasi. Penerimaan pendapatan akan diperoleh dari berbagai sektor perekonomian, pemborosan energi dapat dikurangi, penghematan berbagai macam biaya dan waktu sehingga produktivitas meningkat. Kondisi ini realistis karena terjadi efisiensi dan efektivitas di semua kegiatan ekonomi. Dalam jangka pendek atau jangka panjang hal ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap peningkatan PDRB Bekasi.

Iklm investasi daerah yang baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan iklim investasi adalah sangat penting dilakukan untuk menarik minat para investor luar. Iklim investasi yang baik akan memberikan kesempatan dan insentif kepada sektor swasta untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kegiatan usaha. Hal ini dapat dilakukan secara pasti dan terencana melalui berbagai kebijakan peningkatan investasi daerah, antara lain melalui perbaikan infrastruktur daerah, reformasi birokrasi terkait kepastian hukum dan efisiensi sistem dalam perizinan usaha, peraturan ketenagakerjaan, transparansi prosedur dan kegiatan usaha. Kebijakan lain dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pemerintah dapat menawarkan keringanan pajak, pemberian subsidi, insentif peraturan atau kemudahan ekspor.

Peningkatan investasi akan mendorong perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Bekasi. Namun perlu diperhatikan bahwa realisasi alokasi investasi jangan hanya dipusatkan pada sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran saja, sektor lain pun perlu ditingkatkan kontribusinya untuk mendukung sektor basis tersebut berdasarkan potensi, sumber daya dan keunggulan komperatif daerah. Misalnya, sehubungan dengan masalah komuter penduduk suburban, peningkatan kinerja sektor pengangkutan oleh pihak pemerintah dan swasta dapat menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Hal ini tentu saja akan sejalan dengan penyediaan fasilitas dan infrastruktur publik yang dibutuhkan penduduk Bekasi dan sekaligus berkontribusi terhadap PDRB Bekasi. Melalui kebijakan ini diharapkan peran pemerintah dan keterlibatan pihak swasta dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah pada masa yang akan datang.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi sebaiknya terintegrasi dan mencakup keseluruhan aspek regional Bekasi. Belajar dari permasalahan Kota Jakarta, hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi permasalahan serupa pada masa yang akan datang. Kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah yang perlu disinergikan, antara lain kebijakan pemukiman penduduk, kebijakan investasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan tata guna lahan dan pengelolaan wilayah, kebijakan lingkungan, kebijakan transportasi dan kebijakan infrastruktur daerah.

Jika hal-hal diatas dilakukan oleh seluruh stakeholder Bekasi maka dalam jangka panjang akan tercipta multiplier effect di berbagai sektor perekonomian Bekasi yang tidak hanya meningkatkan tetapi juga mempercepat laju pertumbuhan PDRB Bekasi. Proses suburbanisasi di Bekasi juga dapat dikendalikan fenomenanya sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat dilakukan dan dinikmati hasilnya oleh seluruh masyarakat Bekasi secara terus-menerus. Untuk mewujudkan hal ini tentu saja dibutuhkan komitmen, kerjasama dan koordinasi yang baik diantara lembaga dan instansi terkait yang ada di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo, 2008. *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Edisi Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Armstrong, Harvey and Taylor, Jim, 2000. *Regional Economics and Policy*. Third Edition, Massachusetts, Blackwell Publishers.
- Arsyad, Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Bendavid, A., 1974. *Regional Economic Analysis for Practitioners*. New York, Praeger Publisher.
- Bintoro, 1989. *Interaksi Desa - Kota dan Permasalahannya*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Black, James A. dan Champion, Dean J., 1999. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Blair, John P., 1991. *Urban and Regional Economics*. Homewood, Illinois, Irwin Co.
- Boediono, 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE.
- Daldjoeni N., 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung, Penerbit Alumni ITB.
- Daryanto, Arief dan Hafizrianda, Yundy, 2010. *Model-Model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah : Konsep dan Aplikasi*. Bogor, PT. Penerbit IPB Press.
- Djarwanto dan Subagyo, Pangestu, 2000. *Statistik Induktif*. Edisi Keempat, Yogyakarta, BPFE - Yogyakarta.
- Dornbusch, Rudiger, Fischer, Stanley dan Startz, Richard, 2008. *Makroekonomi*. Edisi Kesepuluh, Jakarta, Media Global Edukasi.
- Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Edward, Marry E., 2007. *Regional and Urban Economics and Economic Development, Theory and Methods*. AUERBACH
- Gujarati, Damodar N., 2004. *Basic Econometrics*. Fourth Edition, New York, McGraw-Hill Companies.

- Hugo, G.J., 1981. *Population Mobility in West Java*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hardiyansyah, 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Penerbit Gava Media.
- Irsad, Walter, 1975. *Introduction to Regional Science*. Englewood Cliffs New Jersey, Prentice Hall, Inc.
- Kuncoro, Mudrajat, 2010. *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Jakarta, Erlangga.
- Koestoer, Raldi Hendro et all, 2001. *Dimensi Keruangan Kota, Teori dan Kasus*. Jakarta, UI Press.
- Leaf, M., 1994. *The Suburbanization of Jakarta. A concurrence of Economics and Ideology*. TWPR.
- Lipsey, Richard G., dan Steiner, Peter O, 1981. *Economics*. Edisi Keenam, New York, Harper International Edition.
- Mankiw, N. Gregory, 2003. *Teori Makroekonomi*. Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga.
- Mantra, I.B., 1989. *Mobilitas Penduduk Sirkuler dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan UGM.
- McCann, Philip, 2001. *Urban and Regional Economics*. New York, Oxford University Press Inc.
- McGee, T.G., 1987. *Urbanisasi or Kotadesasi: The Emergence of New Regions of Economics Interaction in Asia*. Honolulu Environment and Policy Institut.
- McGee. T. G., 1991. *The Urbanization Process in The Third World*. London, G. Bell and Sons.
- McKee, David L., Robert D. Dean and William H. Leahy (Eds.), 1978. *Regional Economics, Theory and Practice*. New York, The Free Press.
- Needlemen, L. (ed), 1968. *Regional Analysis: Selected Readings*. Penguin Book.
- O'Sullivan, Arthur, 2007. *Urban Economics*. New York, McGraw-Hill Companies.
- Pasaribu, Amudi, 1983. *Pengantar Statistik*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala, 2008. *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Edisi Keempat, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Richardson, Harry W., 1972. *Regional Economics: Location Theory, Urban Structure and Regional Change*. London, Weidenfeld and Nicolson.
- Richardson, Harry W., 1978. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional (Terjemahan Paul Sitohang)*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sadyohutomo, Mulyono, 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah - Realita dan Tantangan*. Jakarta, Bumi Aksara
- Schumpeter, Joseph A., 1961. *The Theory of Economic Development*. New York, Oxford University Press.
- Shryock, H. dan Siegel, 1976. *The Methods and Material of Demography*. New York Academic Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1995. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi, Jakarta, Pustaka LP3ES Indoensia.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang, Baduose Media.
- Smith, Adam, 1950. *An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*. Cannan (ed), Buku 2.
- Solow, R. M., 1970. *Growth Theory*. Oxford, Oxford University Press.
- Sudjana, 1996. *Metoda Statistika*. Edisi Keenam, Bandung, Tarsito.
- Sukirno, Sadono, 1981. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono, 1982. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Swan, T. W., 1956. *Economic Growth and Capital Accumulation*. Economic Record, 32.
- Swastha, Basu dan Irawan, 2003. *Manajemen Pemasaran Modern*. Liberty, Yogyakarta,
- Tambunan, Tulus T.H., 2003. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Robinson, 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi, Jakarta, Bumi Aksara.

Tarigan, Robinson, 2009. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Kedua, Jakarta, Bumi Aksara.

Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C., 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan, Jilid 1, Jakarta, Erlangga.

Tesis dan Skripsi

Arif, Firgani, 2009. *Kajian Pelayanan Rute Angkutan Umum di Kota Palembang*. Tesis Pascasarjana Jurusan Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.

Artawan I. A, 1998. *Pola dan Dinamika Spasial Penggunaan Lahan Pada Kawasan Penyangga Metropolitan Jakarta (Studi Kasus Bekasi Jawa Barat)*. Skripsi Sarjana Insitut Pertanian Bogor, Bogor.

Gianasari, Taurisa, 2010. *Identifikasi Suburbanisasi dan Faktor yang Mempengaruhinya Kasus Jabodetabek*. Skripsi Sarjana Jurusan Fakultas Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.

Kuswitoyo, 2001. *Wilayah Urban di Kota Bekasi Tahun 2000*. Skripsi Sarjana Jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Departemen Geografi Universitas Indonesia, Depok.

Reunianda, Deri Prahayu, 2008. *Urbanisasi dan Kualitas Hidup di Kabupaten Bekasi Pada Tahun 1996 dan 2006*. Skripsi Sarjana Jurusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Departemen Geografi Universitas Indonesia, Depok.

Jurnal

Henderson, J. Vernon, Ari Kuncoro dan Damhuri Nasution, 1996. *The Dynamics of Jabotabek Development*. Bulletin of Indonesian Economics Studies.

Jordan, Stacy, John P. Ross, Kurt G. Usowski, 1988. *U.S. Suburbanization in the 1980s*. Regional Science and Urban Economics.

McGee, T.G. and Greenberg, 1992. *Emergence of Extended Metropolitan Region in ASEAN: Towards the Year 2000*. Asean Economic Bulletin, July.

Rustiadi, E., K. Mizuno and T. Kitamura 1998. *Analysis of Land Use Changes in City Suburbs (A Case Study on Some Sub-districts of Bekasi Area of West Java Indonesia)*. Journal of Rural Planning Association, Vol.18 No.1.

Rustiadi, E., K. Mizuno and S. Kobayashi, 1998. *Measuring Spatial Pattern of the Suburbanization Process*. Journal of Rural Planning Association, Vol.17 No.1

Sridhar, Kala Seetharam, 2007. *Density Gradients and Their Determinants*. Regional Science and Urban Economics.

White, M. J., 1986. *Sex Differences in Urban Communiting Patterns*. The American Economic Review, 76(2), 386-372, April 07, 2008. <http://www.jstor.org/stable/1818798>.

Karya Ilmiah

Badan Pengawas dan Keuangan Pembangunan Pusat, 2007. *Ekonomi Makro*. Edisi Ketiga, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.

Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia 2011. *Data Strategis Badan Pusat Statistik*. Katalog BPS:1103003, 2011. BPS Jakarta.

Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia 2009. *Profil Komuter Suvei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005*. Jakarta, BPS Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung dan Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bandung, 2008. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Bandung Tahun 2008*. Katalog BPS:1119.3204, 2008. BPS Kabupaten Bandung.

Badan Pusat Statistik, Kota Bekasi 2010. *Indikator Ekonomi Makro Kota Bekasi 2008*. Bekasi, BPS Kota Bekasi.

Bayoh, Isaac, Elena G. Irwin dan Timothy Haab, 2002. *Flight from Blight vs Natural Evolution: Determinants of Household Residential Location Choice and Suburbanization*. Makalah disampaikan pada American Agricultural Economics Association Meeting, Long Beach, CA.

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2002-2007*.

Rustiadi, Ernan dan Panuju, Dyah Retno, 1999. *Suburbanisasi Kota Jakarta*. Makalah pada Seminar Nasional Tahunan VII Persada Tahun 1999, Bogor.

Rustiadi, Ernan, Panuju, Dyah Retno dan Saefulhakim, R. Sunsun. *Analisis Kecenderungan dan Dampak Proses Suburbanisasi di Wilayah Jabotabek: Suatu Upaya Pengembangan Model Pembangunan Wilayah Metropolitan*.

Rustiadi, E. dan Panuju, D.R., 2000. *A Study of Spatial Pattern of Suburbanization Process: A Case Study in Jakarta Suburb*. IGU-LUCC Pre-Congress Meeting in Tsukuba.

Sitorus Jansen, Rustiadi Ernan dan Ardiansyah, M., 2000. *Spatial Pattern Land Use Changes and Suburbanization Process in Jabotabek Area at 1992-2000 Period*. IPB, Bogor Agricultural University.

Naskah dan Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Website

http://en.wikipedia.org/wiki/Urban_sprawl

<http://en.wikipedia.org/wiki/Suburb>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Suburbanization>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Bekasi>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bekasi

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bekasi



Lampiran 1

Data PDRB, Populasi Suburban, Tenaga Kerja dan Investasi Wilayah Bekasi Tahun 1990 – 2010

Wilayah	Tahun	PDRB ADHK 2000 (Juta Rp)	Populasi Suburban	Tenaga Kerja	Investasi (Juta RP)
Kota Bekasi	1990	3,054,568.55	945,450	213,907	70,464.81
	1991	3,644,418.35	1,014,078	240,758	478,588.09
	1992	4,212,822.24	1,076,793	244,290	641,838.49
	1993	4,890,717.64	1,142,761	406,870	2,440,586.99
	1994	5,250,630.17	1,212,119	291,791	1,235,786.38
	1995	5,999,895.09	1,257,120	346,257	2,349,948.48
	1996	9,852,958.62	1,307,738	451,874	1,156,961.57
	1997	10,414,864.91	1,386,611	473,685	2,645,808.07
	1998	8,489,974.70	1,454,797	574,404	1,927,895.80
	1999	8,675,373.51	1,466,044	597,215	296,962.57
	2000	9,069,483.00	1,529,698	723,439	1,545,176.28
2001	9,600,926.00	1,559,397	687,250	2,219,144.49	
2002	10,175,298.00	1,651,814	724,127	2,333,555.93	
2003	10,545,460.00	1,684,634	720,697	1,559,768.16	
2004	11,113,000.00	1,748,238	755,377	2,047,996.93	
2005	11,740,000.00	1,929,785	794,208	2,060,947.94	
2006	12,362,484.55	1,993,764	919,353	1,861,679.29	
2007	13,255,153.53	2,065,580	921,181	2,557,474.82	
2008	14,042,404.18	2,139,257	963,557	2,463,741.07	
2009	14,622,593.73	2,216,955	1,083,298	2,448,450.33	
2010	15,476,000.00	2,240,532	1,015,941	2,471,382.78	
Kabupaten Bekasi	1990	7,127,326.63	836,586	499,117	164,417.88
	1991	7,809,467.88	889,390	515,911	1,025,545.90
	1992	9,027,476.23	936,063	523,479	1,375,368.19
	1993	10,480,109.23	984,649	871,863	5,229,829.26
	1994	11,251,350.37	1,035,202	625,267	2,648,113.67
	1995	12,856,918.06	1,064,198	741,979	5,035,603.90
	1996	21,129,059.15	1,139,545	1,721,415	7,623,239.78
	1997	21,823,418.21	1,191,200	462,604	3,269,478.93
	1998	28,253,554.70	1,247,715	493,148	6,440,176.72
	1999	28,914,687.88	1,307,452	467,579	1,058,970.14
	2000	30,528,127.49	1,345,717	753,610	6,325,776.66
2001	31,783,599.91	1,259,900	710,317	5,242,471.36	
2002	34,987,215.16	1,299,398	714,579	13,015,633.36	
2003	36,696,913.71	1,442,645	775,626	7,204,233.18	
2004	38,927,471.82	1,506,780	779,044	8,049,082.29	
2005	41,267,788.74	1,566,821	798,380	7,692,617.75	
2006	43,793,374.65	1,587,810	818,976	7,553,329.60	
2007	46,481,291.50	1,642,851	834,784	7,700,816.10	
2008	49,302,484.58	1,695,282	985,334	8,829,067.68	
2009	51,789,567.15	1,757,997	1,017,208	10,495,704.63	
2010	54,989,410.00	2,147,284	1,257,416	9,266,438.26	

Sumber : BPS Kota Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi, BPS Provinsi Jawa Barat, Data Sekunder Diolah

Lampiran 2

Hasil Regresi Pengaruh Faktor Suburbanisasi Terhadap PDRB Bekasi

Dependent Variable: PDRB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/05/12 Time: 13:42
 Sample: 1990 2010
 Included observations: 21
 Cross-sections included: 2
 Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5293986.	4433997.	-1.193953	0.2399
POPULASI?	9.176633	3.645859	2.517002	0.0162
TK?	-6.721719	5.633360	-1.193199	0.2402
INVESTASI?	4.180768	0.422367	9.898423	0.0000
R-squared	0.787731	Mean dependent var		19421658
Adjusted R-squared	0.770973	S.D. dependent var		15114437
S.E. of regression	7233282.	Akaike info criterion		34.51668
Sum squared resid	1.99E+15	Schwarz criterion		34.68217
Log likelihood	-720.8502	Hannan-Quinn criter.		34.57734
F-statistic	47.00604	Durbin-Watson stat		1.693884
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah

Dependent Variable: PDRB?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/05/12 Time: 21:18
 Sample: 1990 2010
 Included observations: 21
 Cross-sections included: 2
 Total pool (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5323341.	4457950.	-1.194123	0.2396
POPULASI?	6.667226	2.994270	2.226661	0.0318
INVESTASI?	3.907223	0.356657	10.95514	0.0000
R-squared	0.779778	Mean dependent var		19421658
Adjusted R-squared	0.768485	S.D. dependent var		15114437
S.E. of regression	7272470.	Akaike info criterion		34.50584
Sum squared resid	2.06E+15	Schwarz criterion		34.62996
Log likelihood	-721.6226	Hannan-Quinn criter.		34.55133
F-statistic	69.04702	Durbin-Watson stat		1.609867
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah

Lampiran 3

Uji White Heteroskedasticity

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.058120	Prob. F(9,11)	0.1291
Obs*R-squared	13.17561	Prob. Chi-Square(9)	0.1548
Scaled explained SS	8.300452	Prob. Chi-Square(9)	0.5042

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 06/24/12 Time: 12:23

Sample: 1990 2010

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.12E+14	5.72E+13	1.966247	0.0750
POPULASI	-87723506	76058167	-1.153374	0.2732
POPULASI ²	20.95357	25.58056	0.819121	0.4301
POPULASI*TK	42.18640	46.47475	0.907727	0.3835
POPULASI*INVESTASI	-13.86562	5.604674	-2.473938	0.0309
TK	-75964325	1.06E+08	-0.716938	0.4884
TK ²	-43.01003	30.22519	-1.422986	0.1825
TK*INVESTASI	11.82541	13.37630	0.884056	0.3956
INVESTASI	22464940	6777045.	3.314858	0.0069
INVESTASI ²	0.018790	0.311751	0.060274	0.9530
R-squared	0.627410	Mean dependent var	7.94E+12	
Adjusted R-squared	0.322564	S.D. dependent var	1.13E+13	
S.E. of regression	9.29E+12	Akaike info criterion	62.86281	
Sum squared resid	9.49E+26	Schwarz criterion	63.36021	
Log likelihood	-650.0595	Hannan-Quinn criter.	62.97076	
F-statistic	2.058120	Durbin-Watson stat	2.485316	
Prob(F-statistic)	0.129147			

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	3.302546	Prob. F(5,15)	0.0329
Obs*R-squared	11.00404	Prob. Chi-Square(5)	0.0513
Scaled explained SS	7.984456	Prob. Chi-Square(5)	0.1571

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 07/14/12 Time: 07:49

Sample: 1990 2010

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.43E+14	4.36E+13	3.273122	0.0051
POPULASI	-1.40E+08	39033422	-3.595602	0.0026
POPULASI ²	35.14331	9.176288	3.829796	0.0016
POPULASI*INVESTASI	-8.334044	2.436952	-3.419864	0.0038
INVESTASI	18961520	5260952.	3.604199	0.0026
INVESTASI ²	0.219174	0.165762	1.322223	0.2059
R-squared	0.524002	Mean dependent var	7.98E+12	
Adjusted R-squared	0.365336	S.D. dependent var	1.15E+13	
S.E. of regression	9.15E+12	Akaike info criterion	62.76297	
Sum squared resid	1.26E+27	Schwarz criterion	63.06141	
Log likelihood	-653.0112	Hannan-Quinn criter.	62.82774	
F-statistic	3.302546	Durbin-Watson stat	1.550627	
Prob(F-statistic)	0.032907			

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah

Lampiran 4

Matrik Koefisien Korelasi Antarvariabel

	PDRB_ BEKASI	POPULASI_ SUB_BEKASI	TK_ BEKASI	INVESTASI_ BEKASI
PDRB_BEKASI	1	0.985455	0.825734	0.786867
POPULASI SUB_BEKASI	0.985455	1	0.825154	0.750789
TK_BEKASI	0.825734	0.825154	1	0.785437
INVESTASI_BEKASI	0.786867	0.750789	0.785437	1

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah

	PDRB_ BEKASI	POPULASI_ SUB_BEKASI	INVESTASI_ BEKASI
PDRB_BEKASI	1	0.985455	0.786867
POPULASI SUB_BEKASI	0.985455	1	0.750789
INVESTASI_BEKASI	0.786867	0.750789	1

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah

Uji Normalitas Jarque-Bera

	PDRB KOTA	PDRB KAB	POPULASI KOTA	POPULASI KAB	INVEST KOTA	INVEST KAB
Mean	9356620.	29486696	1572532.	1327833.	1753055.	5964091.
Median	9852959.	30528127	1529698.	1299398.	2047997.	6440177.
Maximum	15476000	54989410	2240532.	2147284.	2645808.	13015633
Minimum	3054569.	7127327.	945450.0	836586.0	70464.81	164417.9
Std. Dev.	3686563.	15555818	404809.0	330707.8	808392.1	3392780.
Skewness	-0.187029	-0.029452	0.206349	0.555793	-0.821015	-0.071411
Kurtosis	2.036050	1.750679	1.881468	2.935083	2.361859	2.400005
Jarque-Bera	0.935479	1.368738	1.243754	1.084858	2.715551	0.332843
Probability	0.626417	0.504409	0.536936	0.581335	0.257232	0.846689
Sum	1.96E+08	6.19E+08	33023165	27884485	36814159	1.25E+08
Sum Sq. Dev.	2.72E+14	4.84E+15	3.28E+12	2.19E+12	1.31E+13	2.30E+14
Observations	21	21	21	21	21	21

Sumber: Eviews, Data Penelitian Diolah